



# LAPORAN KINERJA

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
EKOREGION KALIMANTAN

Tahun 2023



# LAPORAN KINERJA (LKj)

## Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023

**Pengarah**  
Dr. Mini Farida ST., M.Si.

**Koordinator**  
Syaiful Bahri, S.Hut., M.Sc.

**Penyusun**  
Doni Kristianto, S.H.  
Rahmawati, S.E.  
Aswin Febriyanto, S.Kom.

**Editor, Desain Sampul dan Tata Letak :**  
Sub Urusan Rencana Program dan Sub Urusan Kehumasan  
Bagian Tata Usaha  
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Hak Cipta ©:



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN**  
Balikpapan, Januari 2024

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 dapat disusun dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan P3E Kalimantan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal di masa yang akan datang.

Balikpapan, 17 Januari 2024  
Kepala Pusat,



Mini Farida



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 5 huruf g dan Pasal 7, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3E Kalimantan) dibentuk untuk memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada Pasal 652 dinyatakan bahwa Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Tugas P3E adalah melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan berkomitmen untuk mendukung Program Dukungan Manajemen yang diamanatkan kepada P3E Kalimantan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja yang disajikan pada tabel capaian perjanjian kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 menurut Sasaran sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022

| Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | % Capaian*)    |
|---|--|---------|-----------|----------------|
| 1. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E              | 4 poin  | 4,23 poin | 105,75%        |
|   | 2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion | 5 pemda | 5 pemda   | 100,00%        |
| <b>Rata - rata capaian Tahun 2023</b>   |  |         |           | <b>102,88%</b> |

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) secara umum telah menunjukkan kinerja sangat baik dengan nilai tingkat capaian di atas 100%, khususnya Capaian kinerja RO Survey layanan kepuasan publik. Capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 105.75%, yang masuk dalam kategori sangat baik atau sangat berhasil.

Capaian kinerja P3EK tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1.78% dari tahun 2022 (101,1%). Kenaikan capaian kinerja tersebut mengindikasikan telah dilakukan upaya-upaya sistematis guna memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja P3EK pada tahun 2023. Untuk mendukung pencapaian kinerja dimaksud, P3E Kalimantan mengelola pagu awal sebesar Rp 14.261.640.000,- dan pagu tersebut sepanjang tahun 2023 telah dilakukan revisi dalam rangka Automatic Adjustment anggaran, sehingga pagu akhir tahun 2023 menjadi Rp 13.597.084.000,- dengan realisasi sebesar Rp\_13.538.651.508,- atau mencapai 99,57%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 di lingkungan P3E Kalimantan dengan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran, metode, sumber daya manusia maupun waktu antara lain:

- a. Efisiensi anggaran dan metode kegiatan: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online antara lain menggunakan media aplikasi zoom meeting dan pemanfaatan whatsapp group. Penyesuaian proses kerja ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas output sampai outcome hasil pekerjaan. Pengalihan kelebihan belanja pegawai untuk evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan meningkatkan realisasi ke nilai maksimal.
- b. Efisiensi sumber daya manusia: personel yang dibutuhkan untuk mempersiapkan suatu pembahasan secara offline tidak perlu melibatkan banyak orang sebagai panitia kegiatan dalam menyiapkan dan memfasilitasi peserta rapat.
- c. Efisiensi waktu: dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, waktu untuk membahas beberapa kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua) pembahasan dalam sehari mengingat tidak banyak dibutuhkan persiapan untuk pelaksanaan rapat melalui video conference dibandingkan jika pembahasan dilaksanakan secara offline/fisik. Selain itu rapat dapat dilaksanakan kapanpun dan metode hybrid tanpa harus memastikan kehadiran seluruh peserta Work From Office (WFO).

Dalam mewujudkan capaian kerjanya, P3E Kalimantan telah berkolaborasi dan bersinergi dengan Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Humas, Biro Kepegawaian, Pusdatin, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota se-Kalimantan serta seluruh UPT LHK Ekoregion Kalimantan mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta memberikan informasi yang terukur guna perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka perwujudan good governance. Diharapkan pada waktu mendatang P3E Kalimantan senantiasa menjadi penggerak perbaikan target capaian kinerja dan mendorong kinerja hingga pada tingkatan outcome di level ekoregion.



# DAFTAR ISI

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| <b>i</b>   | KATA PENGANTAR                |
| <b>ii</b>  | RINGKASAN EKSEKUTIF           |
| <b>iv</b>  | DAFTAR ISI                    |
| <b>v</b>   | DAFTAR TABEL                  |
| <b>vi</b>  | DAFTAR GAMBAR                 |
| <b>1</b>   | BAB I PENDAHULUAN             |
| <b>18</b>  | BAB II PERENCANAAN KINERJA    |
| <b>29</b>  | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA |
| <b>122</b> | BAB IV PENUTUP                |
| <b>123</b> | LAMPIRAN                      |

# DAFTAR TABEL

|          |   |    |
|----------|---|----|
| Tabel 1  | Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2022   | ii |
| Tabel 2  | Tugas dan Fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan P3EK   | 1  |
| Tabel 3  | Barang Milik Negara (BMN) P3EK 2023   | 7  |
| Tabel 4  | Potensi dan Permasalahan P3E Kalimantan   | 8  |
| Tabel 5  | Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024  | 21 |
| Tabel 6  | Keterkaitan Program Sasaran dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I   | 22 |
| Tabel 7  | Kegiatan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024 Setelah Restrukturisasi Program | 23 |
| Tabel 8  | Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja P3E Kalimantan 2023   | 24 |
| Tabel 9  | Kegiatan, KRO/RO, dan Pagu P3E Kalimantan 2023  | 25 |
| Tabel 10 | Daftar Revisi DIPA P3EK 2022  | 26 |
| Tabel 11 | Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja   | 32 |
| Tabel 12 | Capaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)  | 33 |
| Tabel 13 | Capaian Kinerja Sasaran 1   | 34 |
| Tabel 14 | Rata-rata Skor dan Peringkat Area Pelayanan   | 36 |
| Tabel 15 | Capaian Daftar Kegiatan Pendukung Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E  | 38 |
| Tabel 16 | Rekomendasi dan Tindak Lanjut Raker KLHK di Ekoregion Kalimantan 2023   | 40 |
| Tabel 17 | Hasil Penjaminan Kualitas PM Maturitas SPIP   | 53 |
| Tabel 18 | Anggaran Layanan Kegiatan Korwil  | 56 |
| Tabel 19 | Capaian indikator kinerja Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion   | 57 |
| Tabel 20 | Daftar Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 59 |
| Tabel 21 | Daftar Realisasi Output Kegiatan Pendukung Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 60 |
| Tabel 22 | Capaian dan Realisasi Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion   | 65 |
| Tabel 23 | Capaian dan Realisasi Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 75 |
| Tabel 24 | Status Mutu Air Titik Pantau Kualitas Air DAS Barito dan DAS Mahakam Tahun 2022   | 79 |
| Tabel 25 | Titik Pantau Kualitas Air Cemar Sedang DAS Barito dan DAS Mahakam Tahun 2022  | 79 |
| Tabel 26 | Tabel Hasil Identifikasi Parameter Kunci dan Sumber Pencemar pada Titik Pantau Cemar Sedang DAS Barito Di Kota Banjarmasin Tahun 2022   | 82 |
| Tabel 27 | Tabel Hasil Identifikasi Parameter Kunci dan Sumber Pencemar pada Titik Pantau Cemar Sedang DAS Mahakam di Kota Samarinda Tahun 2022  | 84 |
| Tabel 28 | Analisis DPSIR Pengendalian Pencemara Air Kota Banjarmasin  | 86 |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| Tabel 29 | Analisis DPSIR Pengendalian Pencemaran Air Kota Samarinda  | 88  |
| Tabel 30 | Target dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur  | 90  |
| Tabel 31 | Nilai IKPS Tahun 2022 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  | 92  |
| Tabel 32 | Status Ketercapaian Nilai IKPS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022  | 93  |
| Tabel 33 | Kondisi debit maksimum (Qmax) dan debit minimum (Qmin) dan debit rata (Qav) sungai-sungai yang terdapat di dalam dan sekitar calon wilayah IKN | 101 |
| Tabel 34 | Ketersediaan Air di Wilayah IKN  | 102 |
| Tabel 35 | Titik Pantau Kualitas Air di Wilayah IKN   | 103 |
| Tabel 36 | Tutupan Lahan Wilayah IKN Tahun 2017 dan 2022  | 107 |
| Tabel 37 | Analisis dampak perubahan tutupan lahan dalam wilayah IKN  | 108 |
| Tabel 38 | Timbulan Sampah Domestik di Wilayah IKN  | 109 |
| Tabel 39 | Jumlah kebutuhan sarana prasarana persampahan berdasarkan target penduduk  | 109 |
| Tabel 40 | Efektifitas Capaian Kinerja  | 111 |
| Tabel 41 | Efisiensi pencapaian kinerja P3E Kalimantan pada Tahun 2023  | 112 |
| Tabel 42 | Capaian Rincian Output (RO) P3E Kalimantan 2023  | 114 |
| Tabel 43 | Tahapan pembangunan command center ekoregion   | 117 |
| Tabel 44 | Pagu dan Realisasi Anggaran P3E Kalimantan TA 2023   | 120 |
| Tabel 45 | Sandingan Realisasi Anggaran P3E Kalimantan TA. 2022 dan 2023  | 121 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Gambar 1  | Kedudukan dan Wilayah Kerja P3E Kalimantan                                    | 2  |
| Gambar 2  | Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | 3  |
| Gambar 3  | Sebaran ASN P3E Kalimantan 2020-2023  | 5  |
| Gambar 4  | Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan 2020-2023                                 | 5  |
| Gambar 5  | Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2020-2023                              | 6  |
| Gambar 6  | Peta Strategi Pencapaian Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan        | 17 |
| Gambar 7  | Visi Misi dan Sasaran Strategis KLHK  | 19 |
| Gambar 8  | Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi P3E Kalimantan Kurun Waktu 2020-2023 | 27 |
| Gambar 9  | Prosentase P3E Kalimantan Kurun Waktu 2020-2023                               | 28 |
| Gambar 10 | Capaian Kinerja dan Anggaran P3EK pada tahun 2020 - 2023                      | 30 |



|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Gambar 11 | Pelaksanaan Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Layanan P3E  | 35 |
| Gambar 12 | Form survei tingkat kepuasan layanan P3E   | 37 |
| Gambar 13 | Alur Pelaksanaan Rapat Kerja KLHK di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023   | 39 |
| Gambar 14 | Raker KLHK di Ekoregion Kalimantan 2023  | 42 |
| Gambar 15 | Alur pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024                           | 43 |
| Gambar 16 | Foto kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024                              | 44 |
| Gambar 17 | Siklus SAKIP   | 45 |
| Gambar 18 | Lembar Kerja Evaluasi e-SAKIP P3E Kalimantan   | 51 |
| Gambar 19 | Rumus penilaian NKA  | 51 |
| Gambar 20 | Nilai EKA Smart P3E Kalimantan 2023  | 52 |
| Gambar 21 | Nilai IKPA OMSPAN P3E Kalimantan 2023  | 52 |
| Gambar 22 | Talkshow Sosialisasi Rangkaian Kegiatan HPSN Kalimantan 2023   | 54 |
| Gambar 23 | Talkshow Memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-40  | 55 |
| Gambar 24 | Kunjungan Kerja Pejabat Tinggi KLHK ke wilayah Kalimantan Timur  | 57 |
| Gambar 25 | Capaian Kinerja dan Anggaran P3EK pada tahun 2020 – 2023   | 58 |
| Gambar 26 | Alur pencapaian Outcome Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 61 |
| Gambar 27 | Inovasi Outcome Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 62 |
| Gambar 28 | Alur Pembelajaran Integrasi Sinkronisasi Perencanaan Di DAS Manggar  | 63 |
| Gambar 29 | Rekapitulasi fasilitasi Integrasi perencanaan dan perijinan sebagai Outcome 2023   | 63 |
| Gambar 30 | Progres monev integrasi perencanaan bidang LHK sebagai Outcome 2023  | 64 |
| Gambar 31 | Rekomendasi Teknis Dalam Perencanaan DAS dan Waduk Manggar sebagai Outcome 2023  | 64 |
| Gambar 32 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran   | 66 |
| Gambar 33 | Bimtek Pengendalian Pencemaran Air Upaya Peningkatan IKA   | 67 |
| Gambar 34 | Pembuatan Prototipe Pengolahan Air limbah Rumah Tangga Metoda Sederhana  | 67 |
| Gambar 35 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Workshop Pengelolaan Sampah, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan LB3 dan B3 dan Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 68 |
| Gambar 36 | Rakernis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  | 68 |
| Gambar 37 | Raker Pengelolaan Sampah   | 68 |
| Gambar 38 | Workshop Pengelolaan Sampah  | 69 |
| Gambar 39 | Pameran Pengelolaan Sampah di Mall E-Walk  | 69 |
| Gambar 40 | Kampanye Pengelolaan Sampah  | 69 |
| Gambar 41 | Rapat Kerja Teknis Pengelolaan B3  | 69 |

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Gambar 42 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitasi Pengelolaan Sampah   | 70  |
| Gambar 43 | Bimtek dan fasilitasi Sistem digitalisasi Bank Sampah di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Paser  | 70  |
| Gambar 44 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion DAS Barito   | 71  |
| Gambar 45 | Bimtek pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (merkuri) di lahan bekas penambangan emas rakyat  | 72  |
| Gambar 46 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion DAS Kapuas  | 73  |
| Gambar 47 | Profil IKLH Kota Pontianak  | 74  |
| Gambar 48 | Bimtek Peningkatan IKL  | 74  |
| Gambar 49 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada DAS Mahakam dan DAS Barito dalam rangka peningkatan IKLH | 76  |
| Gambar 50 | Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2022  | 77  |
| Gambar 51 | Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022   | 77  |
| Gambar 52 | Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022  | 78  |
| Gambar 53 | Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022  | 78  |
| Gambar 54 | Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2022  | 78  |
| Gambar 55 | Peta Tutupan Lahan dan DTA Titik Pantau Cemar Sedang Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar  | 81  |
| Gambar 56 | Peta Tutupan Lahan dan DTA Titik Pantau Cemar Sedang Kota Samarinda   | 83  |
| Gambar 57 | Kerangka Analisis DPSIR Kualitas Air Kota Banjarmasin   | 85  |
| Gambar 58 | Analisis DPSIR Kota Samarinda   | 87  |
| Gambar 59 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah dalam rangka peningkatan IKPS dan mendorong sirkular ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.  | 87  |
| Gambar 60 | Diagram Alir Analisis DPSIR Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Jakstrada  | 91  |
| Gambar 61 | Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi Dampak Pembangunan wilayah IKN terhadap kualitas lingkungan di DAS Riko Manggar.   | 98  |
| Gambar 62 | Proses Penentuan Isu PB Prioritas   | 99  |
| Gambar 63 | Peta Batas Daerah Aliran Sungai Calon Ibu Kota Negara   | 100 |
| Gambar 64 | Peta Sebaran Titik Pantau Kualitas Air dan Catchment Area Zona Inti IKN   | 102 |
| Gambar 65 | Peta Tutupan Lahan Zona Inti IKN Tahun 2022   | 106 |
| Gambar 66 | Indikator kinerja kegiatan  | 113 |
| Gambar 67 | Gambaran pusat data dan analisis pengendalian pembangunan Ekoregion   | 115 |
| Gambar 68 | Alur proses pembangunan command center ekoregion  | 116 |
| Gambar 69 | Tampilan antar muka/dashboard Pusat Data dan Analisis (Ecoregion Command Center) Pengendalian Pembangunan Ekoregion   | 117 |
| Gambar 70 | Jumlah Sampah yang di Kelola BSU P3E Kalimantan   | 118 |
| Gambar 71 | Jenis Sampah yang di Kelola BSU P3E Kalimantan  | 118 |
| Gambar 72 | Alur BSU P3E Kalimantan   | 118 |
| Gambar 73 | Alur Digitalisasi pencatatan BSU P3E Kalimantan   | 119 |



PENDAHULUAN

BAB  
I



## A LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. Kewajiban instansi untuk menyusun laporan kinerja diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan memberikan gambaran singkat dan lengkap mengenai capaian kinerja atas penggunaan anggaran selama tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Sekretaris Jenderal KLHK atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## B PROFIL ORGANISASI

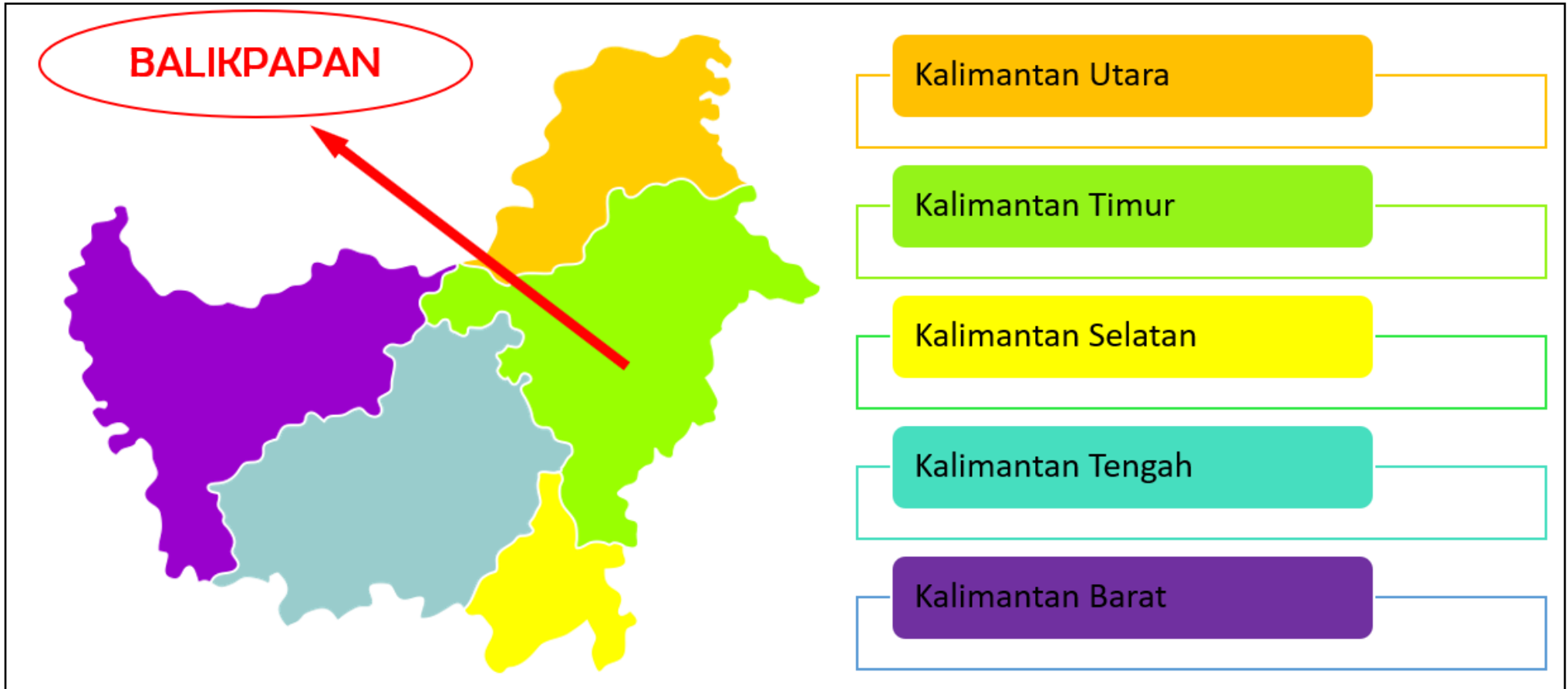
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 5 huruf g dan Pasal 7, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3E Kalimantan) dibentuk untuk memberikan dukungan yang bersifat substantif kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pada Pasal 652 dinyatakan bahwa Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Tugas P3E adalah melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion (Pasal 654).

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/menLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berlaku lagi. Perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan ini adalah adanya penguatan fungsi P3E. Gambaran perubahan P3E berdasarkan kedua peraturan tersebut ada dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tugas dan Fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan P3EK

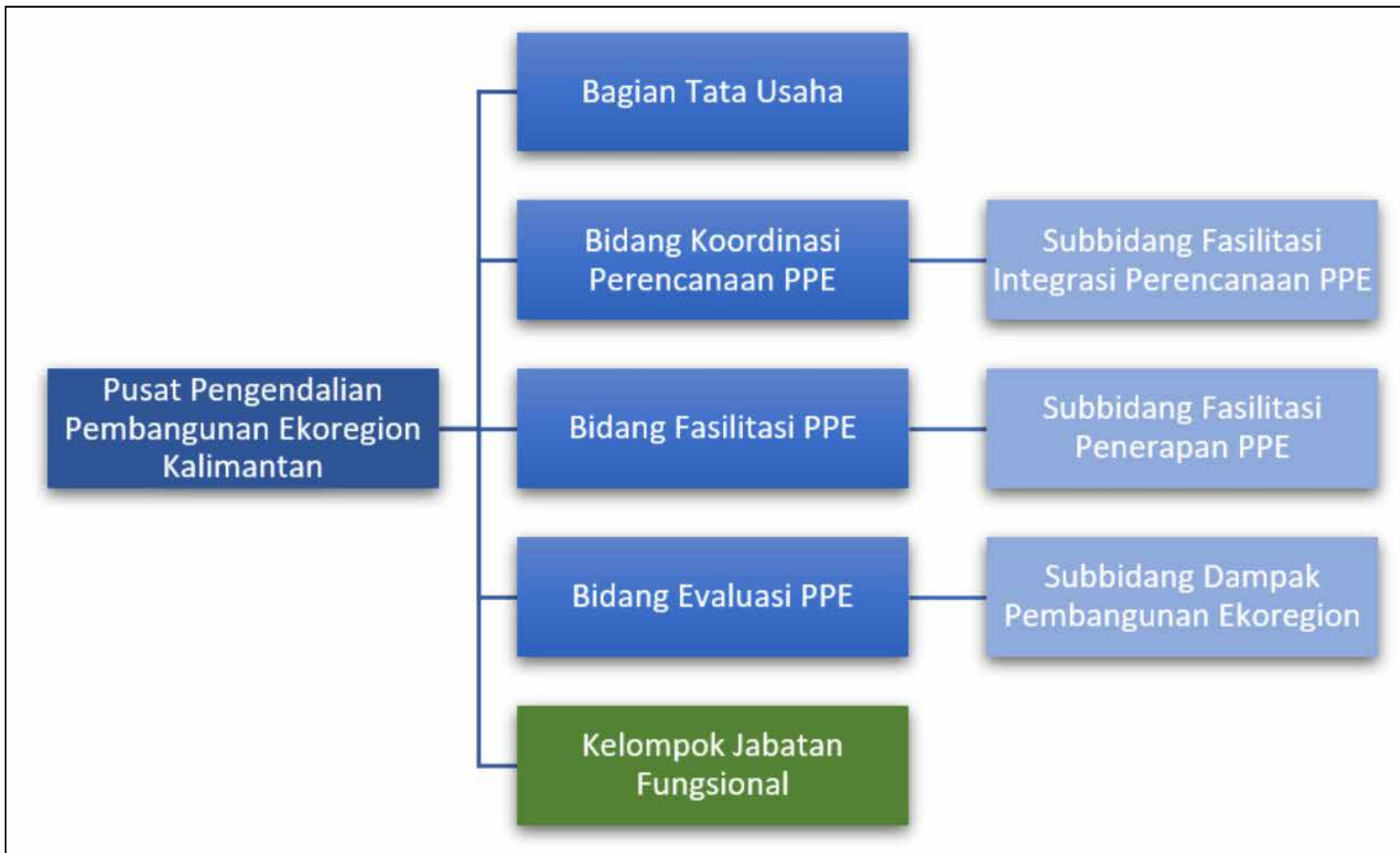
|   |   |
|---|---|
| Melaksanakan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di Wilayah Ekoregion Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan kebijakan teknis Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion</li><li>• Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK ekoregion</li><li>• Koordinasi pelaksanaan program LHK ekoregion</li><li>• Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan B3 ekoregion</li><li>• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion</li><li>• Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat</li></ul> |
|---|---|



Gambar 1. Kedudukan dan Wilayah Kerja P3E Kalimantan

Pengendalian dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta dilakukan dalam bentuk pelayanan terhadap stakeholder di Ekoregion Kalimantan, khususnya pemerintah daerah.

Struktur organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan terdiri atas 4 (empat) bagian/ bidang yaitu: ① Bagian Tata Usaha; ② Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; ③ Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion; ④ Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi di bawah ini:



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Adapun Tugas dan Fungsi dari 4 (empat) bagian/bidang di P3E Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, Kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
  - Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Analisa data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang

intergrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
    - Penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
    - Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
    - Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
    - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian pembangunan ekoregion terdiri atas:

- Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; dan



- Kelompok Jabatan fungsional.
4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemabngunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melakssanakan tugas, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- Perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilyahecoregion;
  - Pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
  - Penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

## C SUMBER DAYA DA SARANA PENDUKUNG

### 1) Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai ASN untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dengan tingkat pendidikan yang bervariasi, meliputi SD, SMP, SMA, D3, sarjana, master, dan doktor. Mayoritas ASN berpendidikan

tinggi dan telah mengikuti berbagai kursus/pelatihan teknis dan atau non teknis, baik di dalam maupun luar negeri. Berikut disajikan grafik sebaran ASN berdasarkan status, Jabatan dan Pendidikan pada P3EK selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

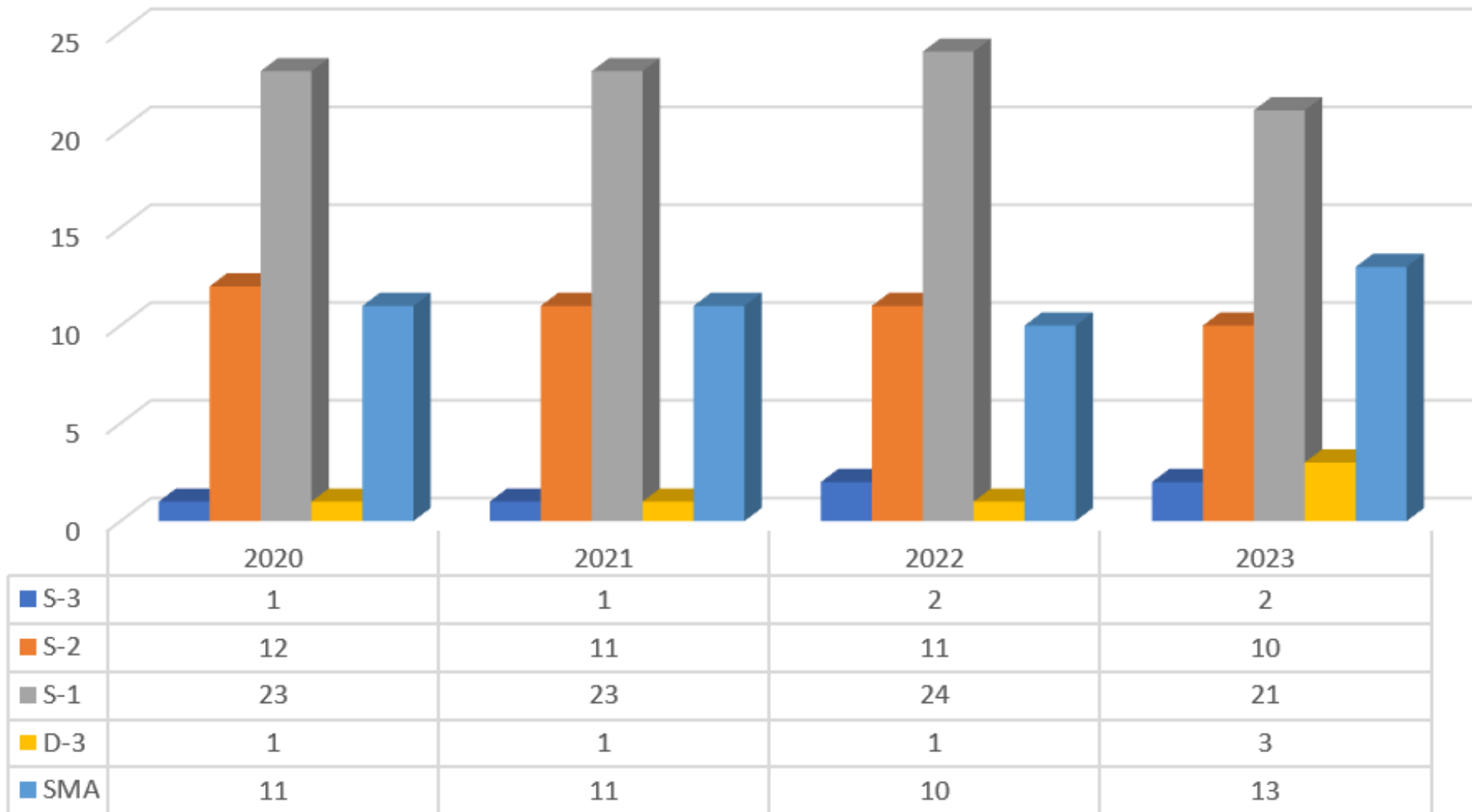


Gambar 3. Sebaran ASN P3E Kalimantan 2020-2023



Gambar 4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan 2020-2023

## SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN 2020-2023



Gambar 5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2020-2023

2) Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan didukung dengan sarana dan prasarana berupa Barang Milik Negara (BMN) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3. Barang Milik Negara (BMN) P3EK 2023

| AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG |  | SATUAN         | SALDO PER 1 JANUARI 2023 |                       | MUTASI       |                    |           |                    | SALDO PER 31 DESEMBER 2023 |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------------|
| KODE                                 | URAIAN   |                | KUANTITAS                | NILAI                 | BERTAMBAH    |                    | BERKURANG |                    |                            |
|                                      |  |                |                          |                       | KUANTITAS    | NILAI              | KUANTITAS | NILAI              |                            |
| 117111                               | Barang Konsumsi  | Unit           | 95                       | 6,949,155             | 1,760        | 55,350,495         |           |                    | 62,299,650                 |
| 117113                               | Bahan untuk Pemeliharaan                                   | Unit           |                          |                       |              |                    |           |                    |                            |
| 131111                               | Tanah  | M <sup>2</sup> | 12,245                   | 61,123,675,080        |              |                    |           |                    | 61,123,675,080             |
| 132111                               | Peralatan dan Mesin  | Unit           | 298                      | 2,795,712,820         | 37           | 202,716,540        |           |                    | 2,998,429,360              |
| 133111                               | Gedung dan Bangunan  | M <sup>2</sup> | 4                        | 2,340,058,000         | 1            | 159,581,000        |           |                    | 2,499,639,000              |
| 134113                               | Jaringan   | Line           | 1                        | 106,747,000           |              |                    |           |                    | 106,747,000                |
| 135111                               | Aset Tetap Renovasi  | Unit           | 10                       | 563,549,811           |              |                    |           |                    | 563,549,811                |
| 166112                               | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | Unit           | 8                        | 261,951,382           |              |                    | 3         | 177,431,000        | 84,520,382                 |
| <b>TOTAL</b>                         |  |                | <b>12,661</b>            | <b>67,198,643,248</b> | <b>1,798</b> | <b>417,648,035</b> | <b>3</b>  | <b>177,431,000</b> | <b>67,438,860,283</b>      |

## D POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan dalam rangka pelaksanaan mandat, tugas dan fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan antara lain dapat diidentifikasi dan diekstraksi dari isu-isu strategis bidang LHK khususnya yang terkait langsung dengan pengelolaan landscape. Isu-isu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. Potensi dan Permasalahan P3E Kalimantan

| No | Layanan  | Inovasi  | Kendala  | Upaya   | Testimoni Stakeholder  | Rencana Perbaikan  |
|----|--|--|--|---|--|--|
| 1  | Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei kepuasan dilakukan melalui e-kuesioner dengan menggunakan sarana google form yang kemudian disebar ke stakeholder terkait, sehingga lebih cepat dan paperless.</li> <li>2. Penyebaran form survei digital melalui metode JAPRI, sehingga langsung mengena kepada subjek kuesioner yang dituju.</li> <li>3. Permohonan penerbitan SK Pengelola Keuangan, perubahan user dan data Ipse dari Satker UPT LHK Wil Kaltim cukup menggunakan softfile pdf, sehingga lebih cepat sampai, lebih cepat untuk ditindaklanjuti dan paperless.</li> <li>4. Membangun pusat data dan analisis Ekoregion (command center Ekoregion)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkadang pimpinan stakeholder asal menyebar e-kuesioner ke pihak/ pengguna yang tidak tepat sasaran, dalam artian adalah pengguna tersebut bukan target layanan dari P3E Kalimantan.</li> <li>2. Terkadang satker UPT LHK Kaltim mengajukan permohonan secara mendadak dan menuntut dokumen sudah jadi pada hari yang sama dengan permohonan tersebut.</li> <li>3. Belum tersedianya data dan informasi ekoregion (command center ekoregion) sebagai dasar kebijakan bagi KLHK untuk pengendalian pembangunan ekoregion.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberitahukan kepada pimpinan stakeholder agar memberikan form e-kuesioner kepada pengguna langsung layanan P3E Kalimantan.</li> <li>2. Menetapkan dan mensosialisasikan SOP Permohonan Dokumen Keputusan terkait.</li> <li>3. Penyusunan konsep pusat data dan informasi ekoregion (ecoregion command center).</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “layanan yang telah berjalan sangat memuaskan dan untuk kedepannya layanan dapat terus di tingkatkan”</li> <li>➤ “Semoga lebih baik depan dengan agenda kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas individu di UPT Kalimantan Timur”</li> <li>➤ “Agar kegiatan pertemuan teknis informasinya lebih awal sehingga memudahkan dalam pengaturan untuk mengikutinya bisa dijadwalkan dan alokasi dana dapat dipersiapkan lebih awal untuk dapat mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh P3E region Kalimantan”</li> <li>➤ “quick respon, akurat, mengayomi/ mengarahkan provinsi/ kabupaten, bantu menganalisis hasil-hasil capaian kinerja dan memberikan rekomendasi (jika perlu menjadi mentor bagi capaian rendah atau ada masalah).”</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi setiap hasil pelaksanaan survei tingkat kepuasan layanan P3E Kalimantan</li> <li>2. Operasionalisasi pusat data dan analisis ekoregion (ecoregion command center) pada 6 P3E se-Indonesia.</li> </ol> |

|   |   |  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|--|---|---|
| 2 | Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan sistem (system thinking) dan spasial serta modelling untuk analisis data terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui AMDAL, KLHS, RPDAS, DIKPLHD, RPPLH, RIP KEHATI, RPPEG dsb</li> <li>2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (didukung oleh pihak akademisi yang menguasai analisis terintegrasi) serta penyediaan data dan informasi yang kuat dan termutakhir.</li> <li>3. Penajaman Target Komponen Rincian Output 2024 (Lokus, Isu, Prioritas) dengan menggunakan pendekatan backward looking (Rancang mundur) dengan tiga langkah utama: mengidentifikasi hasil yang diinginkan, mengumpulkan bukti pembelajaran koordinasi, mobilisasi dan orkestrasi sumberdaya dari berbagai pihak terkait pada Bidang Koordinasi PPE dan kemudian merancang kegiatan yang diperlukan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hingga akhir periode Renstra 2020 – 2024, belum semua Propinsi/Kabupaten/ Kota di Kalimantan (5 Propinsi, 56 kab/kota) terlayani sesuai tusi P3E Kalimantan.</li> <li>2. Mutasi pegawai yang cukup cepat di daerah, akibatnya pegawai yang telah dibina/ difasilitasi dan memahami perencanaan bidang LHK dipindah ke OPD non LHK.</li> <li>3. Pengurangan anggaran P3E Kalimantan dan Bidang Koordinasi Perencanaan pada khususnya melalui Automatic Adjustment dan Persiapan Pemilu 2024.</li> <li>4. Dalam implementasinya, proses mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai macam perencanaan membutuhkan pendekatan sistem (system thinking) dan spasial serta logic model untuk analisis data terkait perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui DDDTLH, KLHS dsb.</li> <li>5. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah terkait perencanaan dan perijinan bidang LHK.</li> <li>6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (didukung oleh pihak akademisi yang menguasai analisis terintegrasi) serta penyediaan data dan informasi yang kuat dan termutakhir</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisasi status penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di Ekoregion Kalimantan dan menemukan kendala penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tersebut.</li> <li>2. Mendorong diadakannya peningkatan kapasitas SDM bidang perencanaan LHK bekerjasama dengan stakeholder lain.</li> <li>3. Optimalisasi dan rasionalisasi anggaran serta kerjasama kegiatan dengan stakeholder terkait.</li> <li>4. Kerkonsultasi dengan pakar/akademisi dan stakeholder terkait.</li> <li>5. Memberikan saran, pernyataan, dan tanggapan yang komprehensif sesuai dengan peratruan perundangan bidang LHK dalam pembahasan perizinan bidang LHK.</li> <li>6. Memperbaharui data, peta, dan peraturan perundangan informasi/peta dari wali data/informasi KLHK.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ “Perlu dilakukan audiensi terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan bidang LHK dengan para pjabat publik seperti: kapala daerah/ DPRD”.</li> <li>➢ “Perlu memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM bekerjasama dengan Pemda/Akademisi”</li> <li>➢ “Perlu dilakukan rapat kerja teknis bidang perencanaan LHK”</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyesuaian secara periodik Revisi perjanjian Kinerja (Awal &gt; Akhir).</li> <li>2. Perlu ada komitmen/ kesepakatan dengan daerah terkait kebutuhan daerah dalam hal integrasi perencanaan agar fasilitasi integrasi tersebut bisa dimanfaatkan/ berguna untuk daerah dalam hal pengendalian pembangunan.</li> <li>3. Perlunya dibangun Norma Standar Kriteria Prosedur/ NSPK terkait fasilitasi integrasi perencanaan untuk menjadi panduan</li> <li>4. Perlu ada penambahan alokasi anggaran yang cukup untuk P3E Kalimantan. Dimana jumlah Daerah layanan ada 56 kabupaten/kota dan 5 provinsi, tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas.</li> <li>5. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah terkait perencanaan dan perijinan bidang LHK</li> </ol> |
|---|---|--|---|--|---|---|

|   |  |   |  |  |  |   |
|---|--|---|--|--|--|---|
| 3 | Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion | Fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran DAS Mahakam<br>Pemerintah daerah melakukan upaya-upaya nyata dan terukur pada level tapak kegiatan pengendalian pencemaran air dalam rangka meningkatkan nilai indeks kualitas air Prov/ Kab/Kota secara kolaboratif dan terintegrasi. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kecilnya ketersediaan anggaran di pemda untuk melakukan kegiatan pengendalian pencemaran air.</li> <li>2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di institusi Dinas LH Prov/Kab/ Kota dalam pengendalian pencemaran air.</li> <li>3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan pengendalian pencemaran air.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Pembentukan tim.</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi kepada 5 DLH Provinsi dan 56 Dinas LH Kab/Kota.</li> <li>4. Pembuatan prototipe Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga dengan Metode Sederhana.</li> <li>5. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air.</li> <li>6. Pembuatan laporan.</li> </ol> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi keterlibatan multipihak untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam membantu upaya pemda melaksanakan pengendalian pencemaran air.</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Dinas LH dan masyarakat/ pelakuusaha/ kegiatan dalam melakukan pengendalian pencemaran air dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan Badan Pelatihan LHK Samarinda, bimbingan teknis dan sosialisasi</li> </ol> |
|---|--|---|--|--|--|---|

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  | <p>Rapat kerja teknis pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya nilai rata-rata IKLH Prov/Kab/Kota di Ekoregion Kalimantan dari 74,99(tahun 2021), 75,12 (tahun 2022) dan 75,73 (tahun 2023).</li> <li>2. Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah kepada 1.600 masyarakat sebagai peserta yang terlibat dan hadir pada penyelenggaraan workshop pengelolaan sampah dan HPSN Ekoregion Kalimantan.</li> <li>3. Penyediaan anggaran dan peran masing-masing pemda dan pihak dalam rangka penarikan alat kesehatan mengandung merkuri di Ekoregion Kalimantan.</li> </ol> | <p>Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti laptop dan jaringan internet</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)</li> <li>➤ Pembentukan tim</li> <li>➤ Pelaksanaan koordinasi.</li> <li>➤ Penyelenggaraan rapat kerja teknis dan workshop.</li> <li>➤ Pelaporan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ “Untuk kegiatan IKLH terutama di kab. Kubu Raya sebaiknya pihak P3E kalimantan agar meyorati bupati utk mengngarkan dan utk kegiatan IKLH agar IKLH KAB. KUBU RAYA Tidak kosong... kami mewakili dinas DLH KKR sangat beerterima kasih banyak kepada bpk atau ibu P3E kalimantan telah di bantu untuk data IKA Kab. Kubu Raya thn 2022”</li> </ul> | <p>Melaksanakan pengadaan laptop dan jaringan internet mobile dengan spesifikasi memadai untuk bisa digunakan pada penyelenggaraan – penyelenggaraan kegiatan di P3E Kalimantan.</p>   |
|  | <p>Fasilitasi pengendalian mutu air sungai dan air laut di Teluk Balikpapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dari 6 Dinas LH Prov/Kab/Kota pendamping IKN dan OIKN.</li> <li>2. Kualitas air Sungai Sepaku bisa tetap terjaga dan ditingkatkan.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya regulasi secara resmi petunjuk teknis penghitungan baku mutu kualitas air sungai.</li> <li>2. Terbatasnya ketersediaan data pemantauan kualitas air sungai di wilayah IKN</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Pembentukan tim.</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi.</li> <li>4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penghitungan baku mutu kualitas air sungai</li> <li>5. Pelaksanaan penghitungan baku mutu kualitas air Sungai Sepaku, Wilayah IKN.</li> <li>6. Pembuatan laporan.</li> </ol> |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkontribusi dan berperan aktif dalam penyusunan petunjuk teknis penghitungan baku mutu kualitas air sungai oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan OIKN, Dinas LH Prov. Kaltim dan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam rangka penambahan titik pantau kualitas air sungai di wilayah IKN</li> </ol> |

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  |  | <p>Fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ekoregion DAS Mahakam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata kelola bank sampah menjadi lebih mudah sehingga jumlah sampah terkelola semakin besar</li> <li>2. Keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin lebih banyak dan lebih peduli</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan jaringan internet di lokasi bank sampah.</li> <li>2. Keterbatasan sarana pemilahan sampah di masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Pembentukan tim.</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi.</li> <li>4. Sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.</li> <li>5. Penyediaan sistem digitalisasi Bank Sampah.</li> <li>6. Bimbingan teknis penggunaan sistem digitalisasi kepada pengurus Bank Sampah.</li> <li>7. Pembuatan laporan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan penataan kelola sampah di bank sampah menjadi lebih baik, aman, mudah sehingga pengurus memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap bank sampah unit dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi nasabah bank sampah dengan slogan yang dibuat : "mengelola sampah di bank sampah menjadi lebih mudah dan menguntungkan".</li> <li>2. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas LH dengan adanya sistem digitalisasi data pengelolaan sampah untuk pelaporan ke KLHK yang dilakukan oleh bank sampah menjadi lebih mudah diperoleh dan update karena terintegrasi menjadi satu dalam server pusat data.</li> <li>3. Beberapa kab./Kota yang belum difasilitasi oleh P3E Kalimantan tertarik dengan penggunaan sistem digital bank sampah untuk diimplementasikan di Kab./kota masing-masing dan berencana untuk menganggarkan sendiri pembiayaannya di APBD.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memodifikasi sistem untuk bisa tetap dioperasikan jika jaringan internet terganggu.</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Sampah, Dinas LH Kab/ Kota dan pelaku usaha/kegiatan untuk berkenan berkontribusi dalam hal penyediaan sarana pemilahan sampah untuk masyarakat.</li> </ol> |
|--|--|---|---|--|--|--|





|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
|  | <p>Fasilitasi pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion DAS Barito</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kemampuan DLH Prov./Kab./Kota didalam melaksanakan identifikasi dan deliniasi lahan terkontaminasi LB3 (Mercury) pada lahan bekas penambangan emas rakyat.</li> <li>2. Peningkatan kemampuan DLH Prov./Kab./Kota didalam melaksanakan pemulihan lahan terkontaminasi LB3 (Mercury) pada lahan bekas penambangan emas rakyat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak tersedianya alat deteksi mercury pada lahan bekas penambangan emas rakyat di Dinas LH Prov./Kab./Kota.</li> <li>2. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Dinas LH Prov./Kab./Kota dalam melakukan analisis spasial.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Pembentukan tim.</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi.</li> <li>4. Penyelenggaraan bimbingan teknis deliniasi dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (mercury) pada lahan bekas penambangan emas rakyat.</li> <li>5. Pembuatan laporan.</li> </ol>  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan Direktorat PKTDLB3 dan DLH Provinsi untuk penyediaan alat deteksi mercury di masing-masing provinsi.</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Balai Pelatihan LHK Samarinda untuk penyelenggaraan pelatihan analisis spasial bagi Dinas LH Prov./Kab./Kota.</li> </ol> |
|  | <p>Fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan wilayah ekoregion DAS Kapuas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan nilai indeks kualitas lahan Kota Pontianak sekitar 10 point di tahun 2023 (nilai IKL tahun 2022 : 27,64 dan tahun 2023 : 37,75).</li> <li>2. Peningkatan nilai rata-rata indeks kualitas lahan Prov./Kab./Kota tahun 2023 di Kalimantan Barat (nilai IKL tahun 2022 : 59,05 dan tahun 2023 : 60,62).</li> </ol>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia Dinas LH Prov./Kab./Kota dalam melakukan analisis spasial tutupan lahan.</li> <li>2. Keterbatasan pemahaman tentang identifikasi potensi tutupan lahan Kab./Kota.</li> </ol>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>2. Pembentukan tim.</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi.</li> <li>4. Penyelenggaraan pendampingan kepada Dinas LH Kota Pontianak.</li> <li>5. Penyelenggaraan bimbingan teknis upaya peningkatan indeks kualitas lahan (IKL) bagi Dinas LH Prov./Kab./Kota di Ekoregion Kalimantan.</li> <li>6. Pembuatan laporan.</li> </ol> | <p>Dengan penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan identifikasi potensi tutupan lahan Kab./Kota, lebih mendekatkan kondisi nilai IKL Kab./Kota sesuai dengan kondisi tapak yang sebenarnya.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Balai Pelatihan LHK Samarinda untuk penyelenggaraan pelatihan analisis spasial bagi Dinas LH Prov./Kab./Kota.</li> <li>2. Menyelenggarakan bimbingan teknis identifikasi potensi tutupan lahan Kab./Kota pada daerah yang nilai IKL-nya rendah.</li> </ol>            |





|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| 4 | Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion | <p>Evaluasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada DAS Mahakam dan DAS Barito dalam rangka peningkatan IKLH</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Direktorat Jenderal PPKL KLHK, DLH Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta DLH Kabupaten/Kota di lingkup wilayah DAS Barito dan DAS Mahakam.</li> <li>2. Melakukan survey/ pemantauan lapangan/ pemantauan titik tercemar sedang dan berat di wilayah DAS barito dan DAS Mahakam.</li> <li>3. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lingkup DAS Mahakam dan DAS Barito untuk merumuskan analisa Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) serta Penyusunan Rekomendasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Air untuk DAS Mahakam dan DAS barito</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan waktu dan anggaran sehingga untuk pelaksanaan DPSIR dan Penyusunan Rekomendasi DAS Mahakam belum dilakukan secara optimal.</li> <li>2. Keterbatasan kemampuan SDM dalam membuat peta catchment area titik pantau kualitas air.</li> <li>3. Keterbatasan jumlah SDM.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerja sama dengan Laboratorium DAS Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam menyusun peta catchment area titik pantau kualitas air.</li> <li>2. Melaksanakan Rapat Diskusi melalui fasilitas Zoom Meeting dengan Pakar DAS Fakultas Kehutanan Unhas dalam penyusunan Peta Catchment Area DAS Barito dan DAS Mahakam.</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan FGD Analisa DPSIR secara berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan Pertikawan Regional Kalimantan untuk penghematan anggaran.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengagendakan peningkatan kapasitas SDM dalam pembuatan peta catchment area.</li> <li>2. Pengadaan laptop/ PC yang mendukung pembuatan peta catchment area.</li> </ol> |
|---|---|---|---|---|--|

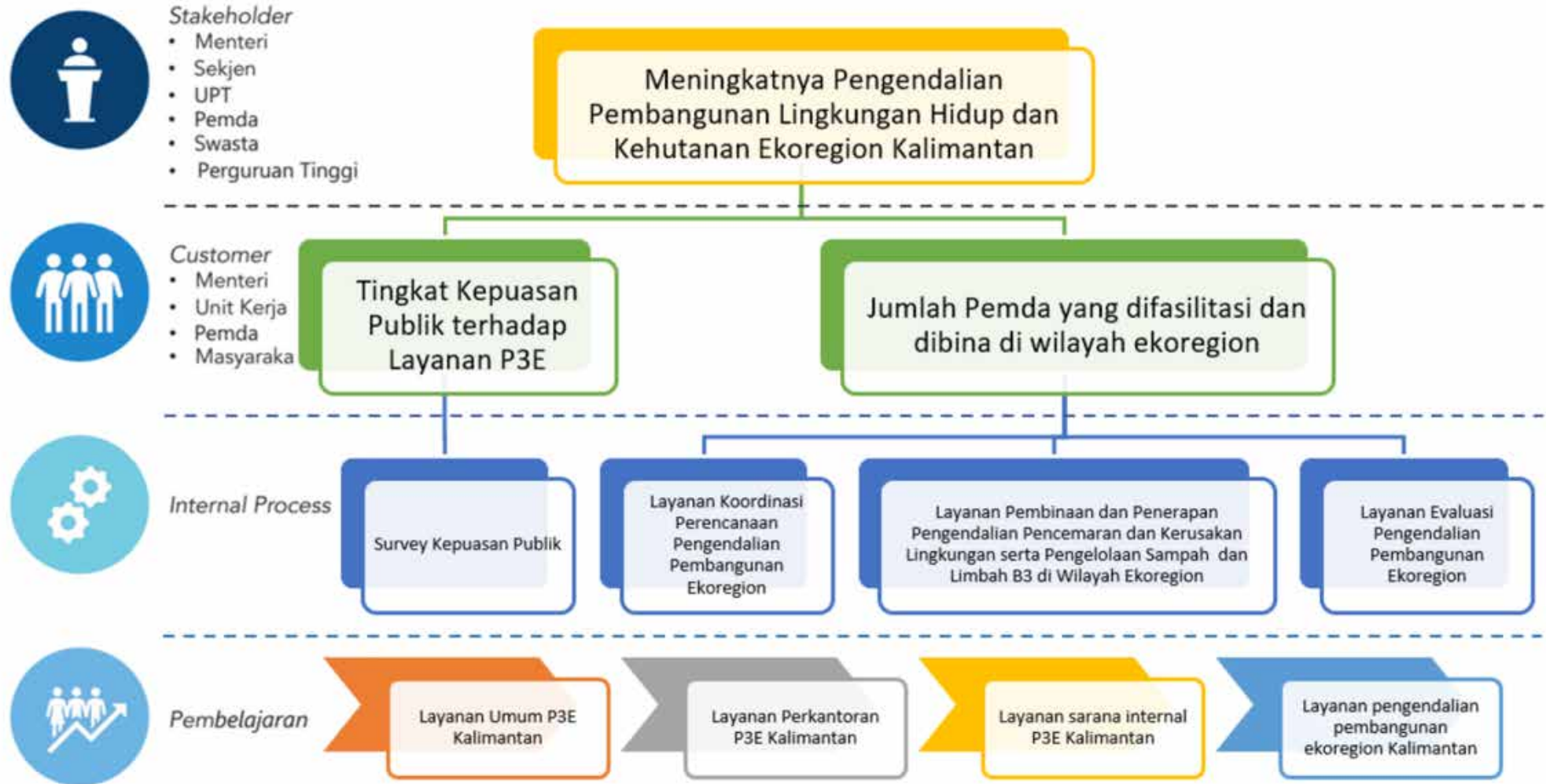


|  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  | <p>Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah dalam rangka peningkatan IKPS dan mendorong sirkular ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendapat data dan informasi pengelolaan sampah dan IKPS.</li> <li>2. Melakukan survey dan pengumpulan data pengelolaan sampah melalui dokumen DIKPLHD dan survey kuisisioner yang dikirimkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pengelola bank sampah lingkup Kalimantan Timur.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pengelolaan Sampah dan Sirkular Ekonomi masih dilakukan secara sederhana dikarenakan belum adanya standar baku pedoman untuk melakukan evaluasi pengelolaan sampah ataupun perhitungan sirkular ekonomi.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran, sehingga belum bisa dilakukan survey lapangan untuk memvalidasi data.</li> <li>3. Keterbatasan jumlah SDM.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan data pengelolaan sampah secara online (melalui website SIPSN dan dokumen DIKPLHD yang disampaikan melalui surat kepada pemerintah daerah, serta survey kuisisioner secara digital yang disampaikan ke beberapa pengelola bank sampah di wilayah Kalimantan Timur.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan koordinasi kegiatan dengan DLH Provinsi Kalimantan Timur untuk tema Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DAS Mahakam dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah dalam rangka peningkatan IKPS dan mendorong sirkular ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur secara bersamaan.</li> </ol> |  | <p>Mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi data pengelolaan sampah pada Aplikasi SIPSN</p> |
|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Evaluasi Dampak Pembangunan wilayah IKN terhadap kualitas lingkungan di DAS Riko Manggar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penyusunan Peta Catchment Area sebagai dasar penentuan titik sampling kualitas air di wilayah IKN bekerja sama dengan Pakar DAS Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin.</li> <li>2. Melakukan survey lapangan atas Peta Catchment Area wilayah IKN yang telah disusun.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya akses data dan informasi terkait perencanaan dan implementasi yang berjalan di wilayah IKN.</li> <li>2. Belum adanya standar pedoman untuk pelaksanaan evaluasi dampak Pembangunan.</li> <li>3. Keterbatasan kemampuan SDM dalam membuat peta catchment area titik pantau kualitas air.</li> <li>4. Keterbatasan anggaran dan jumlah SDM.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerja sama dengan Laboratorium DAS Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam menyusun peta catchment area titik pantau kualitas air.</li> <li>2. Melaksanakan Rapat Diskusi melalui fasilitas Zoom Meeting dengan Pakar DAS Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin dalam penyusunan Peta Catchment Area wilayah IKN.</li> <li>3. Bekerja sama dengan Direktorat PPA dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air di wilayah IKN, dimana hasil titik pantau berdasarkan rekomendasi Peta Catchment Area dilakukan pemantauan/ sampling kualitas air oleh Direktorat PPA.</li> </ol> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengagendakan peningkatan kapasitas SDM dalam pembuatan peta catchment area.</li> <li>2. Pengadaan laptop/ PC yang mendukung pembuatan peta catchment area.</li> </ol> |
|--|--|--|--|---|--|--|

Mempertimbangkan berbagai isu penting dan strategis tersebut di atas, pengendalian pembangunan LHK di level ekoregion tertuang dalam Peta Strategi sebagai berikut :

## Peta Strategi P3E Kalimantan



Gambar 6. Peta Strategi Pencapaian Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

**PERENCANAAN  
KINERJA**

**BAB  
III**



## A RENCANA STRATEGIS

Visi Kementerian LHK: “Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.

Sementara Misi Kementerian LHK:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki – laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2020 - 2024 adalah:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan; dan
4. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut serta memperhatikan keterkaitan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020 - 2024, maka Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Tujuan 1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon; dan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan.

Sasaran Strategis Tujuan 2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup:

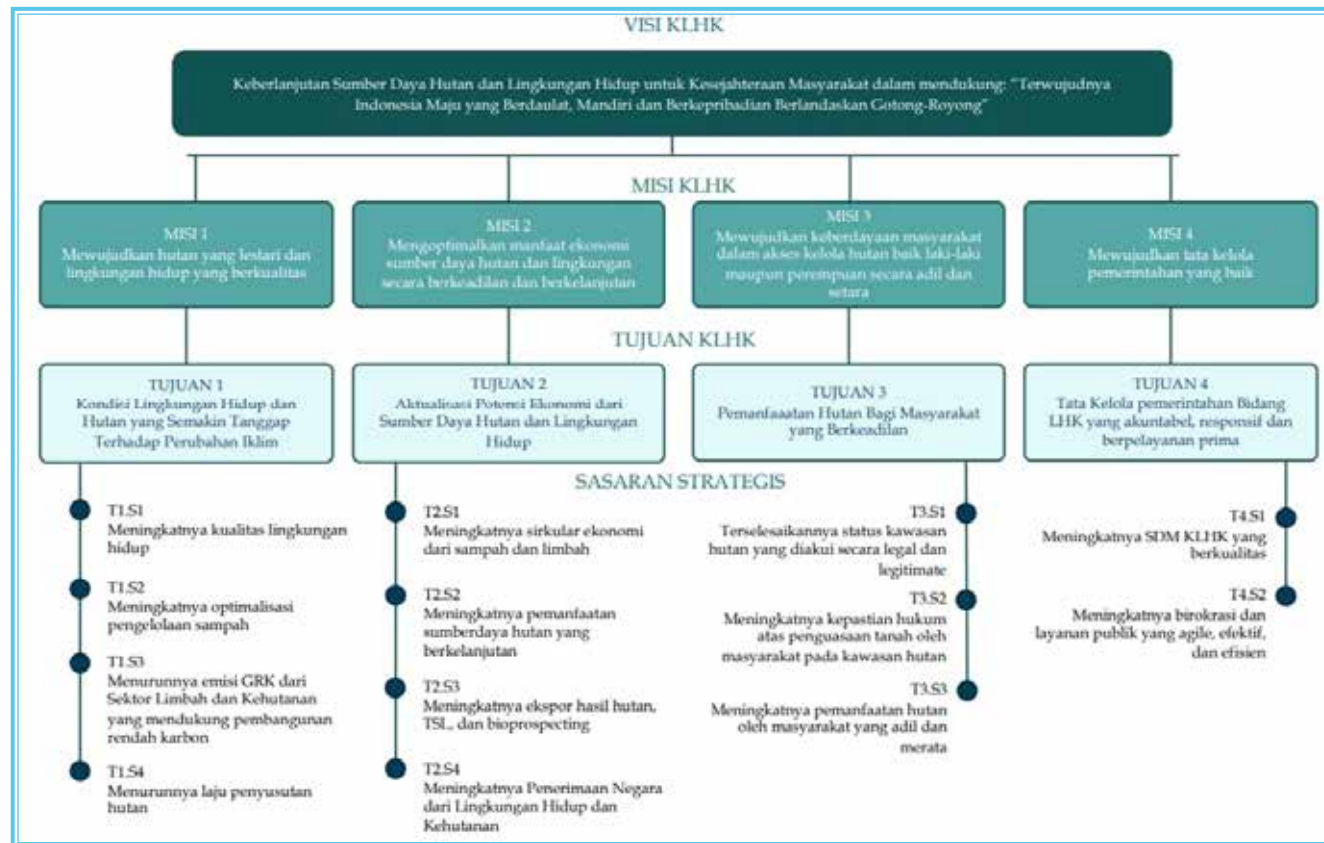
1. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
2. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting; dan
4. Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran Strategis Tujuan 3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan:

1. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate;
2. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan; dan
3. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata.

Sasaran Strategis Tujuan 4. Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima:

1. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas; dan
2. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik agile, efektif, dan efisien.



Gambar 7. Visi Misi dan Sasaran Strategis KLHK



## B VISI, MISI, TUJUAN, PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRA SETJEN DAN P3E KALIMANTAN

Mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2020 - 2024, ditetapkan Visi Sekretariat Jenderal KLHK : Terwujudnya pelayanan yang berkualitas dan dukungan manajemen KLHK yang professional guna menjamin Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”.

Sekretariat Jenderal KLHK mendukung keseluruhan misi KLHK khususnya secara langsung atas misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui 3 misi Setjend KLHK yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, ditetapkan tujuan yaitu:

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal
2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya

Pada periode 2020 - 2024 Sekretariat Jenderal KLHK melaksanakan program Dukungan Manajemen yang dilimpahkan pada unit - unit kerja dibawahnya. Dalam menjalankan program dukungan manajemen, ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Program Sekretariat Jenderal KLHK sebagai berikut :

Sasaran Tujuan I. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel
4. Meningkatnya persepsi positif dan dukungan public terhadap Kementerian LHK
5. Meningkatnya pengelolaan legislasi dan litigasi bidang LHK
6. Peningkatan kerjasama luar negeri bidang LHK

Sasaran Tujuan II. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK

Berikut adalah tujuan, sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024 yang uraikan dalam tabel.

Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal tahun 2020 – 2024

| TUJUAN 4:<br>Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima |   |   |        |      |      |      |      |  |   |        |      |      |      |      |
|---|---|---|--------|------|------|------|------|--|---|--------|------|------|------|------|
| PROGRAM   | SASARAN PROGRAM   | IKP   | Target |      |      |      |      | TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT JENDERAL  | IK UKE.1                                    | Target |      |      |      |      |
|   |   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dukungan Manajemen  | T4.S2<br>Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | T4.S2.1<br>Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (poin) | 77     | 79   | 81   | 83   | 85   | <b>1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal</b>                                      |   |        |      |      |      |      |
|   |   |   |        |      |      |      |      | T4.S2.1.1<br>Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK   | Nilai SAKIP KLHK (poin)                     | 72     | 74   | 76   | 78   | 80   |
|   |   |   |        |      |      |      |      | T4.S2.1.2<br>Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)                         | Nilai Sistem Merit (poin)                   | 265    | 290  | 315  | 340  | 365  |
|   |   |   |        |      |      |      |      | T4.S2.1.3<br>Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel | Opini WTP (poin)                            | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|   |   |   |        |      |      |      |      |  | Survei Kepuasan Publik (poin)               | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    |
|   |   |   |        |      |      |      |      | T4.S2.1.4<br>Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK            | Nilai KIP KLHK (poin)                       | 80     | 82   | 84   | 86   | 88   |
|   |   |   |        |      |      |      |      | T4.S2.1.5<br>Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK                            | Nilai Penataan Peraturan Perundangan (poin) | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    |

|   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|------|-----|------|-----|
|   |  |  |  |  |  |  |  | T4.S2.1.6<br>Peningkatan<br>Kerjasama Luar<br>Negeri bidang LHK                               | Jumlah<br>Dokumen<br>Kerjasama<br>(dokumen) | 30  | 30   | 30  | 30   | 30  |
| <b>2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.</b> |  |  |  |  |  |  |  |   |   |     |      |     |      |     |
|   |  |  |  |  |  |  |  | T4.S2.1.7<br>Meningkatnya<br>Pelayanan data,<br>sistem informasi, dan<br>kebijakan Bidang LHK | Indeks<br>SPBE<br>(poin)                    | 3,5 | 3,55 | 3,6 | 3,65 | 3,7 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   | Indeks<br>Kualitas<br>Kebijakan<br>(poin)   | 70  | 72,5 | 75  | 77,5 | 80  |

**Keterangan singkatan:**  
 \*\* SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; WTP : Wajar Tanpa Pengecualian; KIP : Keterbukaan Informasi Publik; SPBE : Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) melaksanakan kegiatan ke-11 dari Program Dukungan Manajemen, yaitu Pengendalian Pembangunan LHK Pada Wilayah Ekoregion. Setiap P3E kerja secara sistematis memberi sumbangan kepada sasaran program Kementerian, dalam hal ini P3EK mendukung pencapaian capaian sastra KLHK berupa Program dukungan manajemen dan kualitas lingkungan hidup (IKLH, IKPS dan Sirkular ekonomi sampah/limbah).

Tabel 6. Keterkaitan Program Sasaran dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I

| Program                   | Sasaran Program   | Indikator Kinerja Program   | UKE I  |
|---------------------------|---|---|--|
| Kualitas Lingkungan Hidup | T1.S1<br>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup               | T1.S1.1<br>Indeks kualitas lingkungan hidup   | PPKL, PSLB3, PKTL, BSI LHK, PHLHK, KSDAE, PDASRH, BRGM |
|                           | T1.S2<br>Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah         | T1.S2.1<br>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah  | PSLB3  |
|                           | T2.S1<br>Meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah | T2.S1.1<br>Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) | PPKL, PSLB3, BSI LHK                                   |

|                    |   |  |               |
|--------------------|---|--|---------------|
| Dukungan Manajemen | T4.S2<br>Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | T4.S2.1<br>Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi | SETJEN, ITJEN |
|--------------------|---|--|---------------|

Tabel 7. Kegiatan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024 Setelah Restrukturisasi Program

| Uraian                     | Program/Sasaran Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja   | Target |      |      |      |      | Satuan | Unit Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|--|--------|------|------|------|------|--------|---------------------------|
|                            |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |        |                           |
| 1                          | 2  | 3      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8      | 9                         |
| <b>Kegiatan 11</b>         | <b>Pengendalian Pembangunan LHK pada wilayah ecoregion (5374)</b>  |        |      |      |      |      |        |                           |
| <b>Sasaran Kegiatan 3</b>  | <b>Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan (T4.S2.1.7.2.5)</b> |        |      |      |      |      |        |                           |
| Indikator Kinerja Kegiatan | 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E (T4.S2.1.7.2.5.1)  | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    | Poin   | P3E Kalimantan            |
|                            | 2. Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion (T4.S2.1.7.2.5.2)                              | 5      | 5    | 5    | 5    | 5    | Pemda  | P3E Kalimantan            |

## C PERJANJIAN KERJA

Target yang ingin dicapai dalam tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Setjen KLHK selaku pemberi mandat dan P3EK selaku pelaksana mandat. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Guna mengendalikan konsistensi perencanaan dan terkawalnya upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Setjen KLHK juga telah menetapkan tahapan-tahapan pencapaian dari masing-masing Indikator Kinerja atau dalam perencanaan penganggaran berbasis kinerja disebut

dengan output dan komponen.

Secara umum, kriteria output mencerminkan sasaran kinerja satuan kerja, merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan satuan kerja penanggungjawab kegiatan, bersifat spesifik dan terukur. Setiap kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis output, dan setiap output didukung dengan komponen masukan dalam implementasinya. Komponen merupakan tahapan dari proses pencapaian output, yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dan dapat secara langsung mendukung pencapaian output. Komponen disusun karena kebutuhan dan relevansinya terhadap pencapaian output yang terdiri dari komponen utama dan komponen pendukung.

Sejalan dengan Rumusan nomenklatur output dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dibedakan menjadi 2, yaitu Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kumpulan atas keluaran (output) (Rincian Output–RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/ serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
2. Rincian Output (RO), merupakan keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh KPA yang berfokus pada karakteristik masing-masing Belanja Anggaran serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan antar setiap komponen dapat merupakan prasyarat untuk komponen lainnya atau hanya berupa bagian terpisah yang bersama-sama dengan komponen lainnya menghasilkan sebuah output. KRO dan RO merupakan rangkaian penjabaran dari mandat, tugas dan fungsi P3E Kalimantan. Perjanjian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 untuk Program Dukungan Manajemen yang ditandatangani oleh Kepala P3E Kalimantan dan Setjen KLHK dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 8. Kegiatan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja P3E Kalimantan 2023

| Kegiatan  | Sasaran  | Indikator Kinerja  | Target  |
|---|--|--|---------|
| 1. 5374-<br>Pengendalian<br>Pembangunan<br>LHK Regional | 1. Meningkatnya<br>Pengendalian<br>Pembangunan<br>Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan di Ekoregion<br>Kalimantan | 1. Tingkat Kepuasan Publik<br>terhadap Layanan P3E                 | 4 poin  |
|   |  | 2. Jumlah Pemda Difasilitasi<br>dan Dibina di Wilayah<br>Ekoregion | 5 pemda |

Target yang ingin dicapai dalam tahun berjalan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Setjen KLHK selaku pemberi mandat dan P3EK selaku pelaksana mandat. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Guna mengendalikan konsistensi perencanaan dan terkawalnya upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Setjen KLHK juga telah menetapkan tahapan-tahapan pencapaian dari masing-masing Indikator Kinerja atau dalam perencanaan penganggaran berbasis kinerja disebut dengan output dan komponen. Secara umum, kriteria output mencerminkan sasaran kinerja satuan kerja, merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan satuan kerja penanggungjawab kegiatan, bersifat spesifik dan terukur. Setiap kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu jenis output, dan setiap output didukung.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, P3E Kalimantan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan di dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Kegiatan, KRO/RO, dan Pagu P3E Kalimantan 2023

| Kode | Kegiatan                              | KRO   | RO   | Pagu Awal     | Pagu Akhir    |
|------|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
| 5374 | Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 5374.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal        | 5374.EBA.962 Layanan Umum  | 1.800.838.000 | 1.586.275.000 |
|      |                                       |   | 5374.EBA.994 Layanan Perkantoran                                   | 9.350.802.000 | 9.245.809.000 |
|      |                                       | 5374.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal      | 5374.EBB.951 Layanan Sarana Internal                               | 200.000.000   | 200.000.000   |
|      |                                       | 5374.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 5374.FBA.003 Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | 2.910.000.000 | 2.565.000.000 |

## Pembiayaan Program P3EK

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 029.01.2.400574/2023 tanggal 30 November 2022, Satuan Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, pembiayaan program dukungan manajemen Setjen oleh P3E Kalimantan sebesar Rp 14.261.640.000,- dan secara keseluruhan berasal dari Rupiah Murni (RM). Dalam pelaksanaannya terdapat revisi daftar isian pelaksanaan anggaran menjadi Rp 13.597.084.000,-. Berikut tabel daftar revisi DIPA P3EK sepanjang 2023:

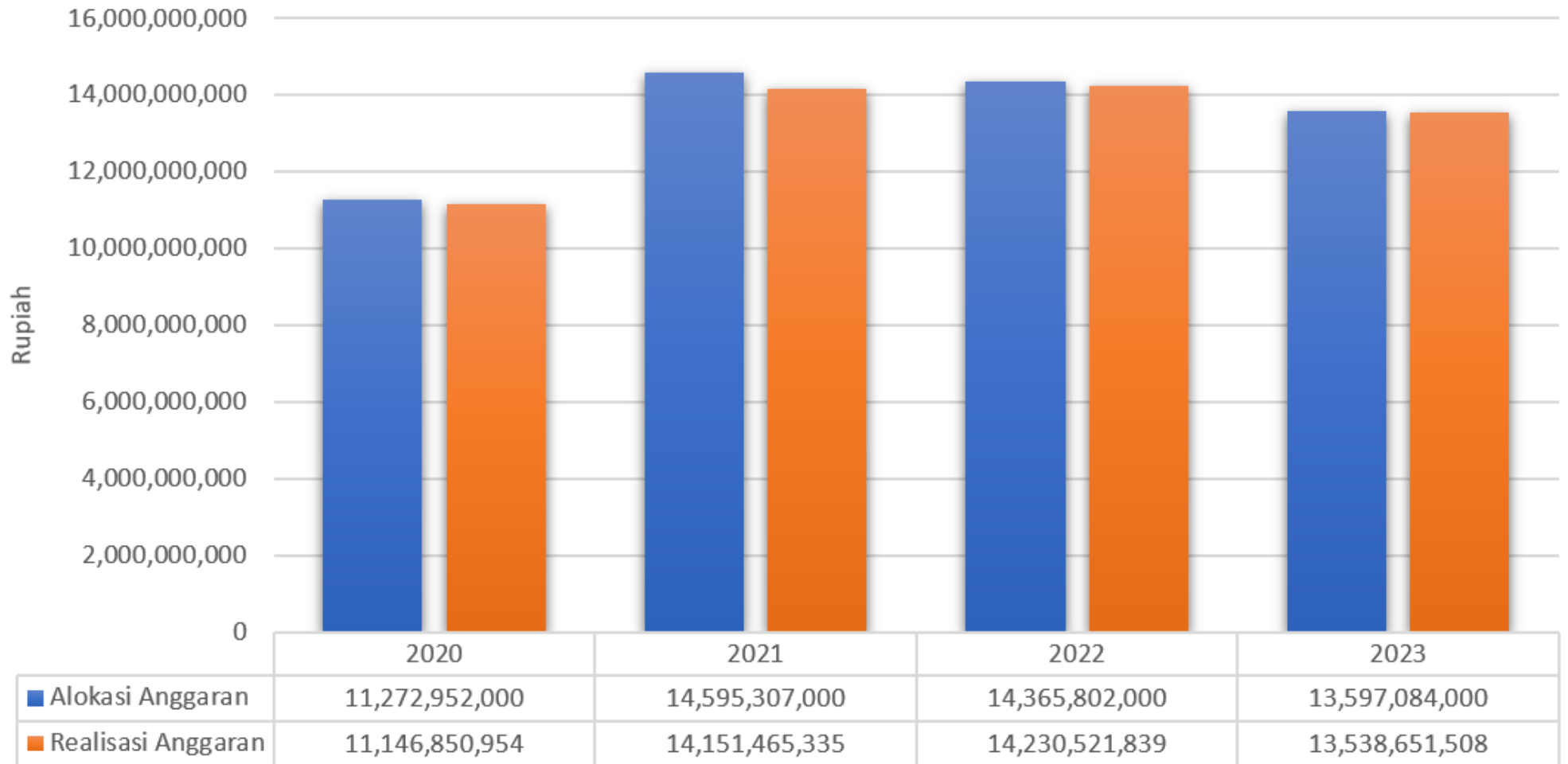
Tabel 10. Daftar Revisi DIPA P3EK 2022

\*dalam ribu

| No | Revisi Ke | Pagu       | Keterangan  |
|----|-----------|------------|---|
| 1  | I         | 14.261.460 | Automatic Adjustment  |
| 2  | II        | 14.261.460 | Revisi Pergeseran Anggaran Antar RO, Ralat RPD Hal III DIPA dan Pemutakhiran POK TW I   |
| 3  | III       | 14.261.460 | Revisi Ralat RPD Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK TW II  |
| 4  | IV        | 14.261.460 | Revisi Ralat RPD Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK TW III   |
| 5  | V         | 14.156.647 | Revisi Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment dan Rencana Relaksasi Belanja Setjen TA 2023 |
| 6  | VI        | 14.156.647 | Revisi Ralat RPD Halaman III DIPA dan Pemutakhiran POK TW IV  |
| 7  | VII       | 13.597.084 | Revisi Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment lingkup Sekretariat Jenderal TA 2023              |
| 8  | VIII      | 13.597.084 | Revisi Pergeseran Anggaran Antar RO, Revisi Ralat RPD Halaman III DIPA, dan Pemutakhiran POK                                  |
| 9  | IX        | 13.597.084 | Revisi Pemutakhiran POK   |

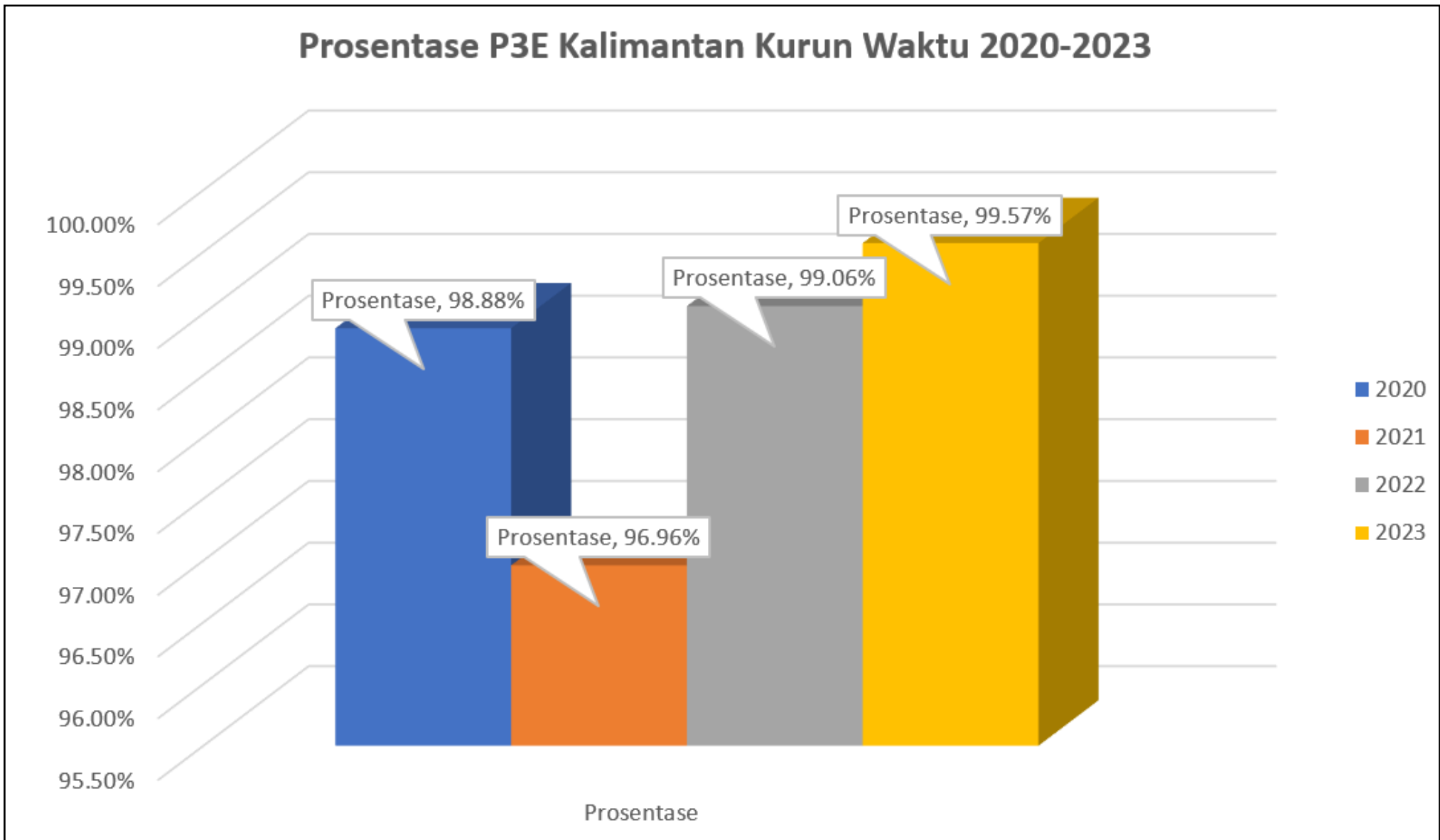
Anggaran P3EK bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terjadi penurunan pagu anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya perkembangan pagu anggaran selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2020-2024) tersaji pada gambar di bawah ini.

## Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi P3E Kalimantan Kurun Waktu 2020-2023



Gambar 8. Perkembangan Pagu Anggaran dan Realisasi P3E Kalimantan Kurun Waktu 2020-2023





Gambar 9. Prosentase P3E Kalimantan Kurun Waktu 2020-2023

**AKUNTABILITAS  
KINERJA**

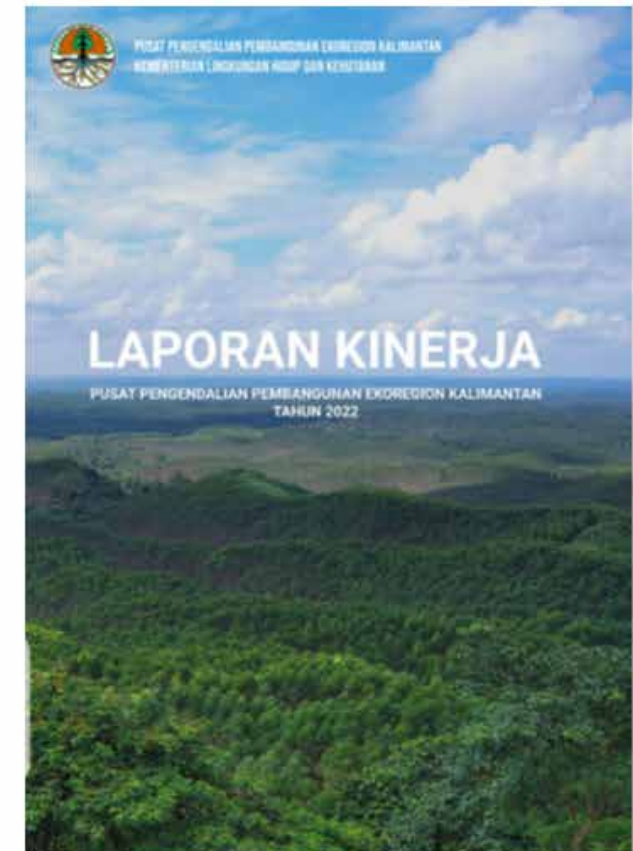
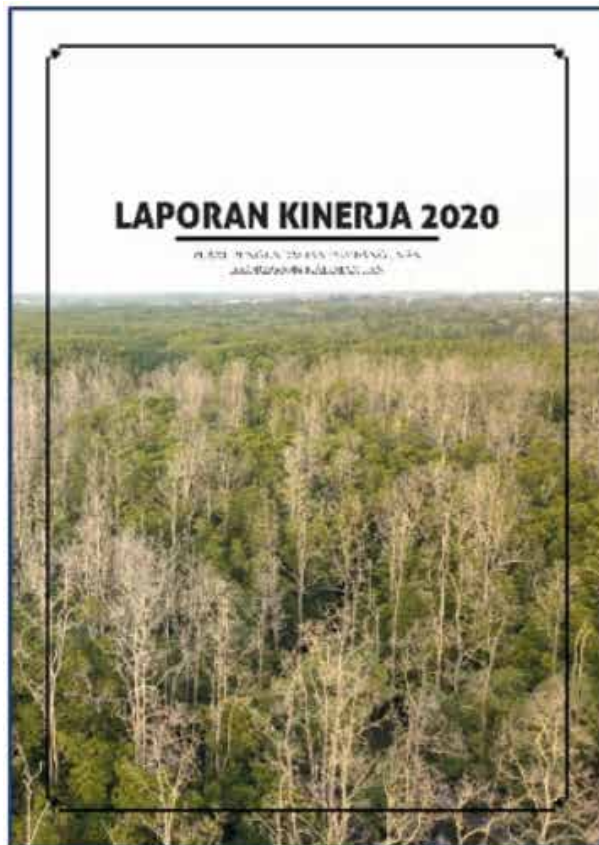
**BAB  
III**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan berkesinambungan.

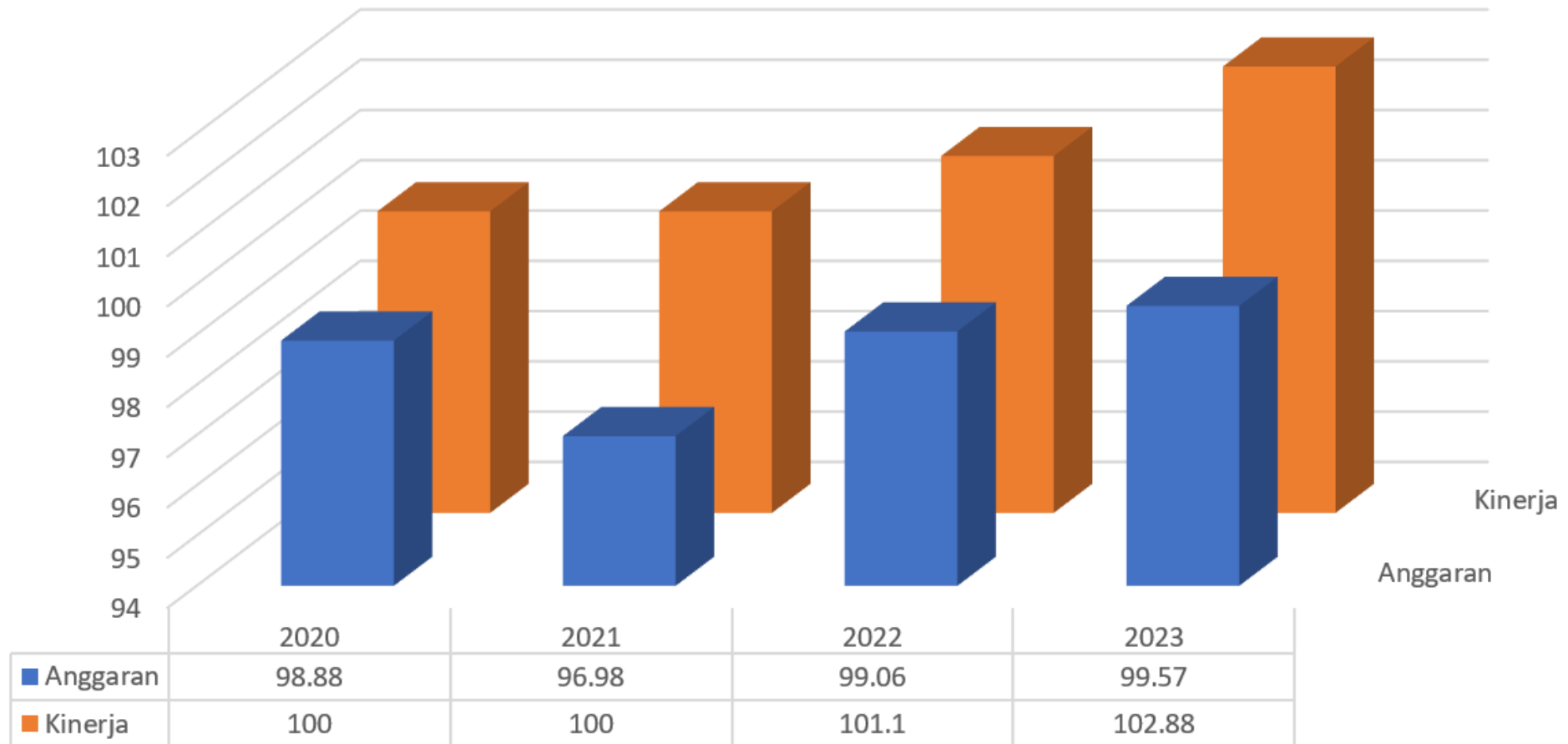
Akuntabilitas Kinerja P3E Kalimantan mencakup capaian kinerja beserta analisis atas target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan dalam upaya mencapai target kinerja.

## A CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Kinerja P3E Kalimantan pada tahun 2023 mencapai 102,88%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja P3E Kalimantan pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar 1,78%. Perbandingan capaian kinerja P3EK selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



## Capaian Kinerja dan Anggaran P3E Kalimantan 2020-2023



Gambar 10. Capaian Kinerja dan Anggaran P3EK pada tahun 2020 - 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian Kinerja P3EK pada tahun 2022 mengalami fluktuasi positif (kenaikan). Hal ini dikarenakan terealisasi dan tercapainya indikator kegiatan masing-masing output melebihi target yang telah ditetapkan.

## 1. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan harus dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi RO yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi RO, akan diperoleh indeks capaian RO. Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerja yang terukur dikelompokkan berdasarkan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- Nilai 86 % - 100 % termasuk kategori Sangat Berhasil;
- Nilai 71 % - 85 % termasuk kategori Berhasil;
- Nilai 56 % - 70 % termasuk kategori Cukup Berhasil;
- Nilai 0 – 55 % termasuk kategori Kurang Berhasil.

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 120% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari P3E Kalimantan.

Untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Selanjutnya pengukuran kinerja ditampilkan dalam formulir pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 11. Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal  
 Unit Satuan Kerja : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan  
 Tahun Anggaran : 2023

| Sasaran   | Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | % Capaian*) |
|---|--|---------|-----------|-------------|
| 1. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E              | 4 poin  | 4,23 poin | 105,75%     |
|   | 2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion | 5 pemda | 5 pemda   | 100,00%     |
| Rata - rata capaian Tahun 2023  |  |         |           | 102,88%     |



Tabel 12. Capaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

| KEGIATAN                                      | KRO  | RO  | SATUAN  | TARGET RO PK             | REALISASI RO | % CAP | KOMPONEN  |   |
|---|--|---|---------|--------------------------|--------------|-------|---|---|
| 5374<br>Pengendalian Pembangunan LHK Regional | EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal        | 962-Layanan Umum  | layanan | 1                        | 1            | 100   | 053-Dukungan Manajemen Satker dan Survei Kepuasan terhadap Layanan P3E Kalimantan |   |
|   |  | 994-Layanan Perkantoran                                   | layanan | 2                        | 2            | 100   | 001-Gaji dan Tunjangan<br>002-Operasioanal dan Pemeliharaan Kantor                |   |
|   | EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal      | 951-Layanan Sarana Internal                               | unit    | 1                        | 1            | 100   | 051-Pengadaan Peralatan dan Mesin   |   |
|   | FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan |         | Daerah (Prov/ Kab/ Kota) | 5            | 5     | 100   | 051- Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  |
|   |  |   |         |                          |              |       |   | 052- Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion |
|   |  |   |         |                          |              |       |   | 053- Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion  |

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja P3E Kalimantan untuk Sasaran dan masing-masing Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja :

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut :

## **SASARAN 1**    **Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan**

Tabel 13. Capaian Kinerja Sasaran 1

| Indikator Kinerja  | Satuan | Realisasi |      | Capaian 2023 |           |                | Capaian Renstra s.d. 2024 kumulatif |                |
|--|--------|-----------|------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|  |        | 2021      | 2022 | Target       | Realisasi | %              | Target 2024                         | % capaian      |
| 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E              | poin   | 4         | 4,18 | 4 poin       | 4,23 poin | 105,75%        | 4                                   | 105,75%        |
| 2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion | pemda  | 15        | 5    | 5 pemda      | 5 pemda   | 100,00%        | 5                                   | 100,00%        |
| <b>Rata - rata capaian Tahun 2023</b>                        |        |           |      |              |           | <b>102,88%</b> |                                     | <b>102,88%</b> |

\*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

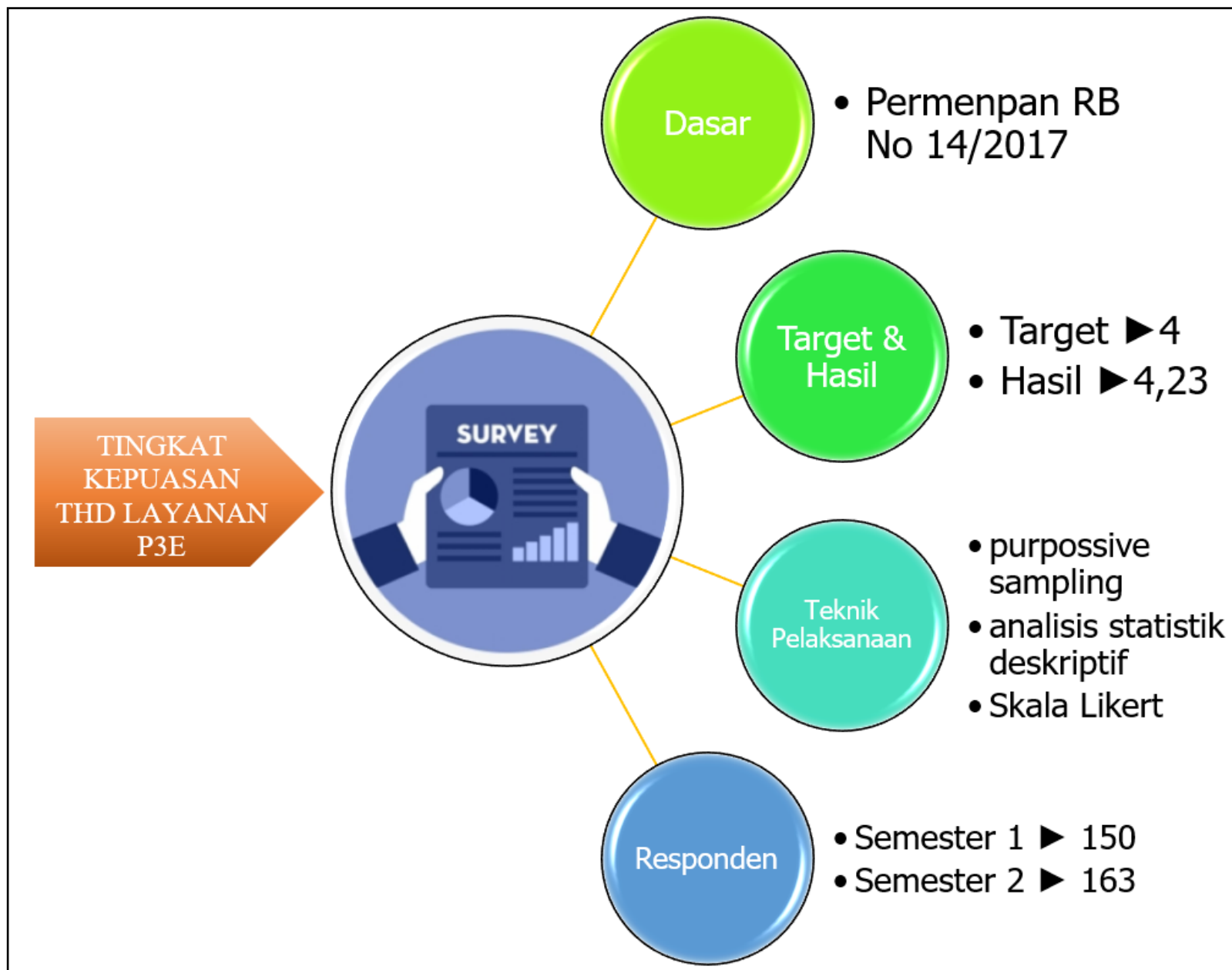
Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu ① Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E dan ② Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 102,88%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1:

### 1.1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E

Pengukuran indikator ini dengan melaksanakan Survei Tingkat Kepuasan Layanan P3E Kalimantan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan P3E Kalimantan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan pengukuran/ survei Tingkat Kepuasan Layanan P3E Kalimantan dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu bulan Juni 2023 dan Desember 2023.

Target indikator Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E pada Perjanjian Kinerja 2023 sebesar 4 poin. Dan hasil pelaksanaan pengukuran indikator ini mencapai 4,23 poin. Pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan menerapkan 5 (lima) dari 9 (sembilan) unsur yaitu ① Kompetensi Pelaksana, ② Waktu Pelayanan, ③ Perilaku Pelaksana, ④ Sarana dan Prasarana, dan ⑤ Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Metodologi pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E dengan menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel ditentukan yaitu para pimpinan stakeholder (Kepala Dinas, Kepala Balai, dan Sekretaris Kepala Dinas, serta para pejabat struktural) karena dipandang dapat mewakili populasi masing-masing instansi. Analisis data pada pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan P3E Kalimantan ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Kelima unsur tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 item, dengan lima option jawaban. Adapun persekorannya menggunakan Skala Likert, dengan skor 1 sampai dengan 5.





Gambar 11. Pelaksanaan Indikator Tingkat Kepuasan terhadap Layanan P3E

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 sampel di Semester I, dan Semester II berjumlah 163 sample.

Berdasarkan survei tingkat kepuasan layanan P3E Kalimantan dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Publik (IKP) pada P3E Kalimantan tahun 2023 sebesar 4.23 poin berada pada kategori “PUAS”, sehingga telah mencapai target 100% dari poin yang ditargetkan di Perjanjian Kinerja antara Sekjen KLHK dengan Kepala Pusat sebesar 4 poin.

Hasil IKP tersebut diatas, terdiri dari 5 (lima) unsur, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 14. Rata-rata Skor dan Peringkat Area Pelayanan

| No | Unsur                       | Rata-rata skor | Kategori |
|----|-----------------------------|----------------|----------|
| 1  | Kompetensi                  | 4,23           | PUAS     |
| 2  | Waktu Pelayanan             | 4,27           | PUAS     |
| 3  | Perilaku                    | 4,28           | PUAS     |
| 4  | Sarana dan Prasarana        | 4,22           | PUAS     |
| 5  | Sistem, Mekanisme, Prosedur | 4,27           | PUAS     |

Jika realisasi indikator kinerja Tingkat Kepuasan Layanan P3E Kalimantan tahun 2023 dengan nilai 4,23 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dengan nilai 4,18 poin, maka terdapat peningkatan nilai sebesar 0,05. Selanjutnya, jika realisasi indikator kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2024 yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Jenderal 2020-2024 yaitu nilai 4 poin, maka persentase capaiannya adalah sebesar 102,88%. Upaya dan strategi untuk memastikan pencapaian kinerja pada akhir periode Renstra akan terus dilakukan.

Berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Tingkat Kepuasan Layanan P3E Kalimantan antara lain:

1. Survei kepuasan dilakukan melalui *e-kuesioner* dengan menggunakan sarana *google form* yang kemudian disebar ke *stakeholder* terkait, sehingga lebih cepat dan *paperless*.
2. Kuesioner disebar ketika bersamaan dengan adanya kegiatan rapat atau pertemuan dengan *stakeholder*.
3. Penyebaran form survei digital melalui metode JAPRI, sehingga langsung mengena kepada subjek kuesioner yang dituju.
4. Mengevaluasi setiap hasil pelaksanaan survei tingkat kepuasan layanan P3E Kalimantan.

**KUESIONER  
SURVEY KEPUASAN LAYANAN  
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION (P3E)  
KALIMANTAN**

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

- Jenis Kelamin : L / P
- Usia : \_\_\_\_\_
- Jabatan : \_\_\_\_\_
- Tingkat Pendidikan : SMP / SMA / SMK / D3 / S1 / S2 / S3

**II. TINGKAT KEPUASAN TERHADAP KINERJA LAYANAN P3E KALIMANTAN**

Petunjuk:

- Berikanlah tanda silang (x) pada nomor di sisi kanan setiap pertanyaan untuk menggambarkan tingkat kepuasan atau ketidakepuasan Bapak/Ibu atau setiap pernyataan berikut.
- Kuesioner berikut agar dipilih (disi) sesuai dengan jenis layanan yang Bapak/Ibu terima dengan kategori:
  - (1) Sangat Tidak Puas
  - (2) Tidak Puas
  - (3) Netral
  - (4) Puas
  - (5) Sangat Puas

Atas kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami,  
P3E Kalimantan

| A. BAGIAN TATA USAHA  |   |     |     |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | Bagaimana profesionalitas layanan SDM Bagian Tata Usaha P3E Kalimantan  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2   | Bagaimana tingkat respon pegawai Bagian Tata Usaha P3E Kalimantan   | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3   | Bagaimana kemudahan melakukan koordinasi dengan Bagian Tata Usaha P3E Kalimantan  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4   | Bagaimana tingkat kualitas metodis/prasarana dalam koordinasi dengan Bagian Tata Usaha P3E Kalimantan                                 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5   | Kemudahan layanan Bagian Tata Usaha P3E Kalimantan secara umum  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| B. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION |   |     |     |     |     |     |
| 1   | Bagaimana profesionalitas layanan SDM P3E Kalimantan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion                 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2   | Bagaimana tingkat respon pegawai pada Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion                                | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3   | Bagaimana kemudahan melakukan koordinasi dengan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion                      | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4   | Bagaimana tingkat kualitas metodis/prasarana dalam koordinasi dengan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5   | Kemudahan layanan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion secara umum  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| C. BIDANG FASILITASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION             |   |     |     |     |     |     |
| 1   | Bagaimana profesionalitas layanan SDM P3E Kalimantan Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion                              | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2   | Bagaimana tingkat respon pegawai pada Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion   | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3   | Bagaimana kemudahan melakukan koordinasi dengan Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion                                   | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4   | Bagaimana tingkat kualitas metodis/prasarana dalam koordinasi dengan Bidang   | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| Fasilitas   | Pengendalian  | Pembangunan |     |     |     |     |     |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5   | Kemudahan layanan Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion secara umum                                       |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| D. BIDANG EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION                 |   |             |     |     |     |     |     |
| 1   | Bagaimana profesionalitas layanan SDM P3E Kalimantan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion                 |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2   | Bagaimana tingkat respon pegawai pada Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion                                |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3   | Bagaimana kemudahan melakukan koordinasi dengan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion                      |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4   | Bagaimana tingkat kualitas metodis/prasarana dalam koordinasi dengan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5   | Kemudahan layanan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion secara umum  |             | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Bagaimana harapan anda terhadap layanan P3E Kalimantan kedepannya.... |   |             |     |     |     |     |     |

Gambar 12. Form survei tingkat kepuasan layanan P3E

## 962.053 Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan

Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan merupakan komponen kegiatan yang mendukung IKK Tingkat Kepuasan terhadap Layanan P3E yang terdiri dari sub-sub komponen antara lain :

Tabel 15. Capaian Daftar Kegiatan Pendukung Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E

| RO dan Sub Komponen Kegiatan  | Pagu Awal            | Pagu Revisi          | Realisasi            | % Realisasi    | CRO           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| <b>962.053 Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan</b>               | <b>1.710.838.000</b> | <b>1.586.275.000</b> | <b>1.586.265.255</b> | <b>100,00%</b> | <b>105,75</b> |
| A Penyusunan Rencana dan Sinkronisasi Kegiatan, Program dan Anggaran Wilayah Ekoregion Kalimantan | 410.838.000          | 562.723.000          | 562.720.428          | 100,00%        |               |
| B Layanan Survey Kepuasan dan Monitoring Evaluasi DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan              | 400.000.000          | 56.426.000           | 56.425.107           | 100,00%        |               |
| C Pengelolaan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  | 100.000.000          | 134.415.000          | 134.412.504          | 100,00%        |               |
| D Pelayanan Administrasi Kepegawaian  | 80.000.000           | 90.056.000           | 90.054.627           | 100,00%        |               |
| E Pelayanan Umum, Pengelolaan BMN, dan Kearsipan  | 150.000.000          | 77.296.000           | 77.295.336           | 100,00%        |               |
| F Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Penanganan Karhutla   | 70.000.000           | 87.796.000           | 87.794.374           | 100,00%        |               |
| G Pelayanan Kegiatan Korwil UPT Kaltim  | 500.000.000          | 577.563.000          | 577.562.879          | 100,00%        |               |

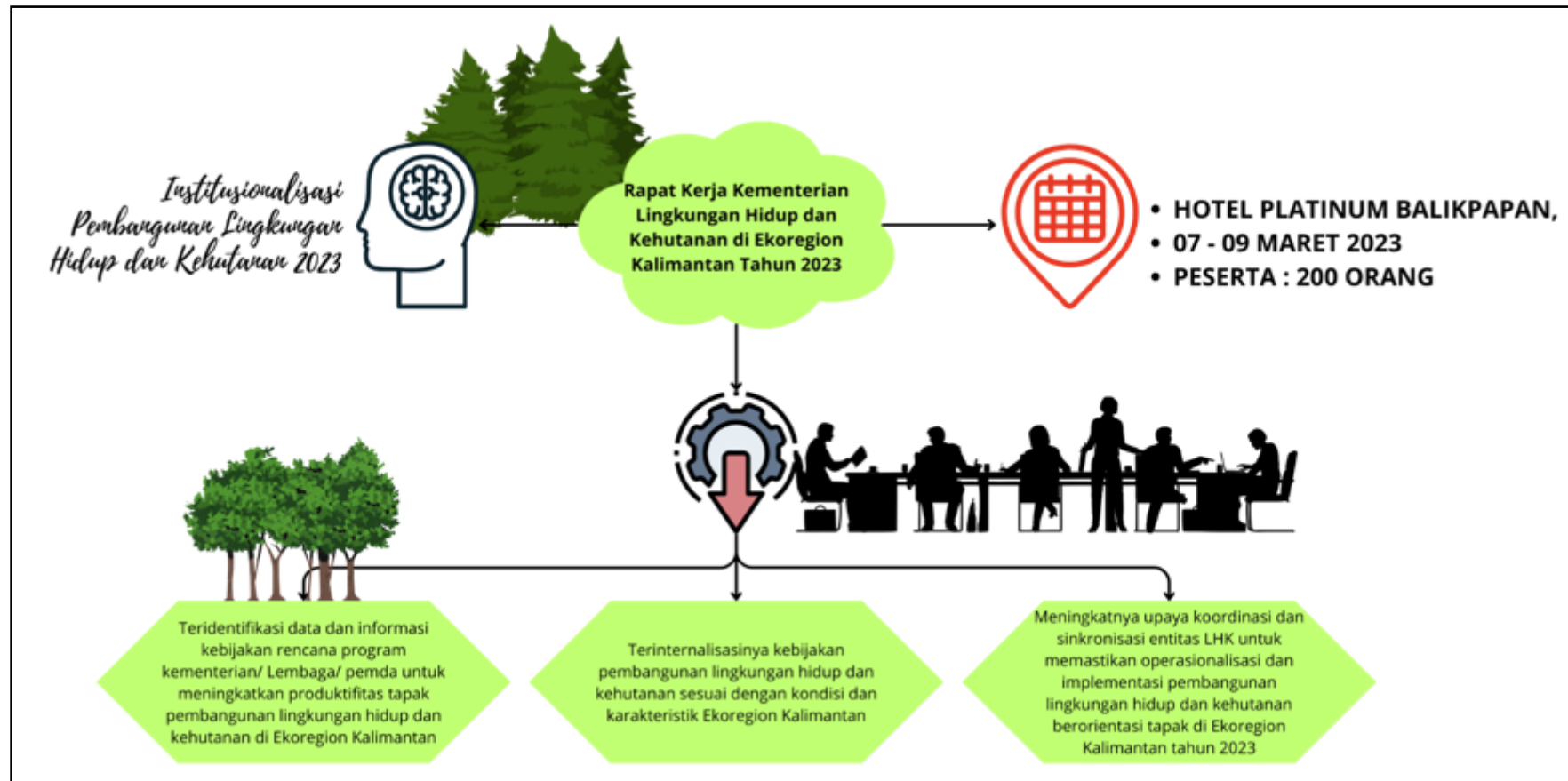
Sub-sub komponen di atas ditunjang oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

### A. Rapat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023

Rapat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dilaksanakan sebagai wujud pengejawantahan tema pembangunan RKP tahun 2023, Kementerian LHK telah menetapkan tema pembangunan LHK tahun 2023 yaitu “Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Transformasi Ekonomi Indonesia”. Atas dasar tersebut, Rapat Kerja KLHK di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 bertujuan :

1. Meningkatkan produktifitas tapak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan.
2. Internalisasi kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Ekoregion Kalimantan.
3. Memperkuat upaya koordinasi dan sinkronisasi entitas LHK untuk memastikan operasionalisasi dan implementasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berorientasi tapak di Ekoregion Kalimantan tahun 2023.

Adapaun pelaksanaan Rapat Kerja KLHK di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 sebagaimana dijelaskan bagan di bawah ini:



Gambar 13. Alur Pelaksanaan Rapat Kerja KLHK di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023

Rapat Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 menghasilkan rekomendasi tindak lanjut terhadap pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion kalimantan, antara lain :

Tabel 16. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Raker KLHK di Ekoregion Kalimantan 2023

| No | Rumusan  | Langkah Tindak Lanjut  | PIC   |
|----|--|--|---|
| 1  | Kebutuhan pembangunan Center Data dan Informasi berbasis spasial tapak dalam mendukung pelaksanaan pengendalian pembangunan LHK di wilayah Ekoregion   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Pusat Data dan Informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan wilayah Ekoregion Kalimantan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh UPT KLHK, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.</li> <li>2. Memberikan support data dan informasi berkelanjutan terkait kegiatan pembangunan LHK di ekoregion pada Pusat Data dan Informasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3E Kalimantan, Pusdatin, Setjen KLHK</li> <li>2. P3E Kalimantan, UPT KLHK, dan Pemda lingkup ekoregion Kalimantan</li> </ol> |
| 2  | Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion terintegrasi yang melibatkan unsur KLHK, Pemda, Perguruan Tinggi, Mitra kerja, pemerhati lingkungan, masyarakat, dsb.                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis tapak landscape di wilayah ekoregion kalimantan dari kegiatan perencanaan, implementasi, dan evaluasi.</li> <li>2. Melakukan kolaborasi dalam implementasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion Kalimantan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3E Kalimantan</li> <li>2. P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup ekoregion Kalimantan dan Pemda</li> </ol>                         |
| 3  | Melakukan inventarisasi dan identifikasi permasalahan prioritas lingkungan hidup dan kehutanan pada setiap ekosistem di wilayah ekoregion berbasis spasial dala mendukung perlindungan dan pengelolaan LHK di tingkat tapak. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dalam rangka inventarisasi dan identifikasi permasalahan prioritas LHK melalui forum komunikasi entitas LHK di Ekoregion Kalimantan.</li> <li>2. Membangun data dan informasi hasil inventarisasi LHK berbasis spasial.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3E Kalimantan, UPT KLHK, dan Pemda</li> <li>2. P3E Kalimantan</li> </ol>   |
| 4  | Pemanfaata kajian Daya Dukung dan Daya Tampung LHK di setiap ekosistem sebagai acuan pengendalian pembangunan LHK dalam perencanaan dan pemanfaatan SDA di wilayah ekoregion kalimantan.                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisa kajian D3TLHK di setiap wilayah di wilayah ekoregion kalimantan untuk dapat dimanfaatkan internal UPT KLHK dan Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Memastikan D3TLHK terintegrasi di dalam perencanaan LHK di ekoregion kalimantan.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P3E Kalimantan</li> <li>2. P3E Kalimantan, UPT KLHK dan Pemda</li> </ol>  |

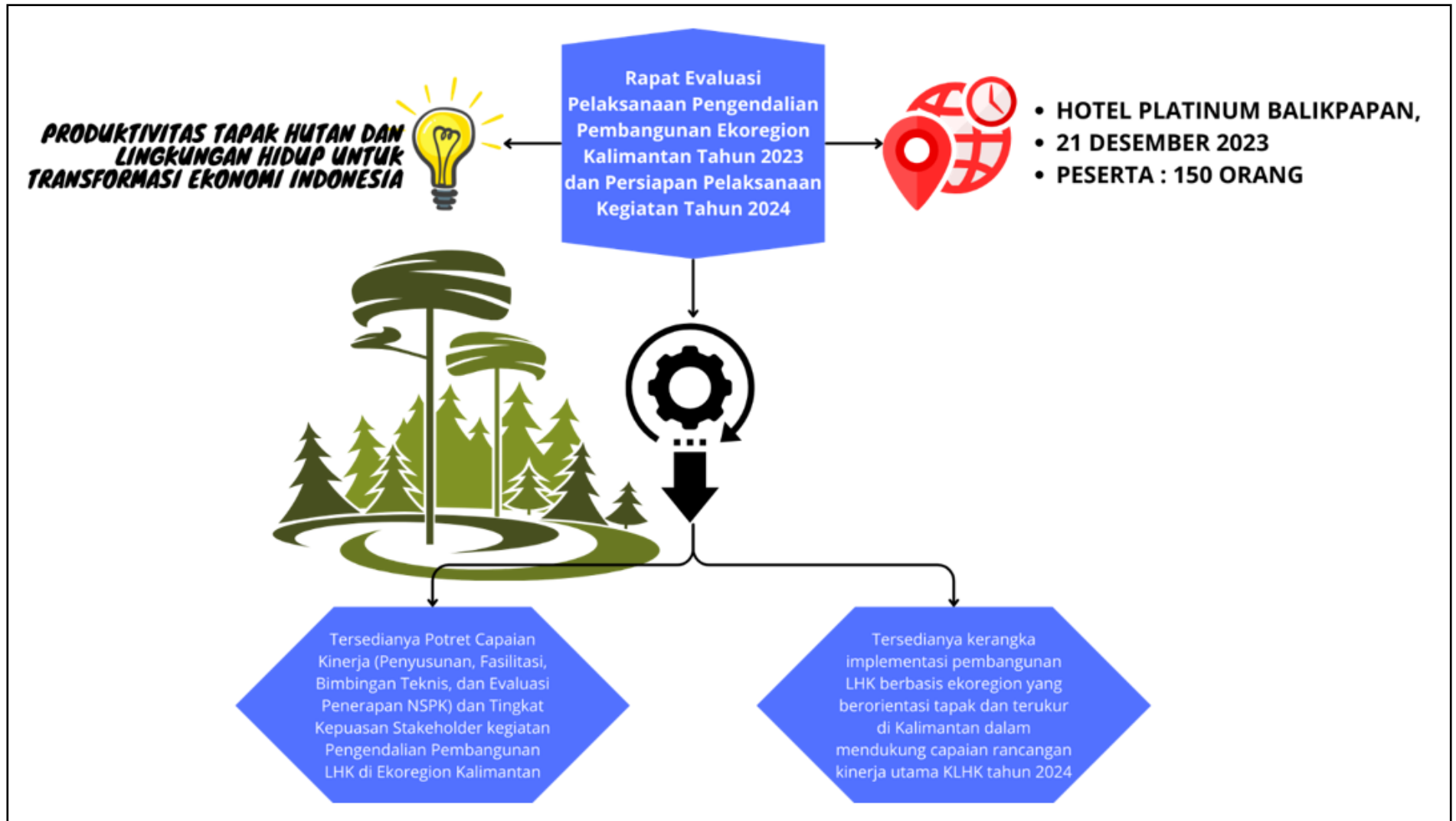
|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 5 | dukungan penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis tapak landscape dengan melalui sharing sumber daya (data dan informasi, sdm, sarpras, pendanaan) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya masing-masing unit kerja KLHK dan Pemerintah Daerah.                  | 1. Mengkoordinasi sumber daya (data dan informasi, sdm, sarpras, pendanaan) pada lokus prioritas yang disepakati di wilayah ekoregion.  | 1. P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda, Sektor Swasta, Mitra Pembanguna dan Masyarakat.   |
| 6 | Peningkatan dukungan SDM (kuantitas dan kualitas), Sarana Prasarana, Pendanaan, dan Kebijakan pada internal KLHK (P3E Kalimantan dan UPT KLHK) dan Pemerintah Daerah, terhadap pelaksanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Kalimantan yang merupakan daerah penyangga IKN | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan prioritas dalam peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas) melalui pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.</li> <li>2. Mendapatkan prioritas penyediaan sarana dan prasarana.</li> <li>3. Membangun komitmen pendanaan dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan Kementerian/Lembaga, Mitra Pembangunan, Lembaga Donor, dan Sektor Swasta.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Kepegawaian, Biro KLN, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda.</li> <li>2. Biro Perencanaan, Biro Umum, Biro Keuangan, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda.</li> <li>3. Biro Perencanaan, Biro KLN, P3E Kalimantan, UPT KLHK, Pemda.</li> </ol> |
| 7 | Melakukan identifikasi tata hubungan kerja antara P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan, dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengendalian pembangunan LHK di setiap ekosistem pada wilayah Ekoregion  | 1. Memberikan rekomendasi tata hubungan kerja antara P3E Kalimantan, UPT KLHK lingkup Ekoregion Kalimantan, dan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian isu/lokus prioritas di setiap ekosistem di wilayah Ekoregion   | 1. P3E Kalimantan, UPT KLHK dan Pemda   |



Gambar 14. Raker KLHK di Ekoregion Kalimantan 2023



B. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024



Gambar 15. Alur pelaksanaan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024



Gambar 16. Foto kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2023 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

### C. Penilaian Maturitas e-SAKIP

Akuntabilitas menjadi isu penting di dalam birokrasi. Pemerintah (agent) bertindak atas nama rakyat (principal) dalam membuat kebijakan, termasuk kebijakan penggunaan dana publik, maka pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikannya tersebut kepada yang memberi mandat. Masyarakat harus merasakan hasil dan manfaat dari setiap produk kebijakan Pemerintah.



Gambar 17. Siklus SAKIP

Nilai SAKIP untuk P3E Kalimantan Tahun 2023 sebesar **89,02** poin dengan predikat **A**. Lembar kerja evaluasi e-SAKIP sebagaimana terlampir di gambar di bawah ini :



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**LEMBAR KERJA EVALUASI**  
 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Dicetak pada 18 Januari 2024 12:42:02

| No     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria   | Satuan Kerja    |       |       |       | Penjelasan   |
|--------|--|-----------------|-------|-------|-------|--|
|        |  | Jawaban (1-100) | Bobot | Nilai |       |  |
|        |  |                 |       | Huruf | Angka |  |
| 1      | PERENCANAAN KINERJA  |                 | 30,00 | BB    | 26,22 |  |
| 1.a    | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia   |                 | 6,00  | A     | 5,50  |  |
| 1.a.01 | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.   | 100,00          | 0,32  |       | 0,32  | Kriteria ini terpenuhi karena telah adanya peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup KLHK sudah mengatur s.d. tingkat UPT sehingga tidak perlu lagi pedoman teknis harus disusun masing-masing                                    |
| 1.a.02 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.   | 100,00          | 0,32  |       | 0,32  | Kriteria ini otomatis terpenuhi, karena Kementerian PAN&RB menyatakan bahwa Perencanaan kinerja jangka panjang yg dimaksud adalah RPJP sehingga berdasarkan UU 25-2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, KL tidak dimandatkan menyusun dokumen jangka panjang |
| 1.a.03 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.  | 90,00           | 0,32  |       | 0,28  | Terdapat Renstra Eselon 2. (link sudah dibuka)   |
| 1.a.04 | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.  | 90,00           | 0,32  |       | 0,28  | Terdapat rencana kerja eselon 2  |
| 1.a.05 | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.   | 90,00           | 0,32  |       | 0,28  | Terdapat dokumen rencana aksi p3e kalimantan   |
| 1.a.06 | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.  | 90,00           | 0,32  |       | 0,28  | dokumen pendukung berupa RKAKL P3E Kalimantan. (link sudah dibuka)   |
| 1.b    | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) |                 | 9,00  | BB    | 7,59  |  |
| 1.b.01 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.   | 90,00           | 0,32  |       | 0,29  | Terdapat dokumen rencana kinerja yang sudah otentik  |
| 1.b.02 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.  | 90,00           | 0,32  |       | 0,29  | Dokumen Rencana Kinerja telah dipublikasikan   |
| 1.b.03 | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.  | 90,00           | 0,32  |       | 0,29  | Dokumen renja telah mencantumkan isu strategis sebagaimana target output   |
| 1.b.04 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.   | 90,00           | 0,32  |       | 0,29  | Rumusan hasil mendukung Sasaran Strategis Kementerian sesuai tugas dan fungsi P3E kalimantan tertuang dalam RENstra P3E Kalimantan (akses link sudah dibuka)   |
| 1.b.05 | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).  | 60,00           | 0,32  |       | 0,19  | terdapat dokumen sampling pengujian narasi indikator kinerja dengan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant/Reliable, Time-bound)   |
| 1.b.06 | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.   | 60,00           | 0,32  |       | 0,19  | IKU telah menggambarkan kondisi pada sasaran strategis yang ditetapkan   |

| No     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria  | Satuan Kerja       |       |       |       | Penjelasan  |
|--------|---|--------------------|-------|-------|-------|---|
|        |   | Jawaban<br>(1-100) | Bobot | Nilai |       |   |
|        |   |                    |       | Huruf | Angka |   |
| 1.b.07 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.  | 90,00              | 0,32  |       | 0,29  | target dapat terpenuhi dengan anggaran yang tersedia, melebihi periode sebelumnya, dan tepat waktu  |
| 1.b.08 | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).              | 80,00              | 0,32  |       | 0,26  | dokumen perencanaan p3e kalimantan selaras  |
| 1.b.09 | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). | 80,00              | 0,32  |       | 0,26  | tersedianya peta / pohon kinerja yang menunjukkan pembagian peran antar bidang  |
| 1.b.10 | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.   | 90,00              | 0,32  |       | 0,29  | Setiap bidang dan bagian telah menerapkan masing-masing rencana aksi masing-masing  |
| 1.b.11 | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.   | 90,00              | 0,32  |       | 0,29  | Terdapat SKP pegawai yang telah disahkan  |
| 1.c    | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan   |                    | 15,00 | BB    | 13,13 |   |
| 1.c.01 | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.   | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | anggaran telah digunakan untuk membiayai kinerja yang diperjanjikan   |
| 1.c.02 | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.   | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | telah melakukan pengujian tahapan pelaksanaan / komponen kegiatan/detil kegiatan dalam RKAKL berkorelasi nyata terhadap pencapaian target sesuai PK |
| 1.c.03 | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track.   | 80,00              | 0,60  |       | 0,48  | Target output yang ditetapkan masih on progress   |
| 1.c.04 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.  | 80,00              | 0,60  |       | 0,48  | Rencana aksi kinerja dipantau secara berkala  |
| 1.c.05 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.  | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | Tidak terdapat perbaikan dokumen perencanaan  |
| 1.c.06 | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.  | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | Tidak terdapat perbaikan dokumen perencanaan P3E Kalimantan   |
| 1.c.07 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.   | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | terdapat perjanjian kerja dari masing masing unit   |
| 1.c.08 | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.   | 90,00              | 0,60  |       | 0,54  | telah dilakukan survei kepuasan terhadap layanan p3e kalimantan   |
| 2      | PENGUKURAN KINERJA  |                    | 30,00 | A     | 27,19 |   |
| 2.a    | Pengukuran Kinerja telah dilakukan  |                    | 6,00  | BB    | 5,37  |   |
| 2.a.01 | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.  | 90,00              | 0,67  |       | 0,60  | terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja pada dokumen renstra   |
| 2.a.02 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.  | 90,00              | 0,67  |       | 0,60  | terdapat definisi operasional yang jelas pada renstra p3e kalimantan  |
| 2.a.03 | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.  | 90,00              | 0,67  |       | 0,60  | Terdapat mekanisme yang jelas yang tertuang pada renstra p3e kalimantan   |
| 2.b    | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                  |                    | 9,00  | BB    | 8,07  |   |

| No     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria   | Satuan Kerja       |       |       |       | Penjelasan  |
|--------|--|--------------------|-------|-------|-------|---|
|        |  | Jawaban<br>(1-100) | Bobot | Nilai |       |   |
|        |  |                    |       | Huruf | Angka |   |
| 2.b.01 | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.  | 85,00              | 0,47  |       | 0,40  | pimpinan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan organisasi   |
| 2.b.02 | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.  | 85,00              | 0,47  |       | 0,40  | data kinerja yang dikumpulkan telah dilakukan pengujian kesesuaian  |
| 2.b.03 | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.   | 90,00              | 0,47  |       | 0,43  | data kinerja telah mendukung capaian kinerja  |
| 2.b.04 | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.   | 90,00              | 0,47  |       | 0,43  | telah dilakukan pemantauan secara berkala   |
| 2.b.05 | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.  | 90,00              | 0,47  |       | 0,43  | telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja  |
| 2.b.06 | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).  | 90,00              | 0,47  |       | 0,43  | telah dilakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi  |
| 2.b.07 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).  | 90,00              | 0,47  |       | 0,43  | Telah diterapkan menggunakan aplikasi pemantauan kinerja organisasi yang tersedia saat ini                        |
| 2.c    | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien |                    | 15,00 | A     | 13,75 |   |
| 2.c.01 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | pengukuran kinerja telah mempertimbangkan kehadiran pegawai dan laporan harian                                    |
| 2.c.02 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.   | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | Peta jabatan disusun berdasarkan target kinerja dan kompetensi pegawai  |
| 2.c.03 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.   | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | terdapat pemindahan SDM sesuai kompetensi, pemindahan anggaran guna mendukung kinerja                             |
| 2.c.04 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.   | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | realokasi anggaran terhadap fokus output kinerja yang berdampak massive   |
| 2.c.05 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | terdapat perubahan lokasi kegiatan untuk memaksimalkan target output dengan anggaran yang tersedia                |
| 2.c.06 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | dilakukannya perubahan rekam detail pada RKAKL guna mendukung ketercapaian output kinerja                         |
| 2.c.07 | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.   | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | setiap bulan sekali dilakukan evaluasi kinerja dari masing-masing unit eselon III                                 |
| 2.c.08 | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | tercantum pembahasan efisiensi anggaran di dalam LKJ 2022   |
| 2.c.09 | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | telah dilakukan survei kepuasan terhadap layanan publik P3E Kalimantan kepada stakeholder pada semester 1 TA 2023 |
| 2.c.10 | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.  | 90,00              | 0,48  |       | 0,44  | telah dilakukan survei kepuasan terhadap layanan publik P3E Kalimantan kepada stakeholder pada semester 1 TA 2023 |
| 3      | PELAPORAN KINERJA  |                    | 15,00 | BB    | 13,10 |   |
| 3.a    | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja  |                    | 3,00  | BB    | 2,67  |   |

| No     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria   | Satuan Kerja       |       |       | Penjelasan |  |
|--------|--|--------------------|-------|-------|------------|--|
|        |  | Jawaban<br>(1-100) | Bobot | Nilai |            |  |
|        |  |                    |       | Huruf |            | Angka  |
| 3.a.01 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.   | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | Dokumen LKj 2022 sudah disusun   |
| 3.a.02 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.  | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | LKJ telah disusun setiap tahun   |
| 3.a.03 | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.   | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | LKJ ditandatangani oleh kepala instansi  |
| 3.a.04 | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.   | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | Reviu hanya diwajibkan hanya pada LKJ entitas kementerian, sedangkan LKJ Eselon 1 dan 2 serta satker tidak diperlukan reviu  |
| 3.a.05 | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.  | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | LKJ 2022 telah dipublikasikan pada laman web P3E Kalimantan  |
| 3.a.06 | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.   | 90,00              | 0,18  |       | 0,16       | LKJ 2022 telah disampaikan sesuai waktu yang ditetapkan  |
| 3.b    | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnanya |                    | 4,50  | BB    | 3,94       |  |
| 3.b.01 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | penyusunan LKJ 2022 telah sesuai dengan NSPK pada Peraturan Menteri PAN&RB yang mengatur tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan tata cara reviu Laporan Kinerja  |
| 3.b.02 | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.   | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | informasi tentang pencapaian kinerja telah tertuang secara jelas dalam LKJ 2022  |
| 3.b.03 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | Telah tersedia analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahunan pada LKJ 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja  |
| 3.b.04 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | di dalam LKJ 2022 tercantum analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja 5 tahunan (Renstra) P3E Kalimantan   |
| 3.b.05 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | dalam LKJ P3E Kalimantan 2022 tercantum analisis pembahasan capaian kinerja dan perbandingannya dengan target kinerja tahun-tahun sebelumnya   |
| 3.b.06 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).                       | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | tercantum benchmarking capaian kinerja dan perbandingannya dengan kinerja unit kerja lain/nasional/internasional di dalam LKJ P3E Kalimantan 2022  |
| 3.b.07 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.   | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | Target 1 = Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E, nilai target 4 poin, tercapai 4,18 poin, dengan stakeholders survei sebagai berikut : • Dinas Lingkungan Hidup Provinsi / Kabupaten / Kota se Kalimantan • Dinas Kehutanan Provinsi se Kalimantan • UPT Kementerian LHK Wilayah Kalimantan Target 2 = Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion, target 5 Pemda, tercapai 5 Pemda, dengan hasil rekomendasi sebagai berikut : Perlu ada komitmen/kesepakatan dengan daerah terkait kebutuhan daerah dalam hal integrasi perencanaan agar fasilitasi integrasi tersebut bisa dimanfaatkan/berguna untuk daerah dalam hal pengendalian pembangunan; Perlu ada NSPK terkait fasilitasi integrasi perencanaan untuk menjadi panduan; Daerah layanan ada 56 kabupaten/kota dan 5 provinsi, tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang sangat terbatas. |
| 3.b.08 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | LKJ P3E Kalimantan 2022 telah mencantumkan efisiensi penggunaan anggaran   |
| 3.b.09 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).  | 90,00              | 0,16  |       | 0,14       | LKJ P3E Kalimantan 2022 telah mencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun anggaran 2023  |

| No     | Komponen/Sub Komponen/Kriteria  | Satuan Kerja       |       |       |       | Penjelasan  |
|--------|---|--------------------|-------|-------|-------|---|
|        |   | Jawaban<br>(1-100) | Bobot | Nilai |       |   |
|        |   |                    |       | Huruf | Angka |   |
| 3.c    | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya |                    | 7,50  | BB    | 6,49  |   |
| 3.c.01 | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).                                | 90,00              | 0,36  |       | 0,32  | LKJ P3E Kalimantan menjadi dasar pimpinan untuk menentukan kebijakan organisasi   |
| 3.c.02 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.   | 80,00              | 0,36  |       | 0,29  | Telah dilakukan wawancara sampling kepada pegawai terhadap LKJ  |
| 3.c.03 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.                 | 90,00              | 0,36  |       | 0,32  | Informasi yang tercantum dalam LKJ 2022 digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja                                |
| 3.c.04 | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.       | 90,00              | 0,36  |       | 0,32  | LKJ 2022 digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan anggaran memaksimalkan pencapaian kinerja                             |
| 3.c.05 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.                             | 90,00              | 0,36  |       | 0,32  | LKJ 2022 dijadikan dasar untuk mengevaluasi capaian kinerja satker  |
| 3.c.06 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.        | 90,00              | 0,36  |       | 0,32  | LKJ 2022 dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya  |
| 3.c.07 | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.                                    | 80,00              | 0,36  |       | 0,29  | Informasi dalam LKJ berdampak pada perubahan budaya kerja pegawai ke arah lebih baik                                      |
| 4      | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL   |                    | 25,00 | A     | 22,51 |   |
| 4.a    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan  |                    | 5,00  | BB    | 4,46  |   |
| 4.a.01 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.  | 90,00              | 0,56  |       | 0,50  | Terdapat SOP (Standar Operasional Prodesur) sebagai landasan akuntabilitas kinerja  |
| 4.a.02 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                        | 90,00              | 0,56  |       | 0,50  | Penilaian mandiri AKIP secara elektronik telah dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik (eSAKIP).                     |
| 4.a.03 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.   | 90,00              | 0,56  |       | 0,50  | Menggunakan penilaian mandiri AKIP secara elektronik (eSAKIP) dilakukan penilaian berjenjang                              |
| 4.b    | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai               |                    | 7,50  | A     | 6,75  |   |
| 4.b.01 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.  | 90,00              | 0,50  |       | 0,45  | Standar pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman ini  |
| 4.b.02 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.   | 90,00              | 0,50  |       | 0,45  | Penerbitan SK Tim Pengelola Kinerja / Surat Tugas untuk melakukan evaluasi/ penjaminan kualitas AKIP                      |
| 4.b.03 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.                                  | 90,00              | 0,50  |       | 0,45  | Terdapat tahapan pendalaman setelah dilakukan pra-evaluasi pada setiap evaluasi AKIP, sebelum dikeluarkan penilaian akhir |
| 4.b.04 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                        | 90,00              | 0,50  |       | 0,45  | Penilaian mandiri AKIP secara elektronik telah dilakukan melalui sistem aplikasi elektronik (eSAKIP).                     |
| 4.b.05 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).                      | 90,00              | 0,50  |       | 0,45  | Menggunakan aplikasi elektronik (eSAKIP)  |



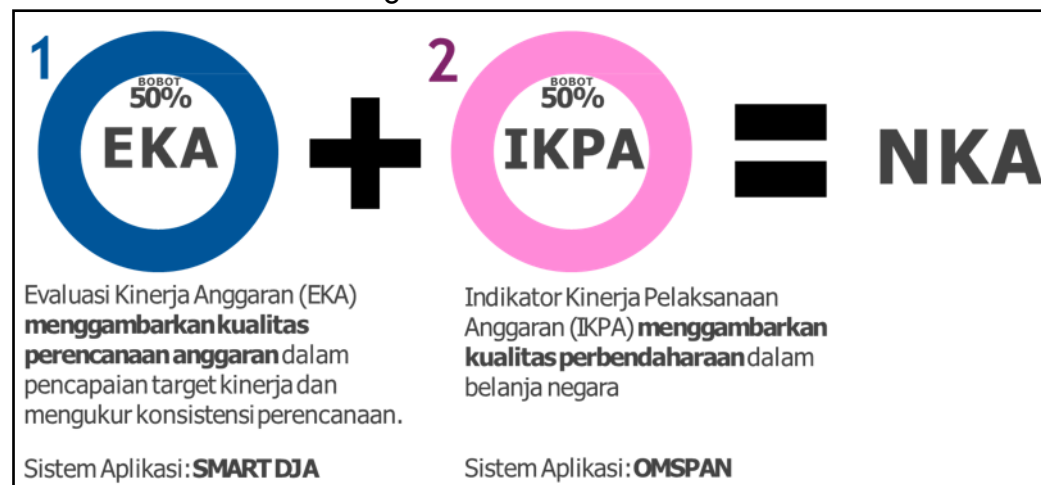
| No  | Komponen/Sub Komponen/Kriteria  | Satuan Kerja       |        |       |       | Penjelasan   |
|---|---|--------------------|--------|-------|-------|--|
|   |   | Jawaban<br>(1-100) | Bobot  | Nilai |       |  |
|   |   |                    |        | Huruf | Angka |  |
| 4.c   | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja |                    | 12,50  | A     | 11,30 |  |
| 4.c.01                                      | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.   | 90,00              | 0,83   |       | 0,75  | laporan tindak lanjut atas penilaian akuntabilitas periode sebelumnya yang tertuang dalam LKJ 2023                     |
| 4.c.02                                      | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.                          | 90,00              | 0,83   |       | 0,75  | terjadi peningkatan nilai SAKIP pada saat dilakukan evaluasi AKIP  |
| 4.c.03                                      | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.   | 90,00              | 0,83   |       | 0,75  | Hasil evaluasi kinerja (LKJ) tahun 2022 digunakan sebagai perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja                  |
| 4.c.04                                      | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.  | 90,00              | 0,83   |       | 0,75  | Hasil evaluasi AKIP diterapkan dalam peningkatan efektivitas pencapaian kinerja serta efisiensi penggunaan sumber daya |
| 4.c.05                                      | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.  | 90,00              | 0,83   |       | 0,75  | Capaian kinerja mengalami peningkatan  |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) |   |                    | 100,00 | A     | 89,02 |  |

Gambar 18. Lembar Kerja Evaluasi e-SAKIP P3E Kalimantan

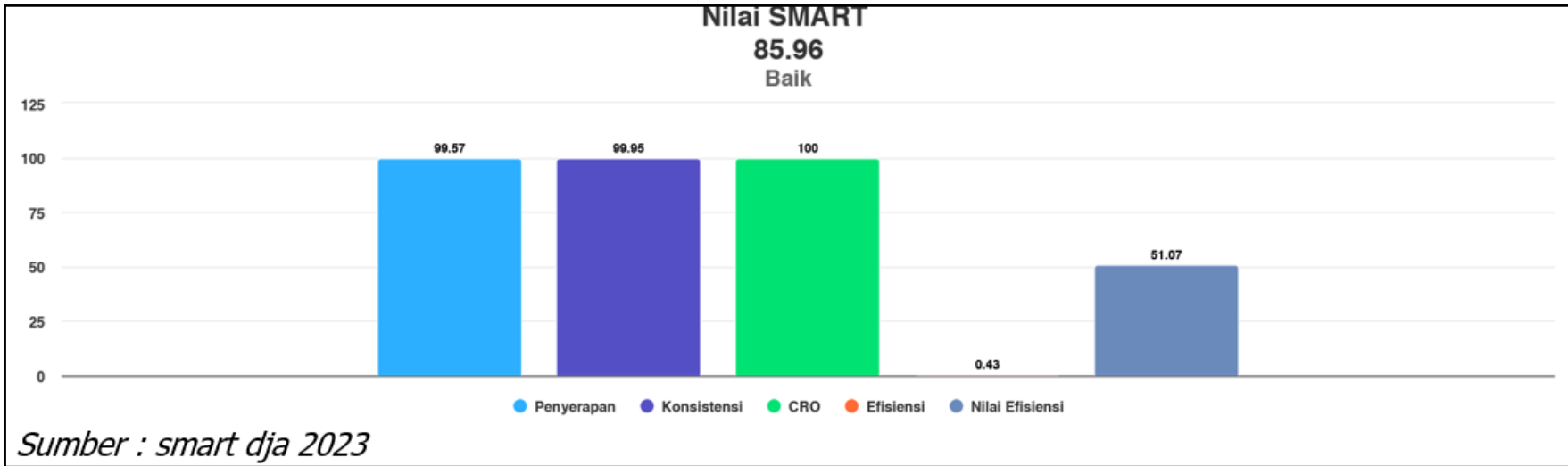
Pada tahun 2024, nilai Evaluasi SAKIP P3E Kalimantan menjadi indikator kinerja kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan target 80 poin.

#### D. NKA (Nilai Kinerja Anggaran) P3E Kalimantan 2023

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah representasi dari kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. NKA ini menjadi dasar pemberian reward & punishment oleh Kementerian Keuangan.



Gambar 19. Rumus penilaian NKA



Gambar 20. Nilai EKA Smart P3E Kalimantan 2023

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

| NO | KODE KPPN | KODE BA | KODE SATKER | URAIAN SATKER   | KETERANGAN  | KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN |                         | KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN |                     |                      |                       |                | KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN | NILAI TOTAL | KONVERSI BOBOT | NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT) |
|----|-----------|---------|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
|    |           |         |             |   |             | REVISI DIPA                   | DEVIASI HALAMAN II DIPA | PENYERAPAN ANGGARAN           | BELANJA KONTRAKTUAL | PENYELESAIAN TAGRIAN | PENGLOLAAN UP DAN TUP | DISPENSASI SPM | CAPAIAN OUTPUT                      |             |                |  |
| 1  | 047       | 029     | 400574      | PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN LHK EKOREGION KALIMANTAN | Nilai       | 100.00                        | 62.10                   | 99.77                         | 95.50               | 85.71                | 99.56                 | 100.00         | 100.00                              | 94.24       | 100%           | 94.24                                    |
|    |           |         |             |   | Bobot       | 10                            | 10                      | 20                            | 10                  | 10                   | 10                    | 5              | 25                                  |             |                |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Akhir | 10.00                         | 6.21                    | 19.95                         | 9.55                | 8.57                 | 9.96                  | 5.00           | 25.00                               |             |                |  |
|    |           |         |             |   | Nilai Aspek |                               | 81.05                   |                               |                     | 96.11                |                       |                | 100.00                              |             |                |  |

Sumber : omspan 2023

Gambar 21. Nilai IKPA OMSPAN P3E Kalimantan 2023

Jadi apabila dihitung dengan rumus dan pembobotan terbaru sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, maka NKA P3E Kalimantan adalah 90,1%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$(85,96 \times 50\%) + (94,24 \times 50\%) = 90,1\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, NKA P3E Kalimantan Tahun 2023 masuk ke dalam kategor “Sangat Baik” dengan nilai lebih dari 90%. Akan tetapi target IKK NKA P3E Kalimantan tahun 2024 sebesar 98,55%, Sehingga nilai tersebut masih jauh di bawah target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**E. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP**

Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP, dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP dengan alat bantu berupa aplikasi e-SPIP Terintegrasi dan Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP. Dasar pelaksanaan PM Maturitas SPIP adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor S-354/Satgas PP SPIP/2014 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Sehingga pada tahun 2023 mulai diberlakukan PM Maturitas SPIP di satker P3E Kalimantan, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 17. Hasil Penjaminan Kualitas PM Maturitas SPIP

| NO | PENILAIAN  | PENILAIAN MANDIRI |       | PENJAMINAN KUALITAS |       |
|----|--|-------------------|-------|---------------------|-------|
|    |  | NILAI             | LEVEL | NILAI               | LEVEL |
| 1  | NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP               | 4.048             | 4     | 3.750               | 3     |
| 2  | NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)      | 4.318             | 4     | 3.959               | 3     |
| 3  | NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK) | 5.000             | 5     | 3.712               | 3     |

Berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Itjen KLHK, maka nilai rata-rata PM Maturitas SPIP P3E Kalimantan Tahun 2023 sebesar 3, 807 poin berada di Level 3 dari skala 1-5, yang berarti SPIP P3E Kalimantan Tahun 2023 masuk di dalam kategori “Terdefinisi” yang artinya Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

## F. Layanan Humas

Layanan urusan Humas selain mendokumentasikan semua kegiatan P3E Kalimantan selama tahun 2023 juga melakukan kegiatan talkshow di stasiun TV Nasional dan radio lokal, antara lain :



Gambar 22. Talkshow Sosialisasi Rangkaian Kegiatan HPSN Kalimantan 2023

Daftar link publikasi:

Takshow TVRI Kaltim : <https://www.instagram.com/p/CouHFC7hX1j/>

Takshow KPFM Balikpapan : <https://www.instagram.com/p/CowtQVhBSda/>



Gambar 23. Talkshow Memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-40

Daftar link publikasi :

Takshow TVRI Kaltim : <https://www.instagram.com/p/CqQDjBChAbp/>

Takshow KPFM Balikpapan : <https://www.instagram.com/p/CpzbSDKB4IB/>

#### G. Layanan P3E Kalimantan sebagai Koordinator Wilayah UPT Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK-SETJEN /KUM.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran di Provinsi Kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk selaku Koordinator, maka P3E Kalimantan mendapat tugas tambahan menjadi Koordinator Wilayah UPT LHK Wilayah Kalimantan Timur dan sebagai perwujudan dari program dukungan manajemen, maka selama tahun 2023 P3E Kalimantan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan SK Pengelola Anggaran UPT KLHK wilayah Kalimantan Timur disetiap tahunnya. Ada 10 UPT di Kalimantan Timur yang setiap tahunnya menyampaikan usulan pengelola anggaran yang kemudian diterbitkan SK oleh P3E Kalimantan sebagai Koordinator wilayah. UPT yang mengusulkan Penerbitan SK diantaranya adalah :
  - a. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup;
  - b. BPDAS Mahakam Berau;
  - c. BPKHTL Wilayah IV Samarinda;
  - d. BKSDA Kaltim;
  - e. BPHL Wilayah XI Samarinda;
  - f. BTN Kutai;
  - g. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samboja;
  - h. Balai Pelatihan LHK Samarinda;
  - i. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan;
  - j. SMK Kehutanan Samarinda
  
2. Pelayanan Kegiatan Korwil UPT Kaltim diantaranya adalah memfasilitasi Kunjungan Kerja Pejabat Tinggi KLHK ke wilayah Kalimantan Timur. Anggaran yang digunakan dalam kegiatan ini senilai Rp 577.563.000,00 terdiri dari :

Tabel 18. Anggaran Layanan Kegiatan Korwil

| No            | Rincian   | Jumlah                  |
|---------------|---|-------------------------|
| 1.            | Belanja bahan                                     | Rp 43.008.000,-         |
| 2.            | Belanja honor output kegiatan                     | Rp 24.000.000,-         |
| 3.            | Belanja sewa                                      | Rp 82.520.000,-         |
| 4.            | Belanja jasa lainnya                              | Rp 11.830.000,-         |
| 5.            | Belanja perjalanan dinas                          | Rp 394.185.000,-        |
| 6.            | Belanja perjalanan dinas dalam kota               | Rp 1.020.000,-          |
| 7.            | Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota | Rp 21.000.000,-         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>Rp 577.563.000,-</b> |



Gambar 24. Kunjungan Kerja Pejabat Tinggi KLHK ke wilayah Kalimantan Timur

## 1.2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion

Pengukuran capaian indikator kinerja Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion, dilakukan dengan menurunkan kegiatan sampai ke level Komponen sebagai berikut :

Tabel 19. Capaian indikator kinerja Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion

| No | IKK   | KRO  | RO  | Komponen   | Target | Satuan | % Capaian |
|----|---|--|---|--|--------|--------|-----------|
| 1  | Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion | FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | 051-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion  | 5      | Pemda  | 100       |
|    |   |  |   | 052-Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion |        |        |           |
|    |   |  |   | 053-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion  |        |        |           |

## 051 Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan PPE pada tahun 2023 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja P3EK pada tahun 2023 ini dapat dikatakan tetap/stabil. Perbandingan capaian kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan PPE selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 25. Capaian Kinerja dan Anggaran P3EK pada tahun 2020 – 2023

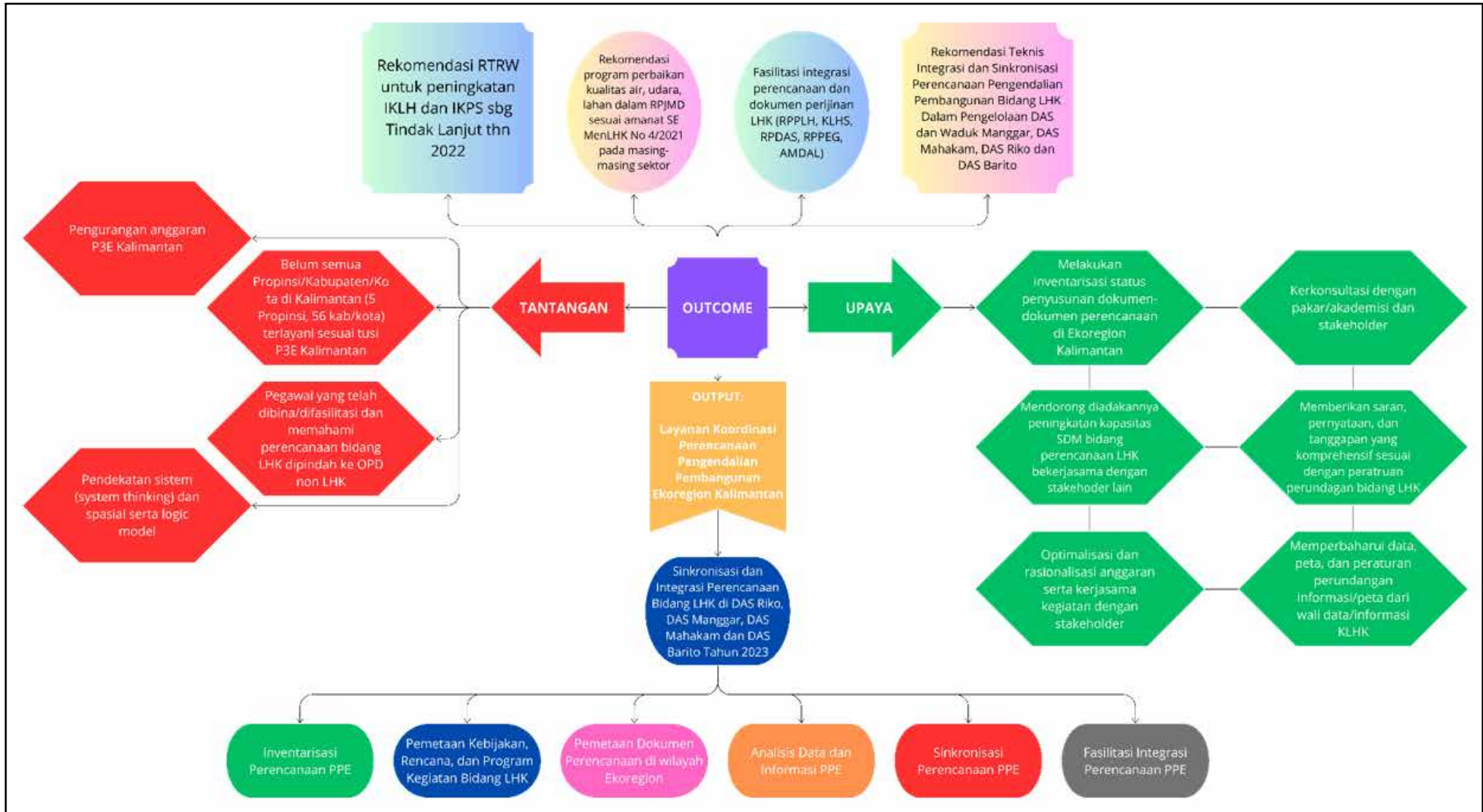


Tabel 20. Daftar Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

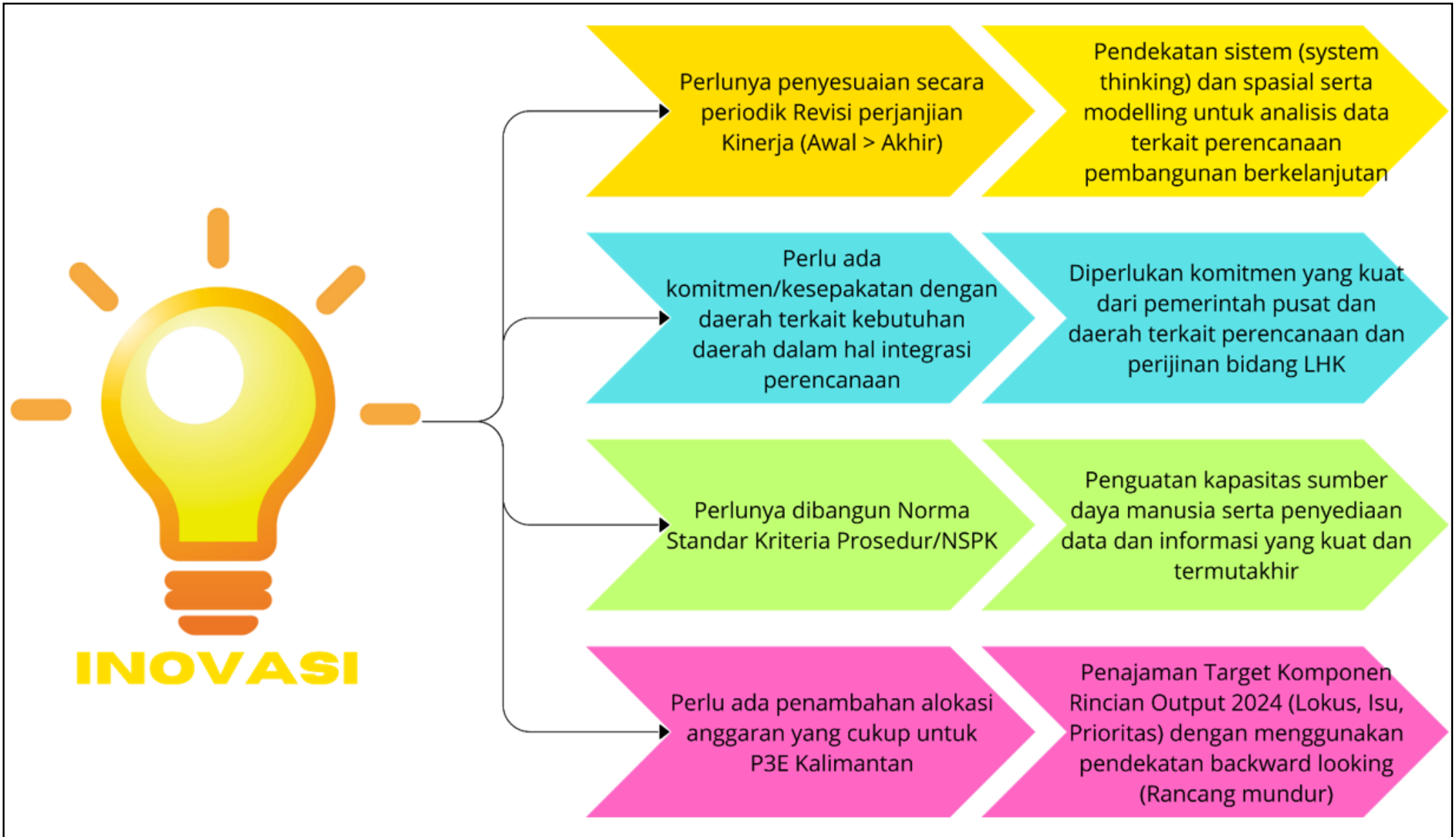
| RO dan Komponen Kegiatan |  | Pagu Awal            | Pagu Revisi        | Realisasi          | % Realisasi    | CRO        |
|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| <b>51</b>                | <b>Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion</b>   | <b>1.000.000.000</b> | <b>840.000.000</b> | <b>839.514.771</b> | <b>99,94 %</b> | <b>100</b> |
| 051.AA                   | Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar | 244.490.000          | 143.393.000        | 143.373.651        | 99,99 %        |            |
| 051.AB                   | Analisis Data dan Informasi dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar                        | 136.525.000          | 134.727.000        | 134.692.998        | 99,97 %        |            |
| 051.AC                   | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar               | 229.130.000          | 174.334.000        | 174.240.587        | 99,95 %        |            |
| 051.AD                   | Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Mangga             | 85.860.000           | 209.705.000        | 209.387.253        | 99,85 %        |            |
| 051.BA                   | Koordinasi Stakeholder dalam rangka Inventarisasi Perencanaan DAS Barito   | 169.995.000          | 177.841.000        | 177.820.282        | 99,99 %        |            |

Tabel 21. Daftar Realisasi Output Kegiatan Pendukung Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

| Kode       | Komponen/ Sub Komponen   | Lokus  | Output  | Outcome   |
|------------|--|--|---|---|
| 51         | <b>Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion</b>   |  |   |   |
| 051.<br>AA | Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar | 5 Propinsi<br><br>(dengan lokus Prioritas di<br><br>DAS Mahakam,<br><br>DAS Riko<br><br>DAS Manggar<br><br>DAS Barito) | Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan<br><br>Melalui Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan Bidang LHK di DAS Riko, DAS Manggar, DAS Mahakam dan DAS Barito Tahun 2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi program perbaikan kualitas air, udara, lahan dalam RPJMD sesuai amanat SE MenLHK No 4/2021 pada masing-masing sektor</li> <li>• Rekomendasi RTRW untuk peningkatan IKLH dan IKPS sbg Tindak Lanjut thn 2022</li> <li>• Rekomendasi Teknis Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Bidang LHK Dalam Pengelolaan DAS dan Waduk Manggar, DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Barito</li> <li>• Fasilitasi integrasi perencanaan dan dokumen perijinan LHK (RPPLH, KLHS, RPDAS, RPPEG, AMDAL)</li> </ul> |
| 051.<br>AB | Analisis Data dan Informasi dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar                        |  |   |   |
| 051.<br>AC | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Manggar               |  |   |   |
| 051.<br>AD | Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Manggar            |  |   |   |
| 051.<br>BA | Koordinasi Stakeholder dalam rangka Inventarisasi Perencanaan DAS Barito   |  |   |   |



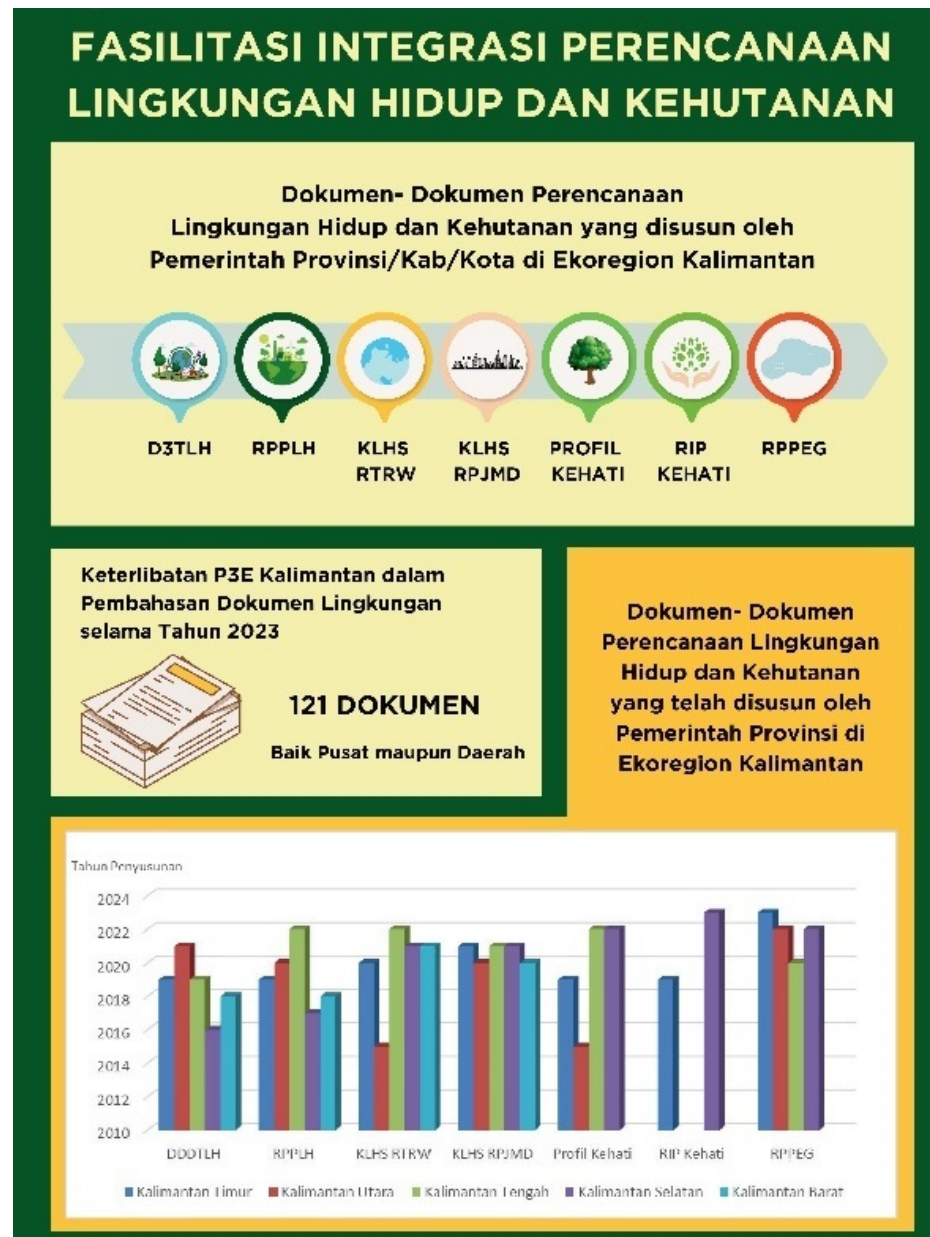
Gambar 26. Alur pencapaian Outcome Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion



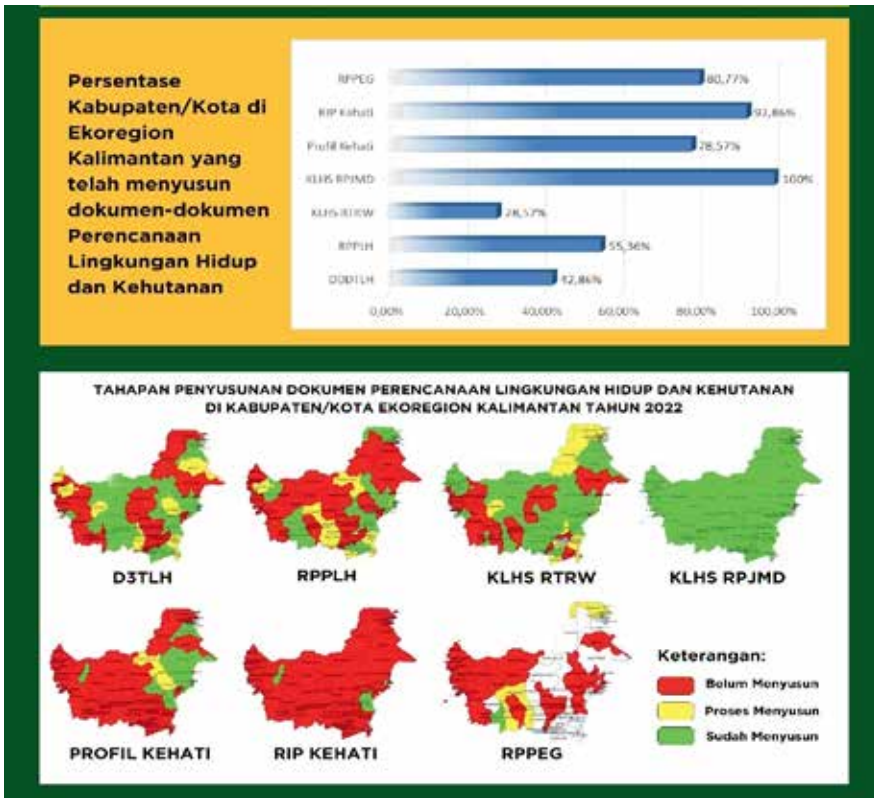
Gambar 27. Inovasi Outcome Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion



Gambar 28. Alur Pembelajaran Integrasi Sinkronisasi Perencanaan Di DAS Manggar



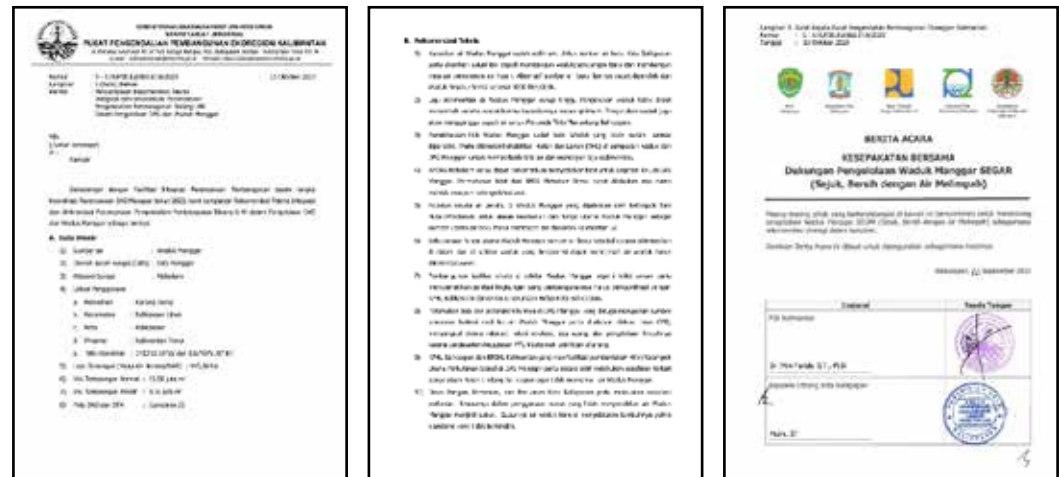
Gambar 29. Rekapitulasi fasilitasi Integrasi perencanaan dan perijinan sebagai Outcome 2023



Gambar 30. Progres monev integrasi perencanaan bidang LHK sebagai Outcome 2023

Produk- produk Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion :

- Rekomendasi Teknis Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Bidang LHK Dalam Pengelolaan DAS dan Waduk Manggar, DAS Mahakam, DAS Riko dan DAS Barito, yang mana beberapa diantaranya telah diadopsi/dintegrasikan dalam muatan RPJP Pemerintah Daerah (Kota Balikpapan)



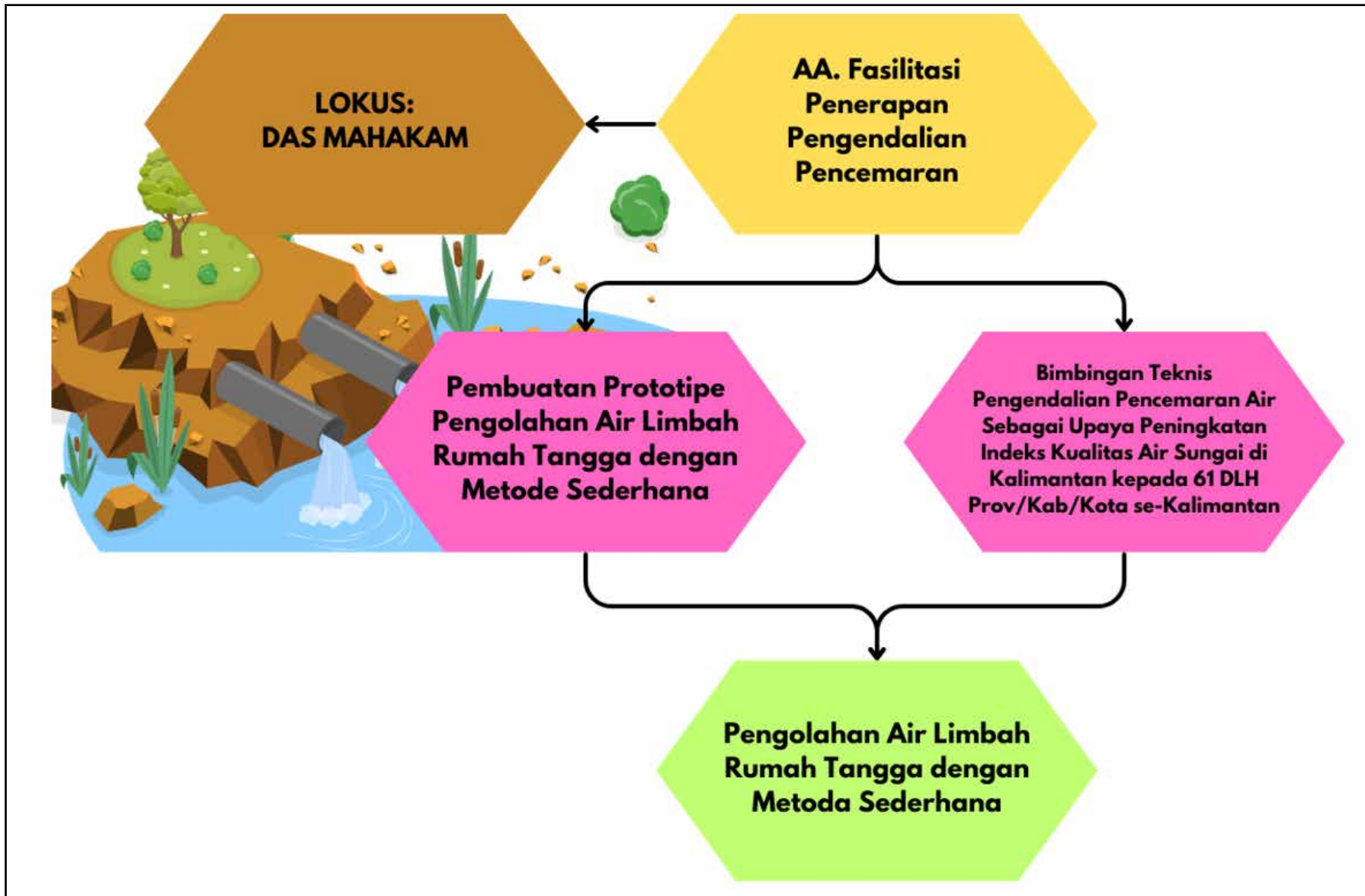
Gambar 31. Rekomendasi Teknis Dalam Perencanaan DAS dan Waduk Manggar sebagai Outcome 2023

## 052 Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion

Kinerja Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada tahun 2023 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja P3EK pada tahun 2023 ini dapat dikatakan tetap/stabil. Capaian kinerja Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Tabel 22. Capaian dan Realisasi Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion

| Komponen dan Sub Komponen Kegiatan |   | Pagu Awal            | Pagu Revisi          | Realisasi            | % Realisasi   | CRO        |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| <b>052</b>                         | <b>Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion</b> | <b>1.200.000.000</b> | <b>1.035.000.000</b> | <b>1.031.660.957</b> | <b>99,68%</b> | <b>100</b> |
| <b>052. AA</b>                     | Fasilitas Penerapan Pengendalian Pencemaran DAS Mahakam   | 249.700.000          | 228.069.000          | 227.184.369          | 99,61%        |            |
| <b>052. AB</b>                     | Workshop Pengelolaan Sampah, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan LB3 dan B3 dan Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan                          | 224.770.000          | 238.600.000          | 237.910.606          | 99,71%        |            |
| <b>052. AC</b>                     | Fasilitas Pengendalian Mutu Air Sungai dan Air Laut Teluk Balikpapan  | 174.390.000          | 48.845.000           | 48.307.570           | 98,90%        |            |
| <b>052. BA</b>                     | Fasilitas Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion DAS Mahakam  | 246.920.000          | 216.832.000          | 216.436.768          | 99,82%        |            |
| <b>052. CA</b>                     | Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion DAS Barito  | 152.360.000          | 163.482.000          | 162.969.456          | 99,69%        |            |
| <b>052. DA</b>                     | Fasilitas Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion DAS Kapuas   | 151.860.000          | 139.172.000          | 138.852.188          | 99,77%        |            |



Gambar 32. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitas Penerapan Pengendalian Pencemaran

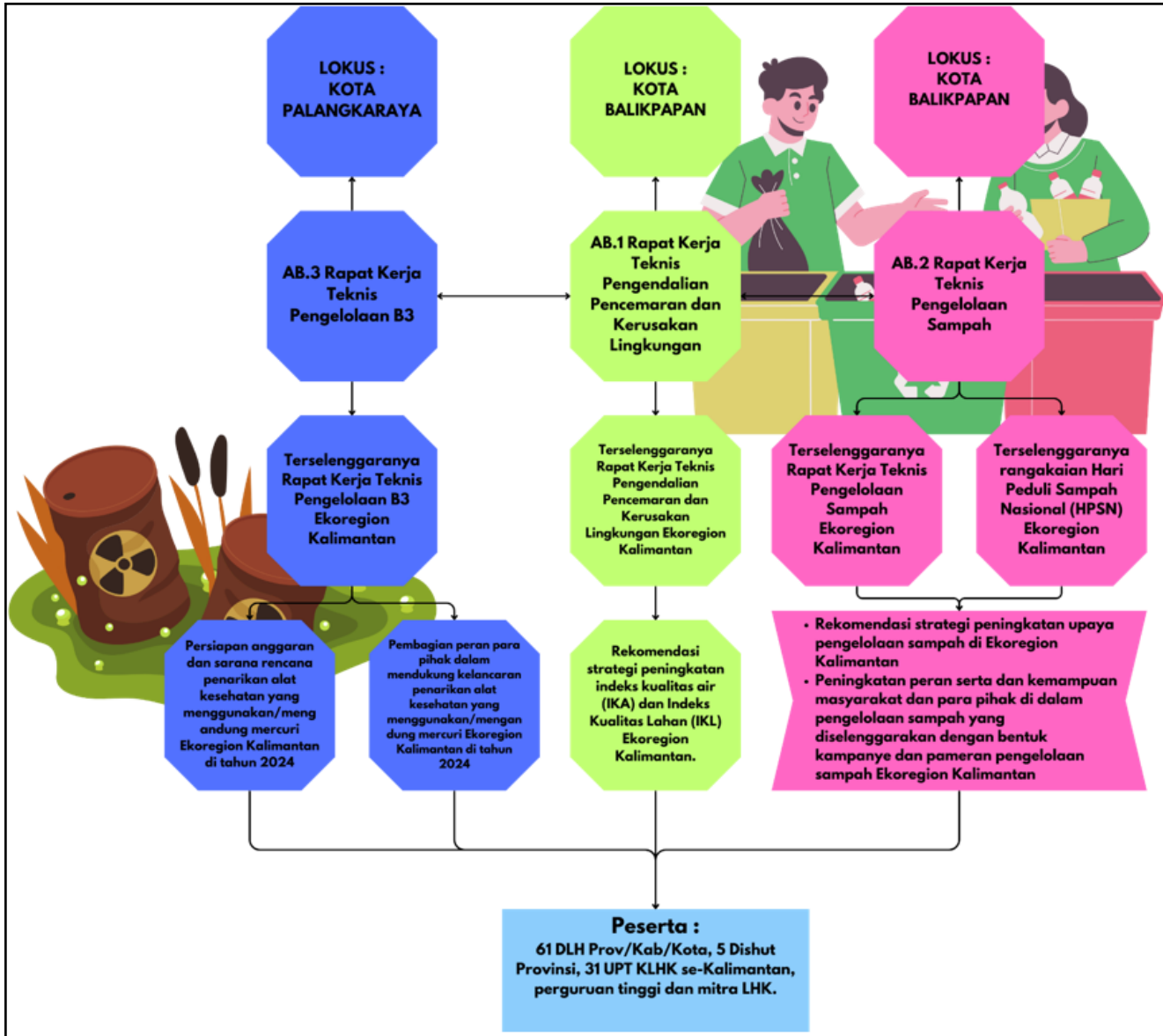




Gambar 33. Bimtek Pengendalian Pencemaran Air Upaya Peningkatan IKA



Gambar 34. Pembuatan Prototipe Pengolahan Air limbah Rumah Tangga Metoda Sederhana



Gambar 35. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Workshop Pengelolaan Sampah, Rapat Kerja Teknis Pengelolaan LB3 dan B3 dan Rapat Kerja Teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Gambar 36. Rakernis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Gambar 37. Raker Pengelolaan Sampah



Gambar 38. Workshop Pengelolaan Sampah



Gambar 39. Kampanye Pengelolaan Sampah



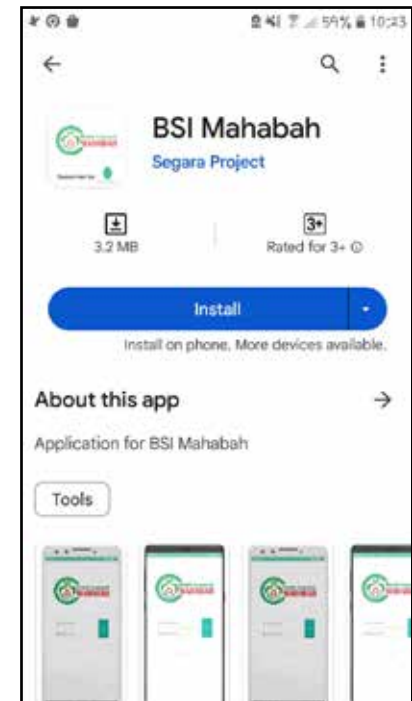
Gambar 40. Pameran Pengelolaan Sampah di Mall E-Walk



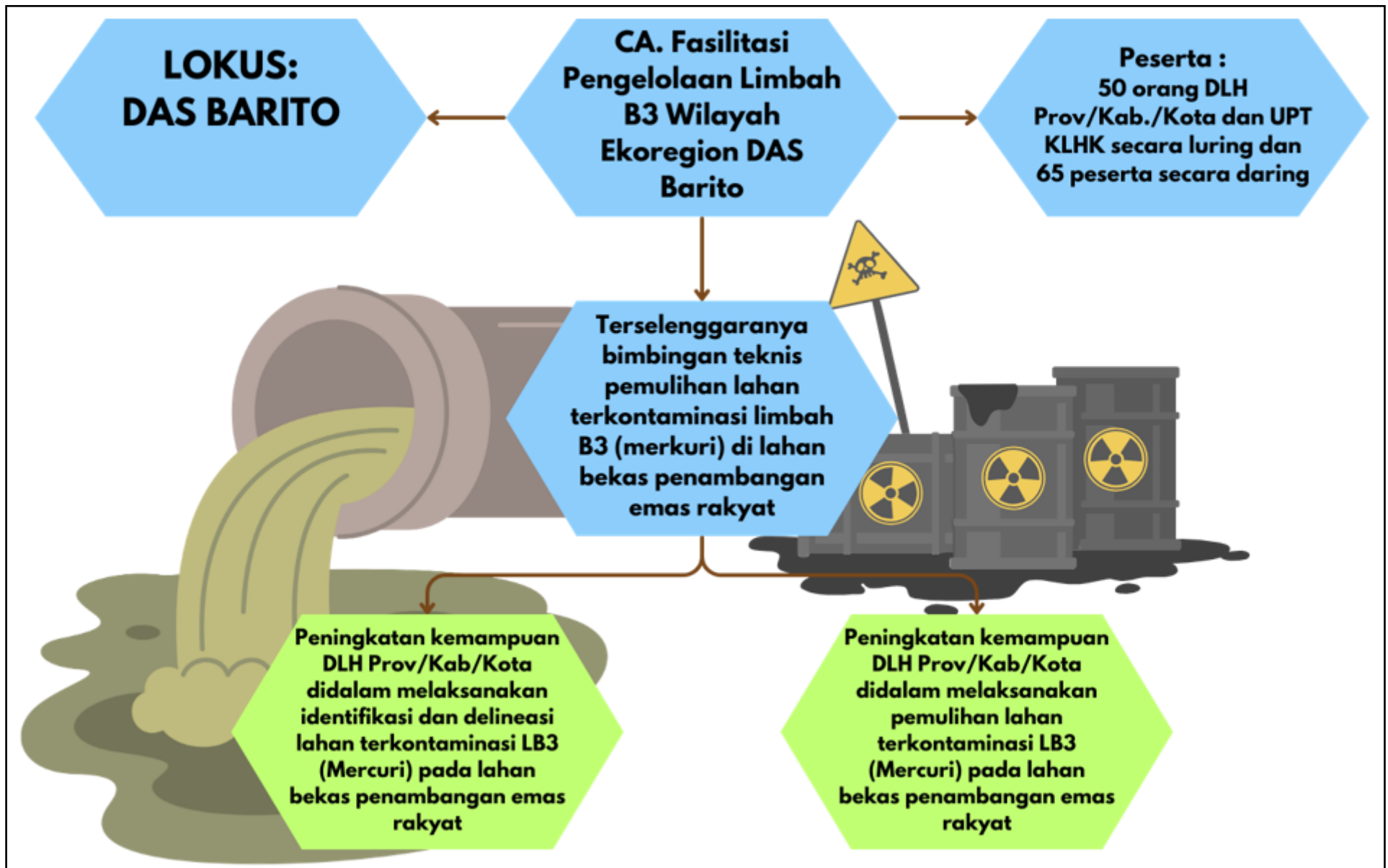
Gambar 41. Rapat Kerja Teknis Pengelolaan B3



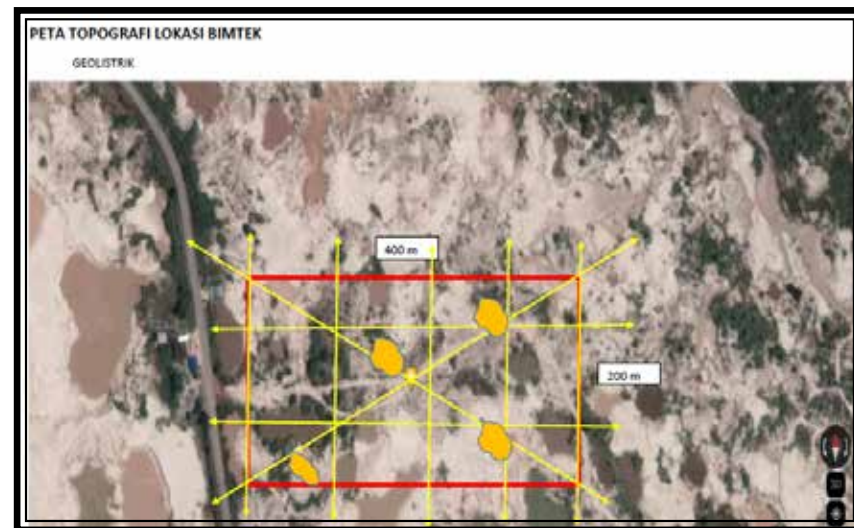
Gambar 42. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitas Pengelolaan Sampah



Gambar 43. Bimtek dan fasilitas Sistem digitalisasi Bank Sampah di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Paser



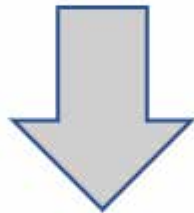
Gambar 44. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion DAS Barito



Gambar 45. Bimtek pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 (merkuri) di lahan bekas penambangan emas rakyat



Gambar 46. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion DAS Kapuas



Gambar 47. Profil IKLH Kota Pontianak



Gambar 48. Bimtek Peningkatan IKL

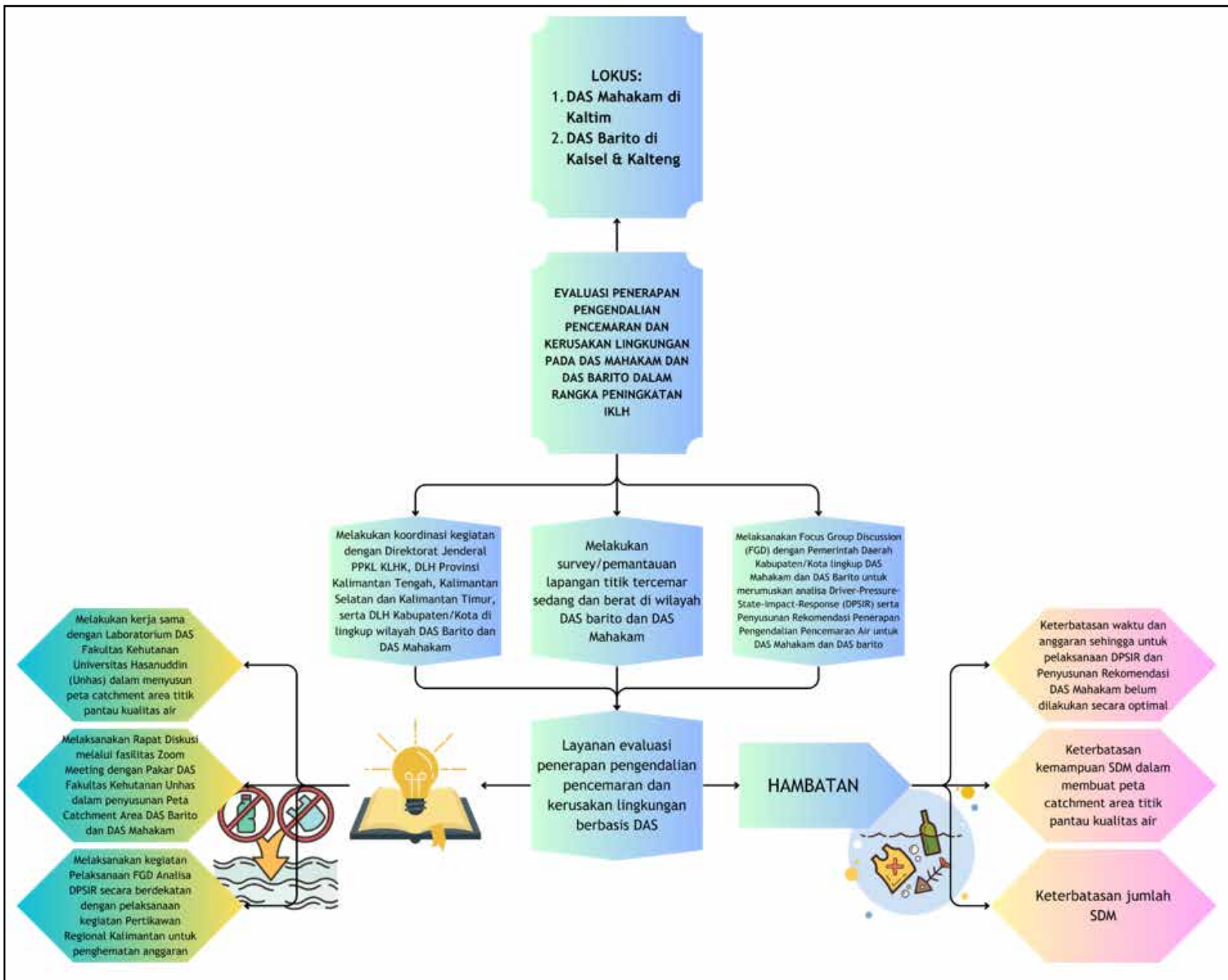


## 052 Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Kinerja Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada tahun 2023 mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya maka capaian kinerja P3EK pada tahun 2023 ini dapat dikatakan tetap/stabil. Capaian kinerja Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:

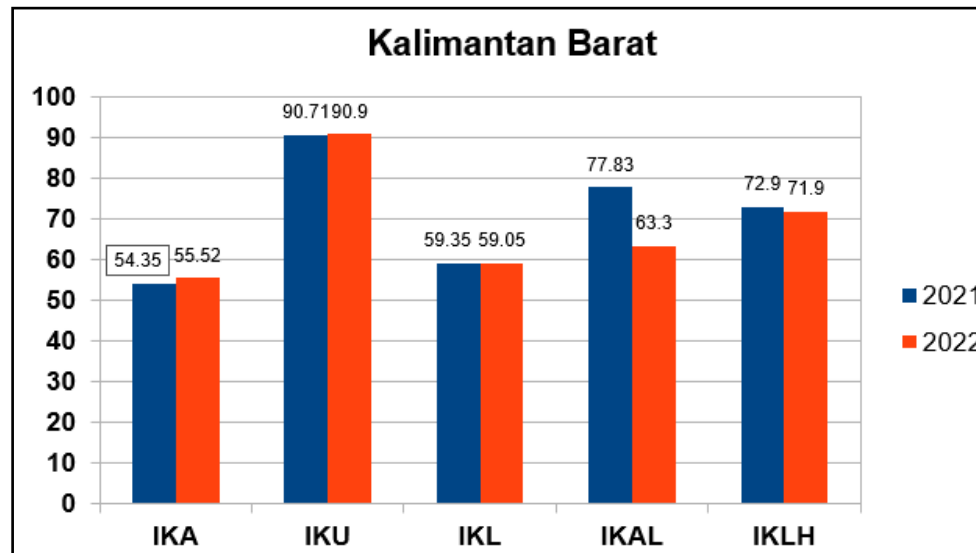
Tabel 23. Capaian dan Realisasi Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

|               | RO dan Komponen Kegiatan  | Pagu Awal          | Pagu Revisi        | Realisasi          | % Realisasi   | CRO        |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| <b>053</b>    | <b>Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion</b>  | <b>800.000.000</b> | <b>690.000.000</b> | <b>686.319.445</b> | <b>99,47%</b> | <b>100</b> |
| <b>053.AA</b> | Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada DAS Mahakam dan DAS Barito Dalam Rangka Peningkatan IKLH | 394.900.000        | 513.970.000        | 510.601.009        | 99,34%        |            |
| <b>053.BA</b> | Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Peningkatan IKPS dan Mendorong Sirkular Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur   | 204.400.000        | 66.380.000         | 66.164.228         | 99,67%        |            |
| <b>053.CA</b> | Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah IKN Terhadap Kualitas Lingkungan di DAS Riko Manggar  | 200.700.000        | 109.650.000        | 109.554.208        | 99,91%        |            |

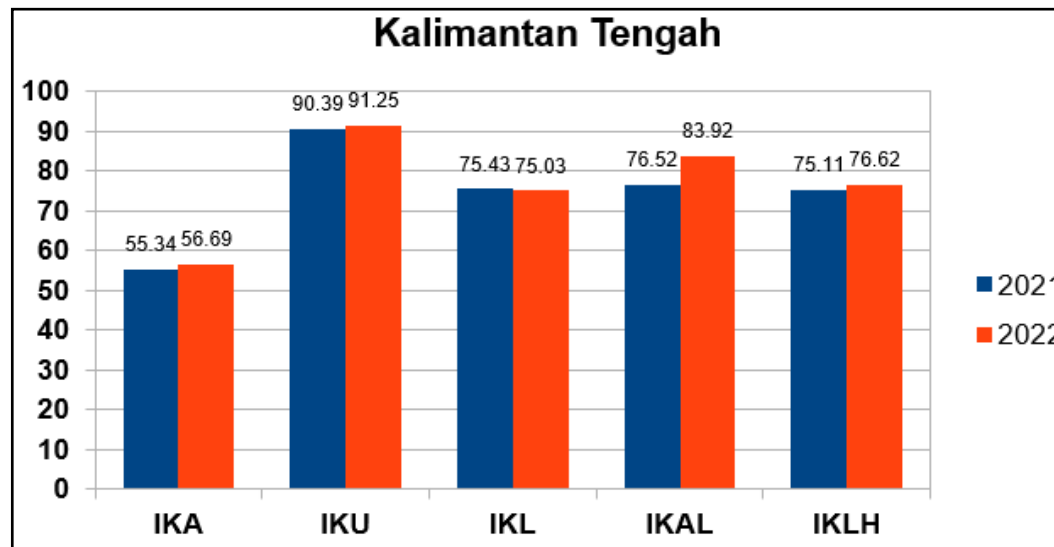


Gambar 49. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada DAS Mahakam dan DAS Barito dalam rangka peningkatan IKLH

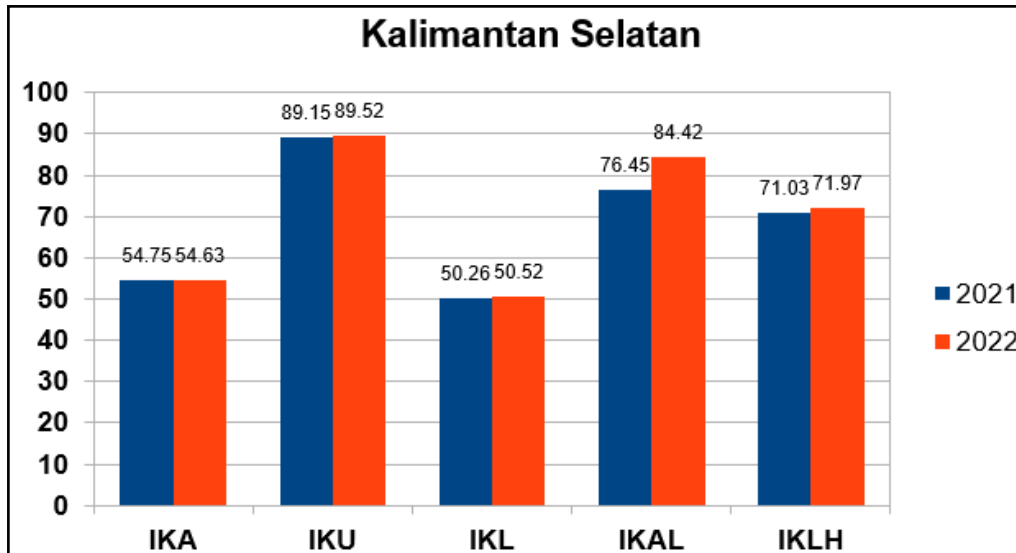
IKLH Provinsi di Kalimantan cenderung mengalami peningkatan, namun Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi indeks dengan angka paling rendah dibandingkan indeks kualitas lingkungan yang lain.



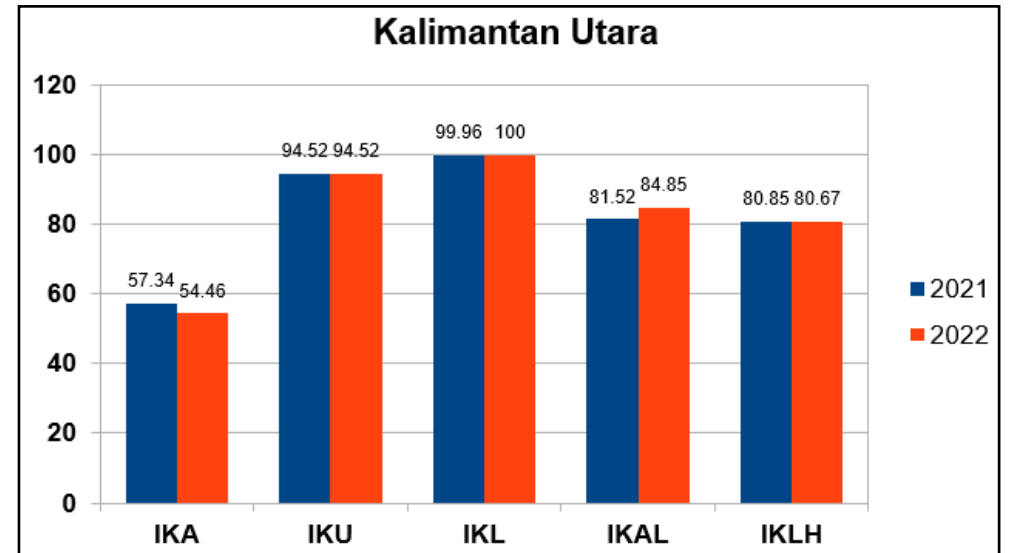
Gambar 50. Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2022



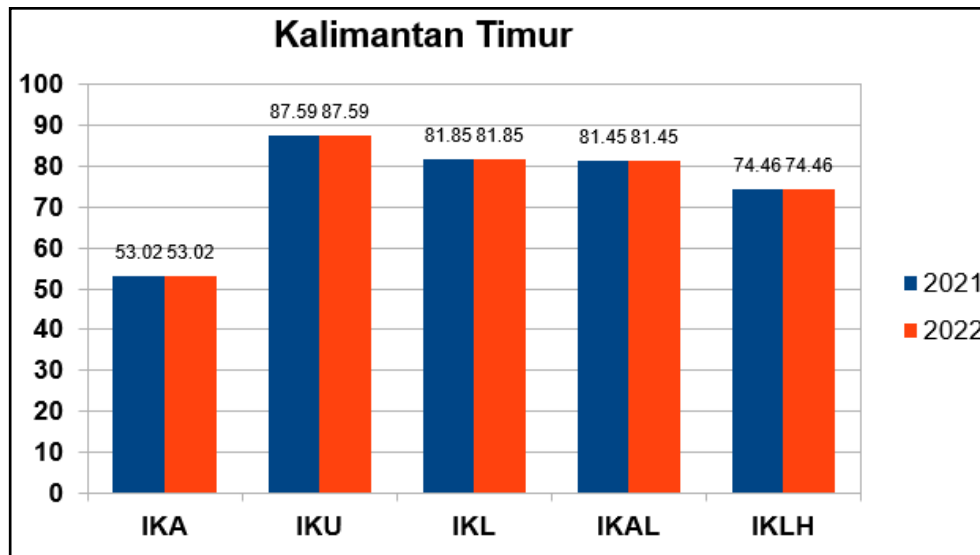
Gambar 51. Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022



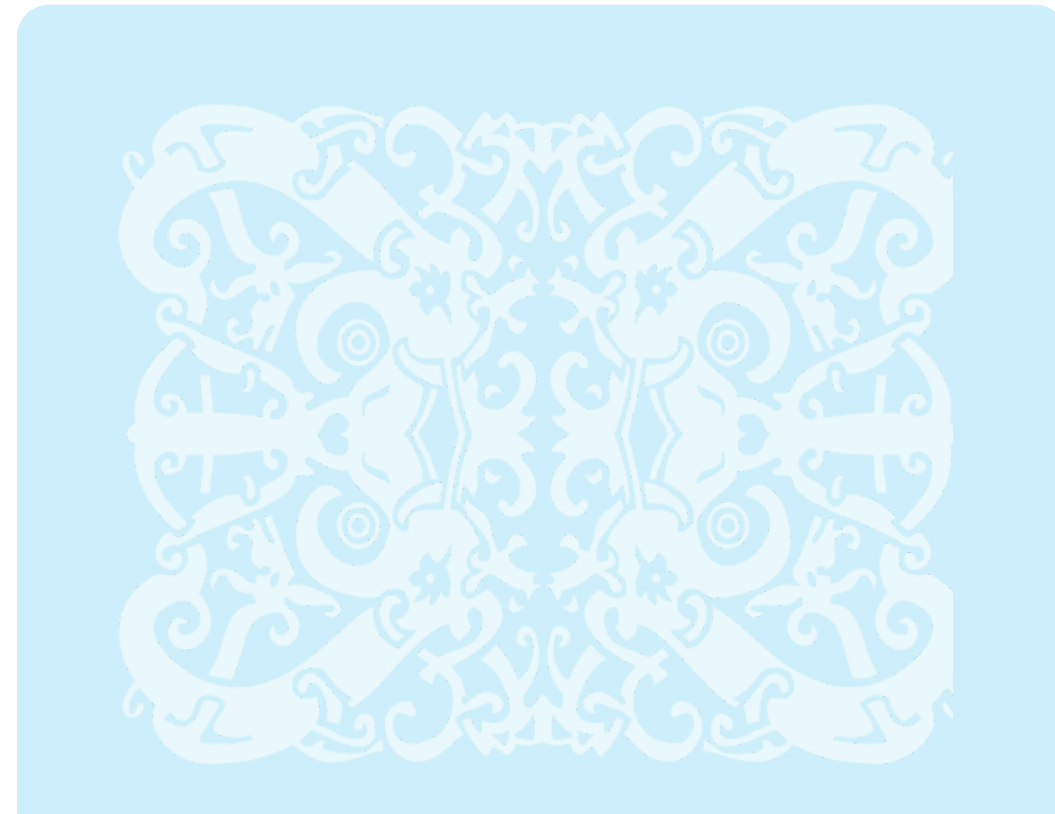
Gambar 52. Capaian ICLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2022



Gambar 54. Capaian ICLH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2022



Gambar 53. Capaian ICLH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022



Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dan perhitungan status mutu air tahun 2022 pada aplikasi IKLH Nasional, terdapat 203 titik pantau kualitas air di DAS Barito dan 93 titik pantau kualitas air di DAS Mahakam. Di DAS Barito, dari 203 titik pantau tersebut terdapat 10 titik dengan status cemar sedang (kelas air II), sedangkan di DAS Mahakam, dari 77 titik pantau terdapat 3 titik dengan status cemar sedang. Tidak terdapat titik pantau dengan status cemar berat baik di DAS Barito maupun di DAS Mahakam.

Tabel 24. Status Mutu Air Titik Pantau Kualitas Air DAS Barito dan DAS Mahakam Tahun 2022

| No | DAS/Provinsi       | Status Mutu Air Per Titik Pantau |              |              |             | Jumlah Titik Pantau |
|----|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|
|    |                    | Memenuhi                         | Cemar Ringan | Cemar Sedang | Cemar Berat |                     |
|    | <b>DAS Barito</b>  |                                  |              |              |             |                     |
| 1  | Kalimantan Tengah  | 15                               | 32           | -            | -           | 47                  |
| 2  | Kalimantan Selatan | 20                               | 126          | 10           | -           | 156                 |
|    | <b>Jumlah</b>      | 35                               | 158          | 10           |             | 203                 |
|    | <b>DAS Mahakam</b> |                                  |              |              |             |                     |
| 1  | Kalimantan Timur   | 14                               | 60           | 3            | -           | 77                  |
| 2  | Kalimantan Utara   |                                  |              |              |             | -                   |
|    | <b>Jumlah</b>      | 14                               | 60           | 3            | -           | 77                  |

Sumber : Aplikasi IKLH Nasional

Di DAS Barito terdapat 10 titik cemar sedang yang berada di beberapa wilayah, yaitu 6 titik berada di Kota Banjarmasin, 1 titik di wilayah Kabupaten Banjar dan 3 titik di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan di DAS Mahakam 3 titik pantau cemar sedang berada di Kota Samarinda.

Tabel 25. Titik Pantau Kualitas Air Cemar Sedang DAS Barito dan DAS Mahakam Tahun 2022

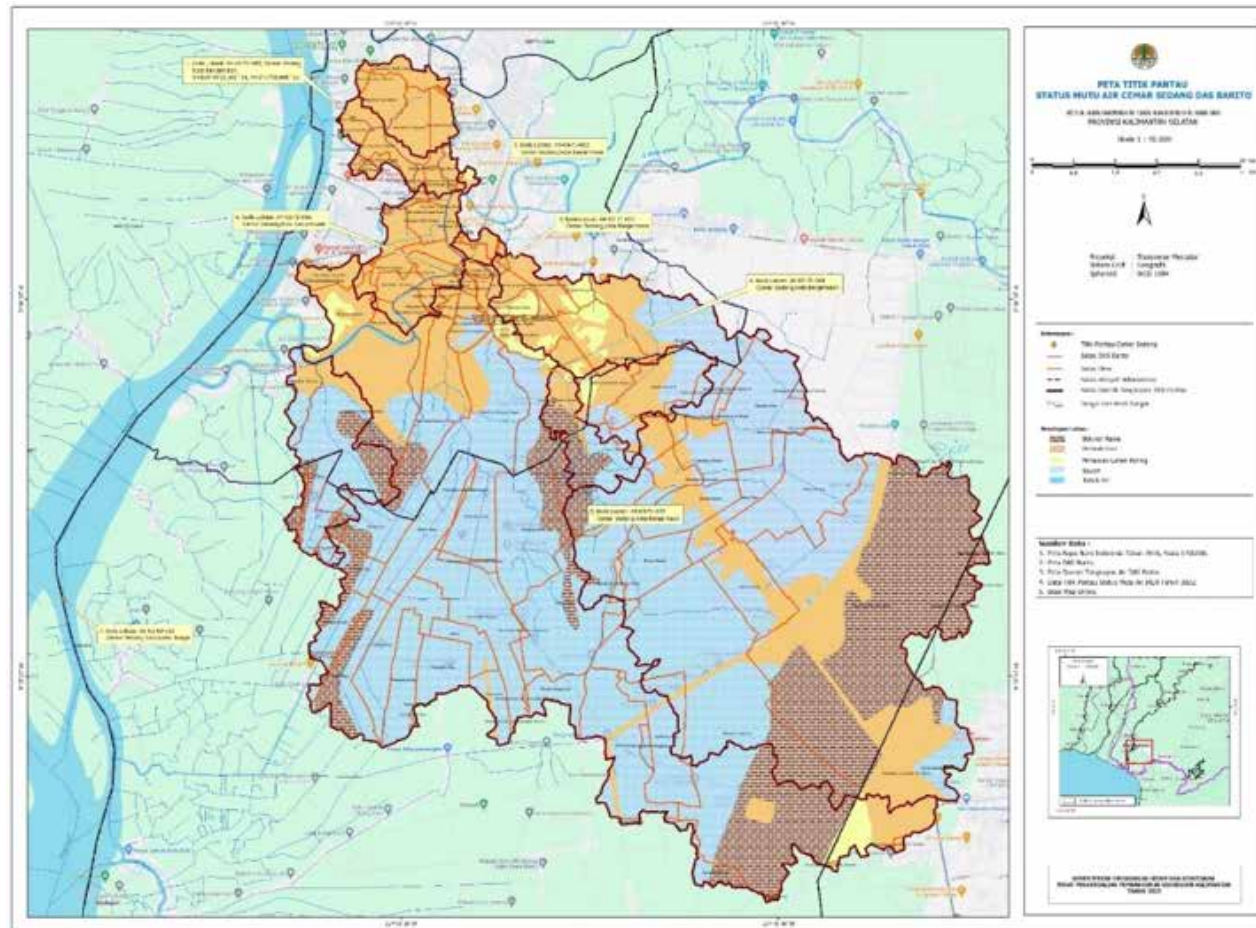
| No | Kode Lokasi  | Lokasi                 | Kab/Kota         | Titik Koordinat |          | Status Mutu  |
|----|--------------|------------------------|------------------|-----------------|----------|--------------|
|    |              |                        |                  | X               | Y        |              |
| 1  | A4-KS-71-003 | Pemurus, Pemurus Hulu  | Kota Banjarmasin | 114,62164       | -3,35916 | Cemar Sedang |
| 2  | A4-KS-71-004 | Pemurus, Pemurus Hilir | Kota Banjarmasin | 114,61672       | -3,34907 | Cemar Sedang |

|    |              |  |                  |            |           |              |
|----|--------------|--|------------------|------------|-----------|--------------|
| 3  | A4-KS-71-001 | Pekapuran,<br>Pekapuran Hulu   | Kota Banjarmasin | 114,603244 | -3,3281   | Cemar Sedang |
| 4  | A4-KS-71-002 | Pekapuran,<br>Pekapuran Hilir  | Kota Banjarmasin | 114,59883  | -3,32492  | Cemar Sedang |
| 5  | A4-KS-71-007 | Antasan Kecil,<br>Sungai Antasan<br>Kecil Hulu,<br>Jagabaya                      | Kota Banjarmasin | 114,572567 | -3,29361  | Cemar Sedang |
| 6  | A4-KS-71-016 | Kelayan, Kelayan<br>Hilir  | Kota Banjarmasin | 114,594861 | -3,327944 | Cemar Sedang |
| 7  | A3-KS-07-002 | Barabai, Desa<br>Pagat - HST   | Kab. HST         | 115,41928  | -2,621963 | Cemar Sedang |
| 8  | A3-KS-07-003 | Barabai, Desa<br>Pakujungan - HST  | Kab. HST         | 115,354552 | -2,600925 | Cemar Sedang |
| 9  | A3-KS-07-004 | Barabai, Desa<br>Kasarangan - HST  | Kab. HST         | 115,295527 | -2,620777 | Cemar Sedang |
| 10 | A1-KS-03-002 | Barito, Barito Pulau<br>Kaget/Titik Hilir<br>BRT 12 Desa Podok<br>Kec. Aluh-aluh | Kab. Banjar      | 114,508667 | -3,399694 | Cemar Sedang |
| 11 | A4-KI-72-004 | Karang Mumus,<br>Jembatan 1  | Kota Samarinda   | 117.1568   | -0.50824  | Cemar Sedang |
| 12 | A4-KI-72-005 | Karang Asam<br>Kecil, Hulu, Jalan<br>Juanda 2                                    | Kota Samarinda   | 117.1323   | -0.48075  | Cemar Sedang |
| 13 | A4-KI-72-007 | Karang Mumus,<br>Jembatan<br>S.Parman  | Kota Samarinda   | 117.1507   | -0.47652  | Cemar Sedang |

Sumber : Aplikasi IKLH Nasional

Identifikasi dan analisis parameter kunci berdasarkan hasil uji pemantauan parameter kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air sesuai kelas air sungai yang ditetapkan. Baku mutu parameter kualitas air pada aplikasi IKLH dipilih menggunakan kelas air II, karena belum ada penetapan kelas air sungai baik pada Sungai Barito maupun Sungai Mahakam. Parameter kualitas air yang melebihi baku mutu sesuai kelas air sungai pada setiap periode pemantauan menjadi parameter kunci pencemaran air.

Penentuan parameter kunci pencemar kualitas air dilakukan dengan mempertimbangkan tutupan lahan pada Daerah Tangkapan Air (DTA) titik pantau cemar sedang, parameter kualitas air yang melebihi baku mutu kelas II, serta aktivitas di sekitar DTA, sehingga dapat diperkirakan sumber pencemar yang mempengaruhi kualitas air sungai, khususnya kualitas air pada titik pantau tersebut. Pembuatan Peta DTA dilakukan dengan menggunakan Software GIS. Data yang digunakan adalah Data Digital Elevation Model (DEM), Peta Profil DAS dan koordinat titik pantau kualitas air.



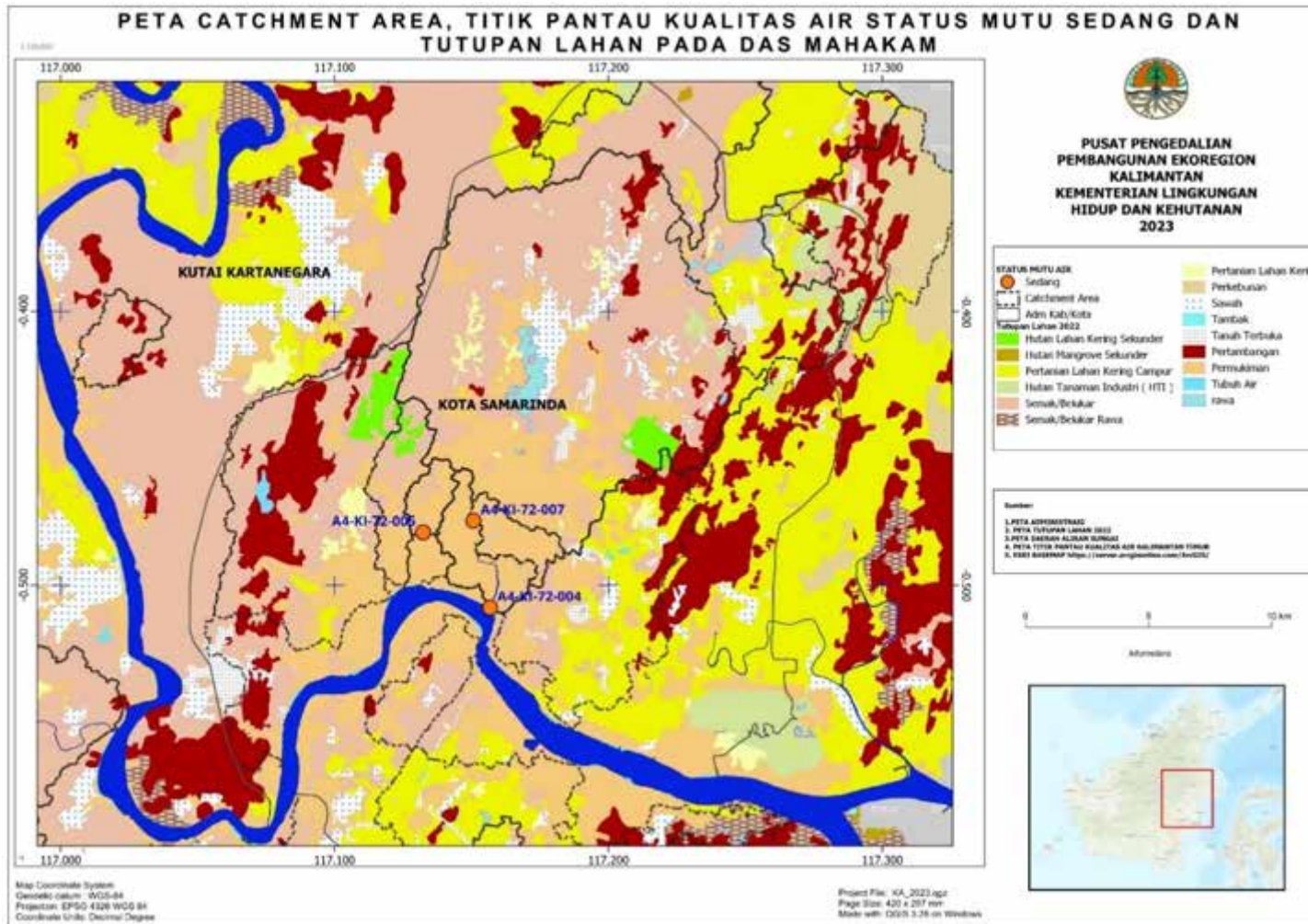
Gambar 55. Peta Tutupan Lahan dan DTA Titik Pantau Cemar Sedang Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar

Tabel 26. Tabel Hasil Identifikasi Parameter Kunci dan Sumber Pencemar pada Titik Pantau Cemar Sedang DAS Barito Di Kota Banjarmasin Tahun 2022

| No | Titik Pantau                           | Status Mutu Air (Kelas 2) | Parameter Melebihi Baku Mutu                           | Tutupan Lahan DTA   | Sumber Pencemar                        |
|----|--|---------------------------|--|---|--|
| 1  | Pekapuran Hulu<br>(A4-KS-71-001)       | Cemar Sedang              | BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Nitrit, Mangan | Permukiman/lahan terbangun, Sawah, Pertanian lahan kering, Semak belukar rawa | Limbah domestik, Pertanian, Peternakan |
| 2  | Pekapuran Hilir<br>(A4-KS-71-002)      | Cemar Sedang              | BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Ferrum, Mangan | Permukiman/lahan terbangun  | Limbah domestik                        |
| 3  | Pemurus Hulu<br>(A4-KS-71-003)         | Cemar Sedang              | Total Fosfat, Fecal Coliform, Ferrum, Mangan           | Semak belukar rawa, Sawah, Permukiman/lahan terbangun                         | Limbah domestik, Pertanian             |
| 4  | Pemurus Hilir<br>(A4-KS-71-004)        | Cemar Sedang              | BOD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Ferrum              | Permukiman/lahan terbangun, Sawah Semak belukar rawa, Pertanian lahan kering  | Limbah domestik, Pertanian             |
| 5  | Sungai Jagabaya<br>(A4-KS-71-007)      | Cemar Sedang              | BOD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Ferrum, Mangan      | Permukiman/lahan terbangun  | Limbah domestik                        |
| 6  | Sungai Kelayan Hilir<br>(A4-KS-71-016) | Cemar Sedang              | BOD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Ferrum, Mangan      | Sawah, Permukiman/lahan terbangun, Semak belukar rawa                         | Limbah domestik, Pertanian             |

Di Kota Banjarmasin parameter kualitas air yang melebihi baku mutu adalah BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Nitrit, Ferrum dan Mangan. Tutupan lahan utama pada daerah tangkapan air (DTA) titik pantau cemar sedang tersebut adalah permukiman/lahan terbangun, pertanian lahan kering, sawah, dan semak belukar rawa. Dengan mempertimbangkan lokasi titik pantau, parameter kunci pencemar kualitas air (parameter melebihi baku mutu air) dan tutupan lahan pada DTA titik pantau tersebut, dapat diperkirakan sumber pencemar utama di Kota Banjarmasin adalah limbah domestik dan limbah dari aktivitas pertanian.



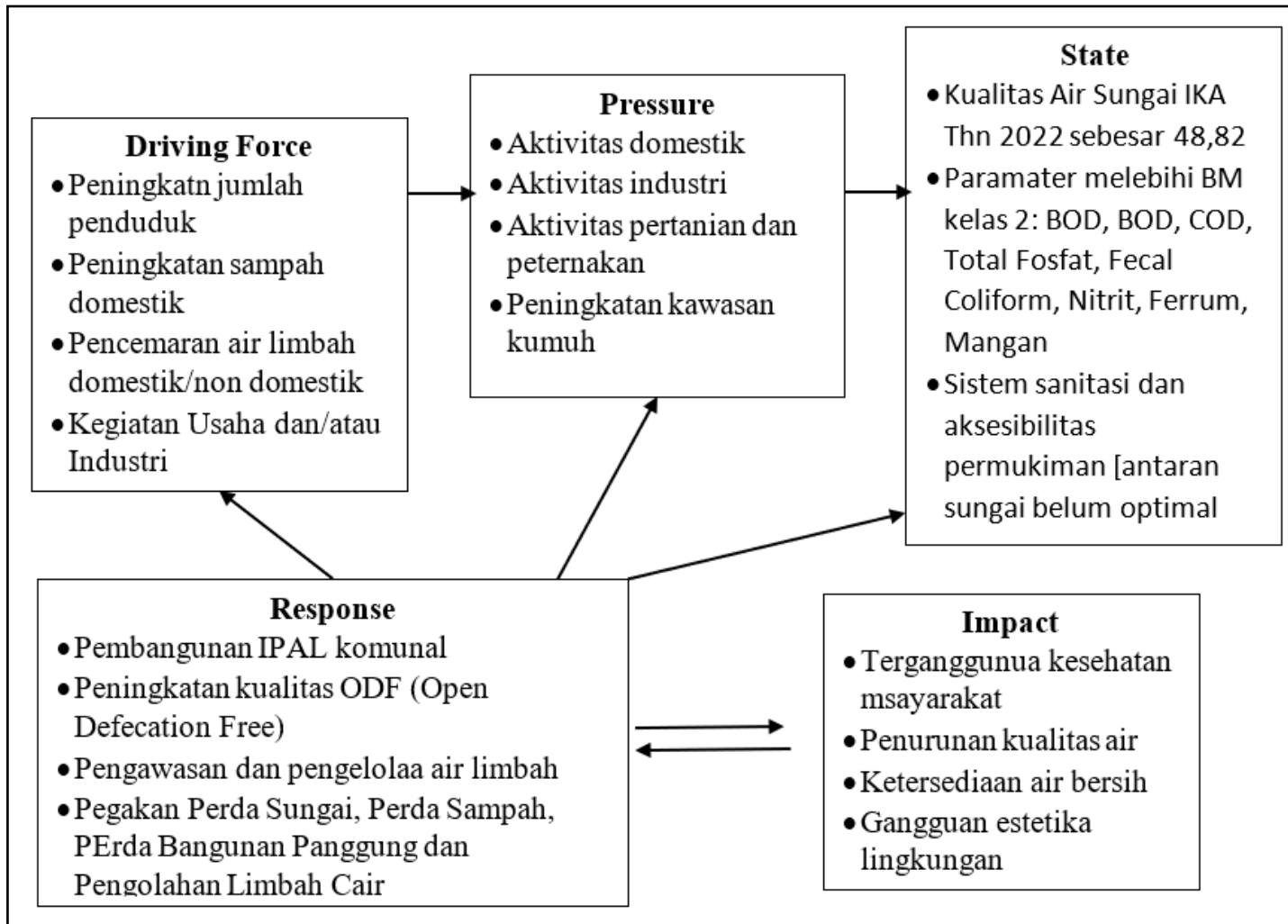


Gambar 56. Peta Tutupan Lahan dan DTA Titik Pantau Cemar Sedang Kota Samarinda

Tabel 27. Tabel Hasil Identifikasi Parameter Kunci dan Sumber Pencemar pada Titik Pantau Cemar Sedang DAS Mahakam di Kota Samarinda Tahun 2022

| No | Titik Pantau  | Status Mutu Air (Kelas 2) | Parameter Melebihi Baku Mutu                     | Tutupan Lahan DTA          | Sumber Pencemar |
|----|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------|
| 1  | Karang Mumus Jembatan 1<br>(A4-KI-72-004)               | Cemar Sedang              | BOD, COD, TSS, Fecal Coliform, Nitrit, Amoniak   | Permukiman/lahan terbangun | Limbah domestik |
| 2  | Karang Asam Kecil Hulu Jalan Juanda 2<br>(A4-KI-72-005) | Cemar Sedang              | BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Amoniak. | Permukiman/lahan terbangun | Limbah domestik |
| 3  | Karang Mumus Jembatan S. Perman<br>(A4-KI-72-007)       | Cemar Sedang              | BOD, COD, TSS, Fecal Coliform, Nitrit, Amoniak   | Permukiman/lahan terbangun | Limbah domestik |

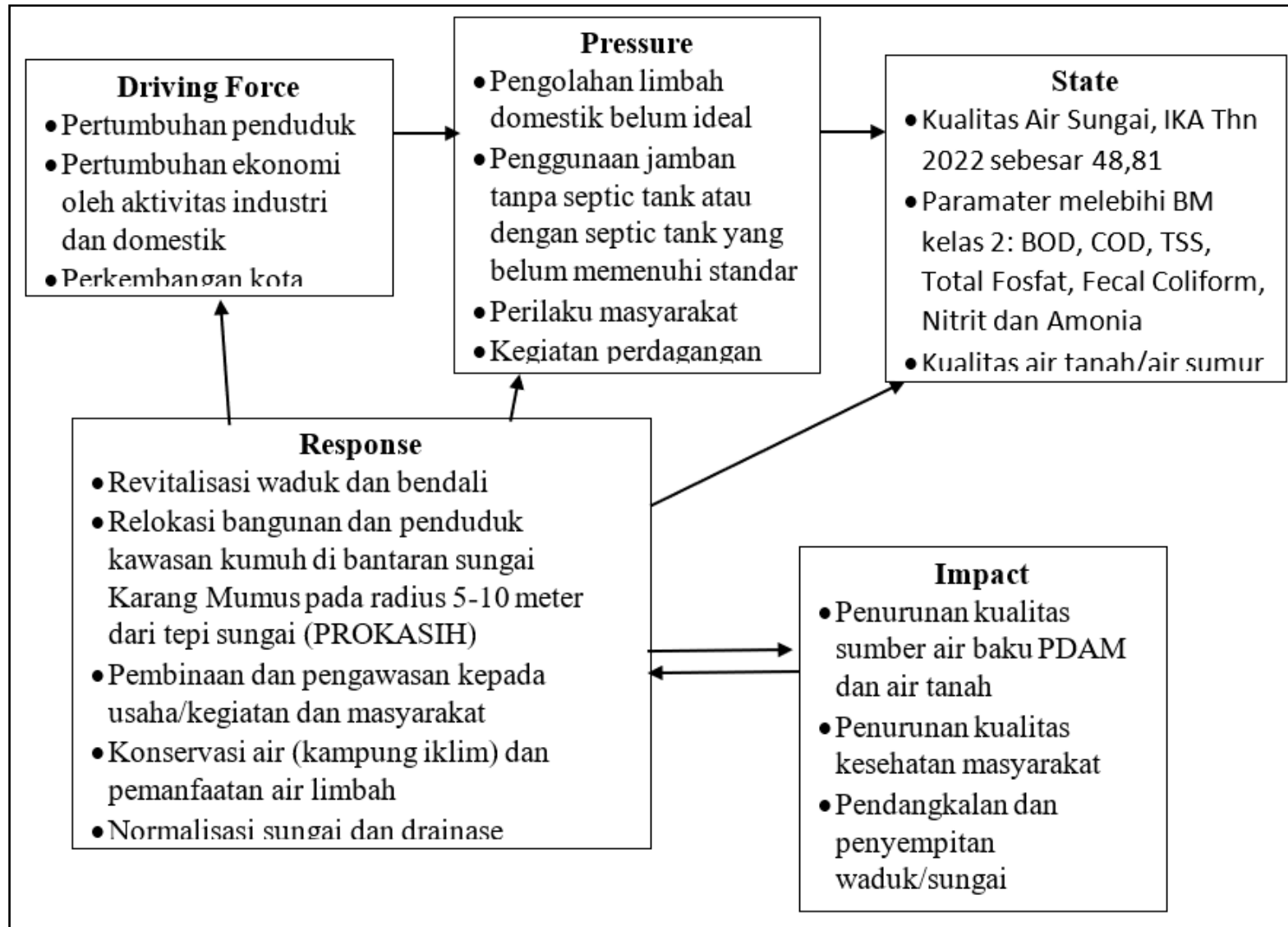
Parameter kualitas air yang melebihi baku mutu di Kota Samarinda adalah BOD, COD, TSS, Total Fosfat, Fecal Coliform, Nitrit dan Amoniak. Tutupan lahan utama pada daerah tangkapan air (DTA) titik pantau cemar sedang tersebut adalah permukiman/lahan terbangun. Berdasarkan lokasi titik pantau, parameter kunci pencemar kualitas air dan tutupan lahan pada DTA titik pantau tersebut dapat diperkirakan sumber pencemar utama di Kota Samarinda adalah limbah domestik dan limbah dari usaha/kegiatan di sekitar permukiman.



Gambar 57. Kerangka Analisis DPSIR Kualitas Air Kota Banjarmasin

Tabel 28. Analisis DPSIR Pengendalian Pencemara Air Kota Banjarmasin

| Driver  | Pressure  | State   | Impact   | Response   |
|---|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah penduduk</li> <li>• Peningkatan sampah rumah tangga/ domestik</li> <li>• Pencemaran air limbah domestik/non domestik</li> <li>• Peningkatan usaha/ kegiatan komersil di sekitar sungai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas domestik</li> <li>• Aktivitas industri</li> <li>• Aktivitas pertanian dan peternakan</li> <li>• Peningkatan kawasan kumuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Banjarmasin tahun 2022 sebesar 48,82</li> <li>• Parameter melebihi BM kelas 2: BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coliform, Nitrit, Ferrum, Mangan</li> <li>• Sistem sanitasi dan aksesibilitas permukiman bantaran sungai yg belum optimal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terganggunya kesehatan masyarakat</li> <li>• Penurunan kualitas air</li> <li>• Ketersediaan air bersih</li> <li>• Gangguan estetika lingkungan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan IPAL komunal</li> <li>• Peningkatan kualitas ODF (Open Defecation Free)</li> <li>• Pengawasan dan pengelolaan air limbah oleh pelaku industri dan Rumah Sakit</li> <li>• Penegakan Perda Sungai, Perda Sampah, Perda Bangunan Panggung dan Pengolahan Limbah Cair</li> <li>• Program Maharagu Sungai atau masyarakat menjaga sungai (sanitasi, persampahan, kebersihan, kelayakan sungai menjadi sumber kehidupan)</li> <li>• Program Kotaku perbaikan fasilitas kawasan dan penataan kawasan bantaran/ sempadan sungai</li> <li>• Gerakan Masyarakat Seratus Ribu Bawah Barumahan Barasih Sampah (GERMAS 100.000 B' Babasah)</li> <li>• Penataan kawasan bantaran muara Sungai Kelayan</li> <li>• Pengaturan tentang Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai (Perda Kota Banjarmasin No.31 Tahun 2012)</li> </ul> |



Gambar 58. Analisis DPSIR Kota Samarinda

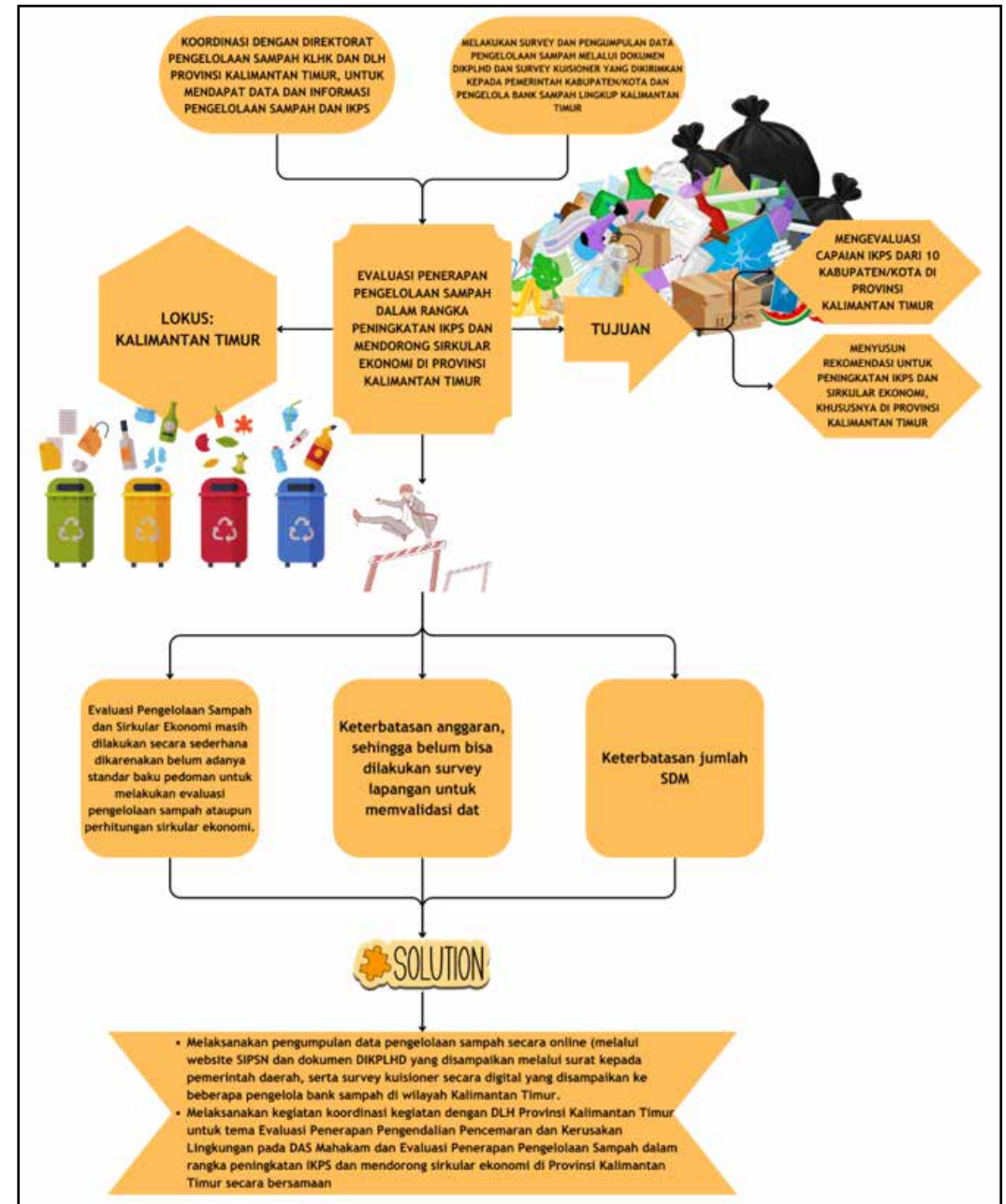
Tabel 29. Analisis DPSIR Pengendalian Pencemaran Air Kota Samarinda

| Driver  | Pressure  | State  | Impact   | Response   |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi oleh aktivitas industri dan domestik</li> <li>• Perkembangan kota (belum tersedianya saluran khusus pembuangan air limbah, dan belum ada pengolahan air limbah (grey water)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan limbah domestik belum ideal</li> <li>• Penggunaan jamban tanpa septic tank atau dengan septic tank yang belum memenuhi standar</li> <li>• Perilaku masyarakat</li> <li>• Kegiatan perdagangan dan jasa (perekonomian)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Samarinda tahun 2022 sebesar 45,81</li> <li>• Parameter melebihi BM (Kelas 2): BOD, COD, TSS, Total Fosfat, Fecal Coliform, Nitrit, Amoniak.</li> <li>• Kualitas air bawah tanah/ air sumur</li> <li>• Kualitas air limbah (domestik, usaha dan industri)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kualitas kesehatan masyarakat</li> <li>• Penurunan kualitas sumber air baku PDAM dan air tanah</li> <li>• Pendangkalan dan penyempitan waduk/ sungai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revitalisasi waduk dan bendali</li> <li>• Relokasi bangunan dan penduduk kawasan kumuh di bantaran sungai Karang Mumus pd radius 5-20 meter dari tepi sungai.(PROKASIH)</li> <li>• Revitalisasi fungsi taman untuk meningkatkan RTH</li> <li>• Pembinaan dan pengawasan kepada kegiatan/usaha dan masyarakat</li> <li>• Konservasi air (kampung iklim) dan pemanfaatan air limbah</li> <li>• Normalisasi sungai dan drainase</li> <li>• Pembuatan IPAL Komunal</li> <li>• Pembinaan mitra lingkungan (sungai)</li> <li>• Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan (Inovasi Sekolah Adiwiyata)</li> </ul> |

Secara umum untuk meningkatkan kualitas air di DAS Barito dan DAS Mahakam, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pengelolaan sampah yang efektif; memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan meningkatkan program daur ulang, pemilahan sampah, dan pengelolaan limbah. Hal ini dapat mencegah sampah masuk ke sungai dan mempengaruhi kualitas air,
2. Penyuluhan dan edukasi masyarakat; melakukan kampanye penyuluhan yang luas tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai, pengelolaan sampah, serta dampak pencemaran terhadap kesehatan dan lingkungan
3. Pengembangan infrastruktur pengolahan limbah; membangun atau meningkatkan sistem pengolahan air limbah kota dengan instalasi pengolahan limbah yang memadai untuk memastikan limbah yang dibuang ke sungai telah diolah dengan baik.
4. Pengendalian limbah industri; melakukan pengawasan dan penataan terhadap pengelolaan limbah industri, menerapkan standar pengelolaan limbah yang ketat serta memperkenalkan insentif bagi industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
5. Pengendalian limbah domestik; pendampingan, pembinaan terhadap masyarakat, sekolah, pelaku UMKM terkait pengelolaan limbah
6. Pemantauan rutin kualitas air; melakukan pemantauan rutin secara berkala dan berkesinambungan terhadap kualitas air sungai untuk memantau perubahan dan dampak dari berbagai kegiatan manusia. Hal ini akan membantu dalam menangani masalah secepat mungkin.
7. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penanaman pohon; mendorong pembangunan lebih banyak ruang terbuka hijau dan penanaman pohon di sekitar sungai. Tumbuhan dapat membantu menyerap polutan dan memperbaiki kualitas air dan kualitas udara.

8. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta; mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan sungai serta melaksanakan program-program pelestarian sungai, seperti PROKASIH.
9. Penegakan hukum; menerapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terkait pencemaran sungai, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai.
10. Penggunaan teknologi hijau; memanfaatkan teknologi inovatif, seperti sistem filtrasi yang ramah lingkungan, untuk membersihkan air sungai dari bahan pencemar.
11. Pengembangan kebijakan lingkungan yang terintegrasi; menyusun kebijakan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk pengelolaan lingkungan, termasuk aspek sungai dan pengelolaan air dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sektor terkait



Gambar 59. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah dalam rangka peningkatan IKPS dan mendorong sirkular ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga lingkup kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan. Secara umum, target dan capaian pengelolaan sampah tahun 2022 berdasarkan dokumen Jakstrada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 30. Target dan Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur

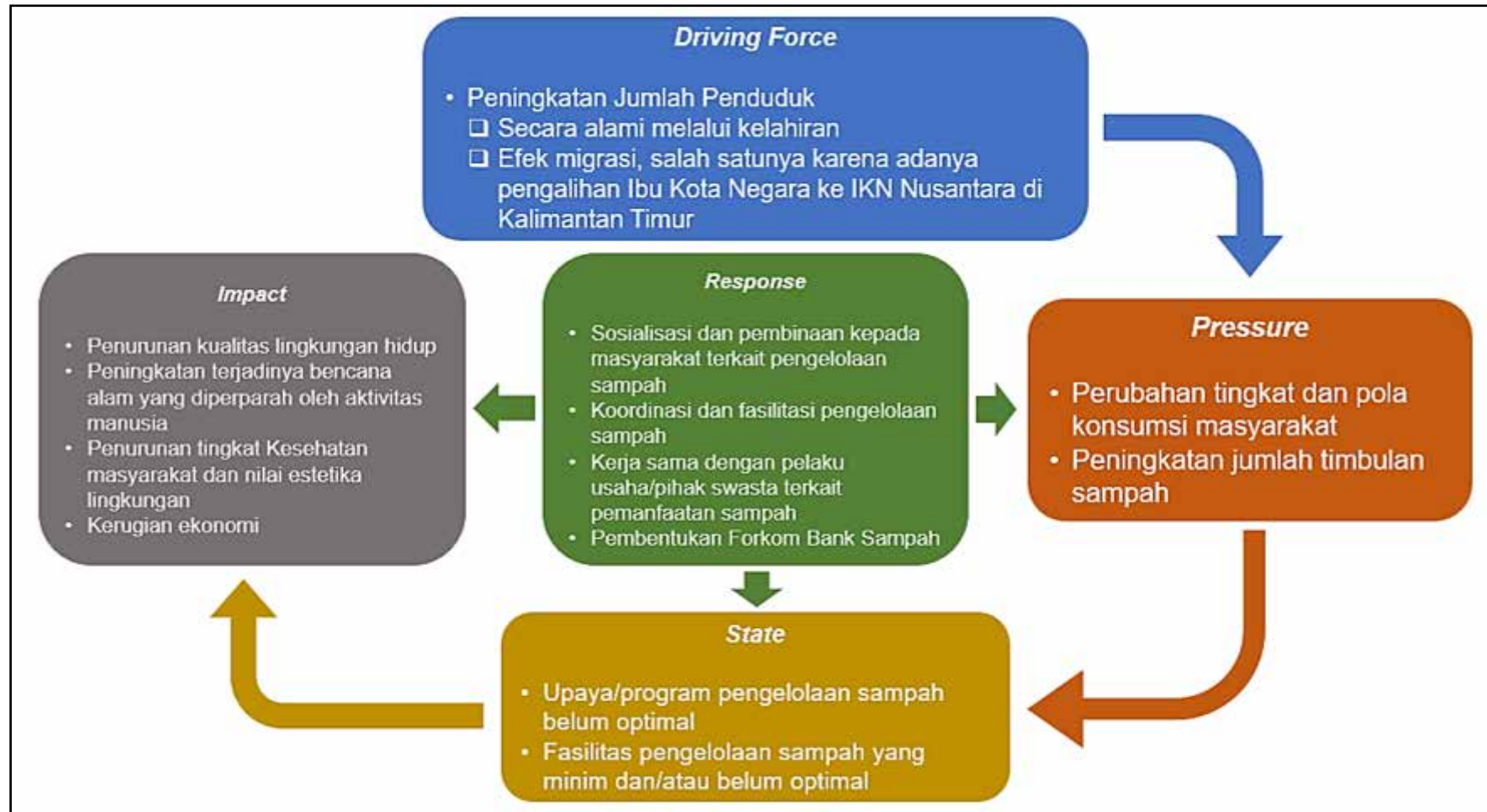
| NO | KABUPATEN/<br>KOTA          | PERENCANAAN       |                              |                             | CAPAIAN                  |                             |       |                            |       | VALID |
|----|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|
|    |                             | TIMBULAN<br>(ton) | TARGET<br>PENGURANGAN<br>(%) | TARGET<br>PENANGANAN<br>(%) | TIMBULAN<br>SAMPAH (ton) | PENGURANGAN<br>SAMPAH (ton) | %     | PENANGANAN<br>SAMPAH (ton) | %     |       |
| 1  | Kab. Berau                  | 60.639,69         | 26,00                        | 73,00                       | 49.801,88                | 9.736,58                    | 19,55 | 24.936,80                  | 50,07 | YA    |
| 2  | Kab. Kutai Barat            | 21,45             | 26,00                        | 73,00                       | 25.639,06                | 0,00                        | 0,00  | 10.482,97                  | 40,89 | YA    |
| 3  | Kab. Kutai<br>Kartanegara   | 114.524,75        | 26,00                        | 73,00                       | 114.524,75               | 18.837,22                   | 16,45 | 80.372,27                  | 70,18 | YA    |
| 4  | Kab. Kutai Timur            | 82.089,95         | 30,00                        | 70,00                       | 77.674,37                | 9.944,70                    | 12,80 | 35.748,10                  | 46,02 | YA    |
| 5  | Kab. Mahakam<br>Ulu         | 493,85            | 26,00                        | 73,00                       | 5.584,64                 | 0,00                        | 0,00  | 1.460,00                   | 26,14 | YA    |
| 6  | Kab. Paser                  | 43.300,97         | 26,00                        | 73,00                       | 43.300,97                | 4.574,67                    | 10,56 | 26.276,86                  | 60,68 | YA    |
| 7  | Kab. Penajam<br>Paser Utara | 40,92             | 26,00                        | 74,00                       | 35.033,98                | 7.891,81                    | 22,53 | 21.429,15                  | 61,17 | YA    |
| 8  | Kota Balikpapan             | 187.875,03        | 26,00                        | 73,00                       | 187.875,03               | 48.848,58                   | 26,00 | 137.337,89                 | 73,10 | YA    |
| 9  | Kota Bontang                | 40.305,70         | 26,00                        | 73,00                       | 38.046,40                | 10.185,67                   | 26,77 | 27.731,41                  | 72,89 | YA    |
| 10 | Kota Samarinda              | 236.426,44        | 26,00                        | 73,00                       | 214.347,89               | 42.046,54                   | 19,62 | 171.784,81                 | 80,14 | YA    |
|    |                             |                   |                              |                             | <b>791.828,97</b>        | <b>152.065,78</b>           |       | <b>537.560,25</b>          |       |       |

Sumber : Website SIPSAN, 2023



Kegiatan pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat secara langsung, sedangkan kegiatan penanganan sampah dilakukan dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota yang telah mencapai target adalah sebagai berikut.

- a. Pengurangan Sampah : Kota Balikpapan dan Kota Bontang (2 dari 10 kabupaten/kota)
- b. Penanganan Sampah : Kota Balikpapan dan Kota Samarinda (2 dari 10 kabupaten/kota)



Sumber : DIKPLHD Provinsi Kalimantan Timur 2023 dan Hasil Analisis P3E Kalimantan

Gambar 60. Diagram Alir Analisis DPSIR Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Berdasarkan Jakstrada

Tabel 31. Nilai IKPS Tahun 2022 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

| No | KABUPATEN/<br>KOTA            | KATEGORI    | INDIKATOR IKPS |       |            |            |                           |                                |                     |                         |              |             | NILAI<br>IKPS |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|-------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------|
|    |                               |             | INPUT (30)     |       |            |            | PROSES (10)               |                                | OUTPUT (40)         |                         | OUTCOME (10) | DAMPAK (10) |               |
|    |                               |             | KEBIJAKAN (15) | SDM ⑤ | SAR-PRAS ⑤ | ANGGARAN ⑤ | SOSIALISASI & PEMAHAMAN ⑤ | ACCEPTABILITY & IMPLEMENTASI ⑤ | CAPAIAN OUTPUT (20) | EFISIENSI ANGGARAN (20) |              |             |               |
| 1  | Kabupaten Berau               | Kota Kecil  | 2,00           | 2,78  | 2,00       | 1,00       | 4,00                      | 1,00                           | 0,83                | 10,00                   | 9,00         | 5,61        | 38,21         |
| 2  | Kabupaten Kutai Barat         | Kota Kecil  | 3,50           | 2,78  | 1,00       | 1,00       | 4,00                      | 1,00                           | -                   | 10,00                   | 3,00         | 6,00        | 32,28         |
| 3  | Kabupaten Kutai Kartanegara   | Kota Kecil  | 4,00           | 2,78  | 4,00       | 5,00       | 4,00                      | 1,00                           | 3,29                | 10,00                   | 3,00         | 5,30        | 42,37         |
| 4  | Kabupaten Kutai Timur         | Kota Kecil  | 7,50           | 2,78  | 1,00       | 1,00       | 4,00                      | 1,00                           | 0,40                | 10,00                   | 3,00         | 5,06        | 35,74         |
| 5  | Kabupaten Mahakam Ulu         | Kota Kecil  | 3,35           | 2,78  | 1,00       | 1,00       | 4,00                      | 1,00                           | -                   | 10,00                   | -            | 5,00        | 28,13         |
| 6  | Kabupaten Paser               | Kota Kecil  | 9,00           | 2,78  | 4,00       | 1,00       | 4,00                      | 1,00                           | 4,91                | 10,00                   | 9,00         | 5,75        | 51,44         |
| 7  | Kabupaten Penajam Paser Utara | Kota Kecil  | 15,00          | 1,00  | 5,00       | 2,00       | 5,00                      | 5,00                           | 13,00               | 1,00                    | 9,00         | 4,83        | 60,83         |
| 8  | Kota Balikpapan               | Kota Besar  | 15,00          | 2,78  | 4,00       | 5,00       | 4,00                      | 5,00                           | 17,98               | 10,00                   | 10,00        | 5,00        | 78,76         |
| 9  | Kota Bontang                  | Kota Sedang | 11,00          | 2,78  | 5,00       | 5,00       | 4,00                      | 5,00                           | 18,58               | 10,00                   | 10,00        | 6,00        | 77,36         |
| 10 | Kota Samarinda                | Kota Besar  | 15,00          | 2,78  | 5,00       | 4,00       | 4,00                      | 1,00                           | 20,00               | 10,00                   | 8,00         | 4,58        | 74,36         |

Sumber : Ditjen PSLB3 KLHK, 2023

Secara umum, kinerja pengelolaan sampah tahun 2022 berdasarkan nilai IKPS masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur di atas adalah sebagai berikut.

- Untuk indikator SDM, Sosialisasi dan Pemahaman, Efisiensi Anggaran, serta Dampak, ketercapaiannya cukup baik (di atas 50% dari nilai maksimum);
- Untuk indikator Kebijakan, Sarana dan Prasarana, Anggaran, Acceptability dan Implementasi, Output, serta Outcome, ketercapaiannya masih rendah (banyak yang masih mendapatkan nilai minimum).

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020—2024, target IKPS untuk tahun 2022 adalah 65 poin. Secara umum, ketercapaian nilai IKPS kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 32. Status Ketercapaian Nilai IKPS Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| Kabupaten/Kota                | Kategori Kota | Nilai IKPS Tahun 2022 | Nilai Target IKPS 2022 sesuai Target IKU | Status         |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|
| Kabupaten Berau               | Kota Kecil    | 38,21                 | 65                                       | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Kutai Barat         | Kota Kecil    | 32,28                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Kutai Kartanegara   | Kota Kecil    | 42,37                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Kutai Timur         | Kota Kecil    | 35,74                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Mahakam Ulu         | Kota Kecil    | 28,13                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Paser               | Kota Kecil    | 51,44                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kabupaten Penajam Paser Utara | Kota Kecil    | 60,83                 |  | Tidak Memenuhi |
| Kota Balikpapan               | Kota Besar    | 78,76                 |  | Memenuhi       |
| Kota Bontang                  | Kota Sedang   | 77,36                 |  | Memenuhi       |
| Kota Samarinda                | Kota Besar    | 74,36                 |  | Memenuhi       |

Berdasarkan tabel di atas, hanya 30% (3 dari 10) kabupaten/kota yang mencapai target IKPS tahun 2022.

Berdasarkan nilai IKPS yang dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur serta komponen-komponen penilaian di atas, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota dalam meningkatkan nilai IKPS adalah sebagai berikut.

Untuk indikator kebijakan, pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat menyusun kebijakan dan/atau peraturan terkait pengelolaan sampah:

- a. Visi dan/atau misi yang mencantumkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah;
  - Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;

- Peraturan Bupati/Walikota terkait pengurangan sampah;
  - Peraturan Bupati/Walikota terkait penanganan sampah; dan/atau
  - Peraturan Bupati/Walikota terkait pembatasan sampah.
- b. Untuk indikator Sarana dan Prasarana, DLH kabupaten/kota yang bersangkutan dapat melakukan perhitungan kembali proyeksi jumlah timbulan sampah yang akan ditangani per harinya, kemudian menyesuaikan jumlah dan kapasitas sarana angkut dan fasilitas pengolahan sampah per harinya agar rasionya dapat mencapai lebih dari 0,5.
- c. Untuk indikator Anggaran, pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat menyusun kembali jumlah total anggaran pengelolaan sampah dari total APBD rasionya dapat mencapai lebih dari 2%.
- d. Untuk indikator Acceptability dan Implementasi, DLH kabupaten/kota yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal berikut:
- Menghitung kembali kebutuhan bank sampah dan/atau TPS 3R per desa/kelurahan;
  - Mendata ulang bank sampah dan/atau TPS 3R eksisting per desa/kelurahan;
  - Melakukan pembinaan terhadap bank sampah dan/atau TPS 3R yang ada, tetapi sudah tidak aktif; serta
  - Merencanakan penambahan bank sampah dan/atau TPS 3R di desa/kelurahan yang belum memilikinya yang ditunjang dengan sosialisasi dan pembinaan, baik terhadap calon pengurus maupun masyarakat sebagai calon nasabah.
- e. Untuk indikator Output, pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk DLH kabupaten/kota yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal berikut:
- Melakukan perhitungan kembali proyeksi timbulan sampah yang harus ditangani per harinya;
  - Melakukan perhitungan kembali proyeksi total kapasitas operasional dan masa layan setiap fasilitas pengelolaan sampah eksisting;
  - Menambah fasilitas pengelolaan sampah yang dinilai dibutuhkan untuk meningkatkan persentase pengurangan dan penanganan sampah; dan
  - Bagi kabupaten/kota yang memiliki TPA eksisting dengan sistem pengelolaan sampah open dumping, dapat ditingkatkan menjadi sistem controlled landfill dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai aspek dan spesifikasi untuk TPA controlled landfill;
- f. Untuk indikator Outcome, pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam mencapai Kota Bersih dan mendapatkan penghargaan Adipura. Persyaratan dan hal-hal terkait Adipura dapat dilihat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura.

Berdasarkan pengumpulan data dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

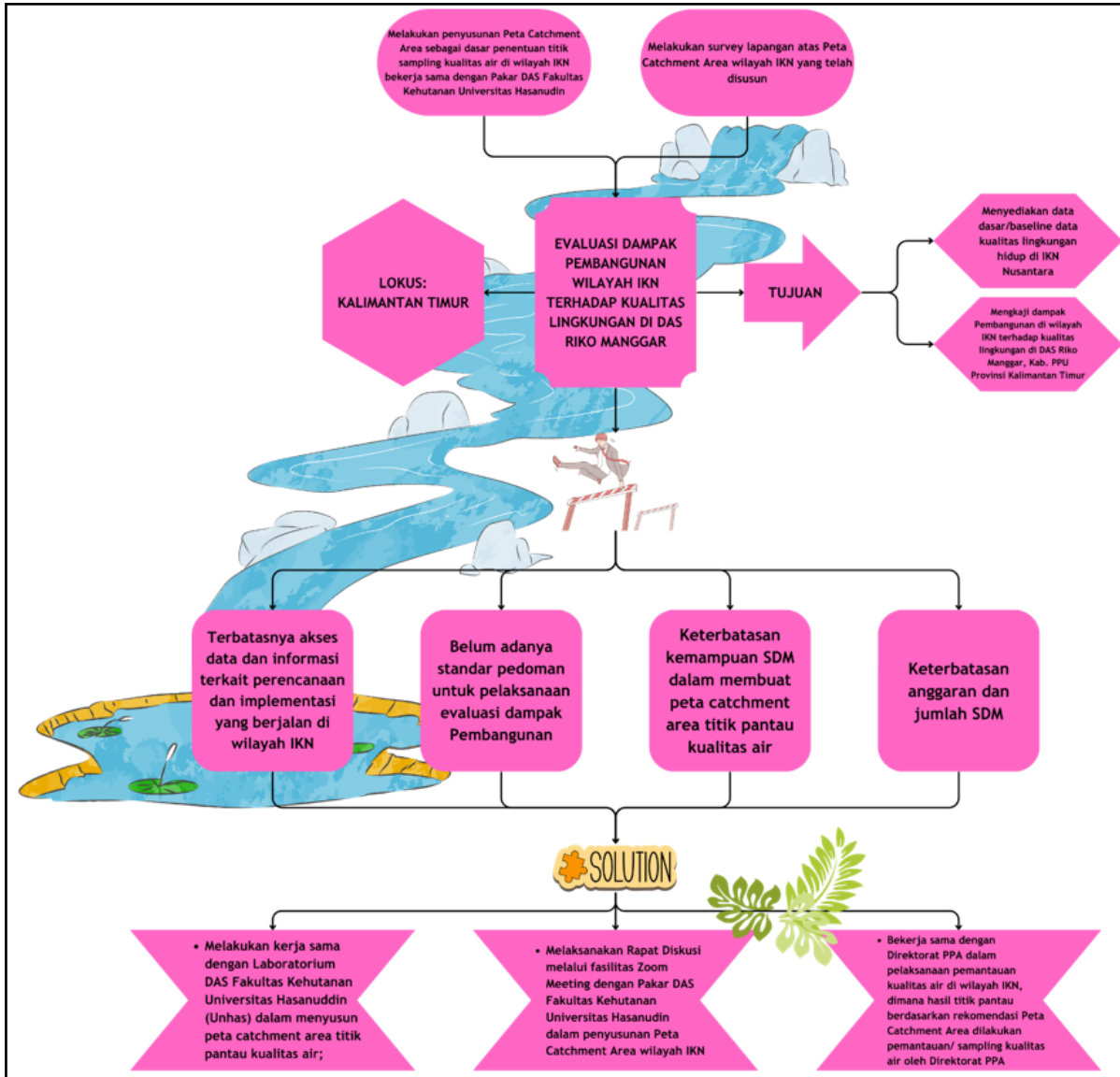
1. Target pengurangan dan target penanganan sampah berdasarkan Jakstrada kabupaten/kota tahun 2022 hanya dapat dicapai oleh masing-masing 2 dari 10 kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Bontang untuk pengurangan sampah serta Kota Balikpapan dan Kota Samarinda untuk penanganan sampah;
2. Ketidaktercapaian target pengurangan dan penanganan sampah dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah timbulan, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah yang tidak ditunjang dengan sistem pengelolaan sampah yang baik;

3. Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang sangat minim sehingga target pengurangan dan penanganan sampah menjadi tidak tercapai dan mendapatkan nilai persentase ketercapaian paling rendah daripada kabupaten/kota lainnya. Di sisi lain, Kota Balikpapan memiliki beragam fasilitas pengelolaan sampah sehingga mampu mencapai target pengurangan dan target penanganan sampah tahun 2022;
4. Sebanyak 10 dari 18 TPA di Provinsi Kalimantan Timur masih menerapkan sistem pengelolaan sampah secara open dumping yang tentu mengurangi nilai estetika serta berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan jika dibiarkan dalam waktu yang lama;
5. Secara umum, hanya 30% (3 dari 10) kabupaten/kota yang mencapai target IKPS tahun 2022 sebesar 65 poin sesuai Renstra KLHK 2020—2024. Kinerja pengelolaan sampah tahun 2022 berdasarkan nilai IKPS masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk indikator SDM, Sosialisasi dan Pemahaman, Efisiensi Anggaran, serta Dampak, ketercapaiannya cukup baik (di atas 50% dari nilai maksimum);
  - b. Untuk indikator Kebijakan, Sarana dan Prasarana, Anggaran, Acceptability dan Implementasi, Output, serta Outcome, ketercapaiannya masih rendah (banyak yang masih mendapatkan nilai minimum).
6. Omzet total yang dihasilkan dari total 287 unit bank sampah unit (BSU) dan bank sampah induk (BSI) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 adalah senilai Rp440.148.831 dengan total sampah yang terkelola melalui bank sampah sebesar 70,57% atau sebanyak 13.841,09 ton/tahun dari total sampah yang masuk ke bank sampah sebesar 19.614,65 ton/tahun;
7. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi bank sampah, khususnya bank sampah unit (BSU), di Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan operasionalnya sebagai berikut:
  - a. Harga per jenis sampah tidak stabil dan cenderung menurun;
  - b. Nilai tukar sampah dinilai tidak sepadan dengan biaya operasional bank sampah;
  - c. Jumlah anggota pengurus bank sampah dinilai tidak sebanding dengan sampah yang harus dikelola, yang diperburuk dengan anggota yang tidak rutin hadir selama bank sampah beroperasi serta kemampuan dan pemahaman yang minim tentang pengelolaan sampah;
  - d. Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memilah sampah masih rendah (dengan rendahnya nilai tukar sampah, terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk membuang langsung atau membakar sampahnya);
  - e. Anggaran, sarana dan prasarana, serta pemasaran dan penjualan sampah masih terbatas sehingga menghambat kegiatan operasional bank sampah;
  - f. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait bank sampah dan pengelolaan sampah masih minim dan tidak merata;
  - g. Dukungan dari pemerintah daerah dirasa masih minim.
8. Terdapat 2 (dua) kota di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki TPA dengan sistem pengolahan sampah sanitary landfill yang menghasilkan gas metan. Dengan tarif rata-rata listrik untuk pemakaian rumah tangga tahun 2022 adalah sebesar Rp1.528,09/kWh dan jumlah energi listrik yang dapat dimanfaatkan dari TPA adalah sebesar 3,52 MW atau sebesar 3.520 kW selama 1 (satu) tahun pada tahun 2022, maka penghematan biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan oleh masyarakat sebesar Rp46.473.495,55 atau sebesar Rp3.872.791,3 per bulannya; serta
9. Pengisian data di website SIPSN masih belum maksimal sehingga data yang diperoleh masih kurang representatif.

Berdasarkan kesimpulan di atas dan agar penerapan pengelolaan sampah di Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan, rekomendasi tindak lanjut yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota)
  - a. Menyusun kebijakan dan/atau peraturan terkait pengelolaan sampah yang belum dimiliki:
    - Visi dan/atau misi yang mencantumkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pengelolaan sampah dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
    - Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah;
    - Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
    - Peraturan Bupati/Walikota terkait pengurangan sampah;
    - Peraturan Bupati/Walikota terkait penanganan sampah; dan/atau
    - Peraturan Bupati/Walikota terkait pembatasan sampah
  - b. Menyusun kembali jumlah total anggaran pengelolaan sampah dari total APBD;
  - c. Melakukan perhitungan dan pendataan kembali terkait:
    - Proyeksi jumlah timbulan sampah yang akan ditangani per hari;
    - Kapasitas sarana angkut dan fasilitas pengolahan sampah yang dibutuhkan sesuai proyeksi timbulan sampah per hari;
    - Jumlah dan jenis kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah, seperti:
      - Bank sampah unit (BSU) dan/atau bank sampah induk (BSI);
      - Fasilitas komposting;
      - Fasilitas produk kreatif (daur ulang);
      - Sektor informal (pengepul);
      - Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan/atau
      - Tempat Pemrosesan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), Pusat Daur Ulang (PDU), dan Intermediate Treatment Facility (ITF).
    - Jumlah, distribusi per wilayah, kapasitas, serta masa layan setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada dan aktif saat ini;
  - d. Merencanakan optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah yang sudah ada, baik dengan penambahan kapasitas maupun modifikasi sistem;
  - e. Merencanakan penambahan jumlah dan/atau jenis fasilitas pengelolaan sampah yang dirasa dibutuhkan untuk meningkatkan persentase pengurangan dan penanganan sampah;
  - f. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait:
    - Pengelolaan sampah, seperti pengurangan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang sampah yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat;
    - Urgensi pengelolaan sampah dari sumbernya;

- Dampak tidak terkelolanya sampah
  - g. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pengurus bank sampah, baik yang aktif maupun yang tidak aktif;
  - h. Menggalakkan kewajiban pengelolaan sampah terhadap pelaku usaha, dapat dilakukan dengan pemberian insentif (reward) dan disinsentif (punishment);
  - i. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar-OPD terkait:
    - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang telah direncanakan;
    - Pengusulan pembangunan kemitraan dengan pihak terkait (pemroses sampah, organisasi dan/atau industri pengguna sampah, dsb) yang dapat membantu menciptakan jaringan pemasaran sampah;
    - Penyusunan program/kegiatan untuk mencapai Kota Bersih dan mendapatkan Penghargaan Adipura.
  - j. Menjaring ide dan inovasi dari berbagai pihak (masyarakat, akademisi, organisasi/LSM, pelaku usaha) terkait pendauran ulang sampah atau kegiatan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah dari sampah melalui forum, workshop, lokakarya, dsb; serta
  - k. Melakukan optimalisasi pengisian data ke website SIPSN melalui kerja sama dengan pihak pengelola sampah non-pemerintah (bank sampah, pengepul, dsb), dapat dilakukan dengan pemberian insentif (reward) agar para pengelola sampah lebih bersemangat memberikan datanya.
2. Pelaku usaha
- a. Mengurangi jumlah timbulan sampah semaksimal mungkin;
  - b. Mengalokasikan dana CSR untuk pengelolaan sampah; serta
  - c. Mendukung dan menerapkan peraturan/kebijakan terkait pengelolaan sampah yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah.
3. Pengelola sampah non-pemerintah
- a. Mendukung dan menerapkan peraturan/kebijakan terkait pengelolaan sampah yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah;
  - b. Proaktif dalam memberikan data terkait pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah (DLH); serta
  - c. Turut berkontribusi dalam memberikan ide dan inovasi terkait pendauran ulang sampah atau kegiatan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.
4. Masyarakat
- a. Mengurangi jumlah timbulan sampah semaksimal mungkin;
  - b. Mulai mengubah paradigma dan pola pengelolaan sampah dari sumbernya;
  - c. Memahami urgensi serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah; serta
  - d. Mendukung dan menerapkan peraturan/kebijakan terkait pengelolaan sampah yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah.



Gambar 61. Alur Pelaksanaan Sub Komponen Evaluasi Dampak Pembangunan wilayah IKN terhadap kualitas lingkungan di DAS Riko Manggar.



Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2019. IKN akan dipindahkan dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, yaitu berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada proses perencanaan awal, delineasi IKN meliputi wilayah seluas 180.965 hektar. Namun dalam perkembangannya, luas delineasi IKN mengalami perubahan, berdasarkan hasil kesepakatan antara Kementerian/Lembaga terkait, luas delineasi IKN mengalami penambahan menjadi 256.142,74 hektar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara terdiri atas:

- a. Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN); merupakan Kawasan Perkotaan inti dari KSN Ibu Kota Nusantara yang mencakup juga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan total luas 56.178 Ha.
- b. Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN); adalah kawasan di sekitar KIKN yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan, pendukung ketahanan pangan, Cadangan lahan perluasan perkotaan, dan pelayanan perkotaan skala local, dengan total luas 199.965 Ha.



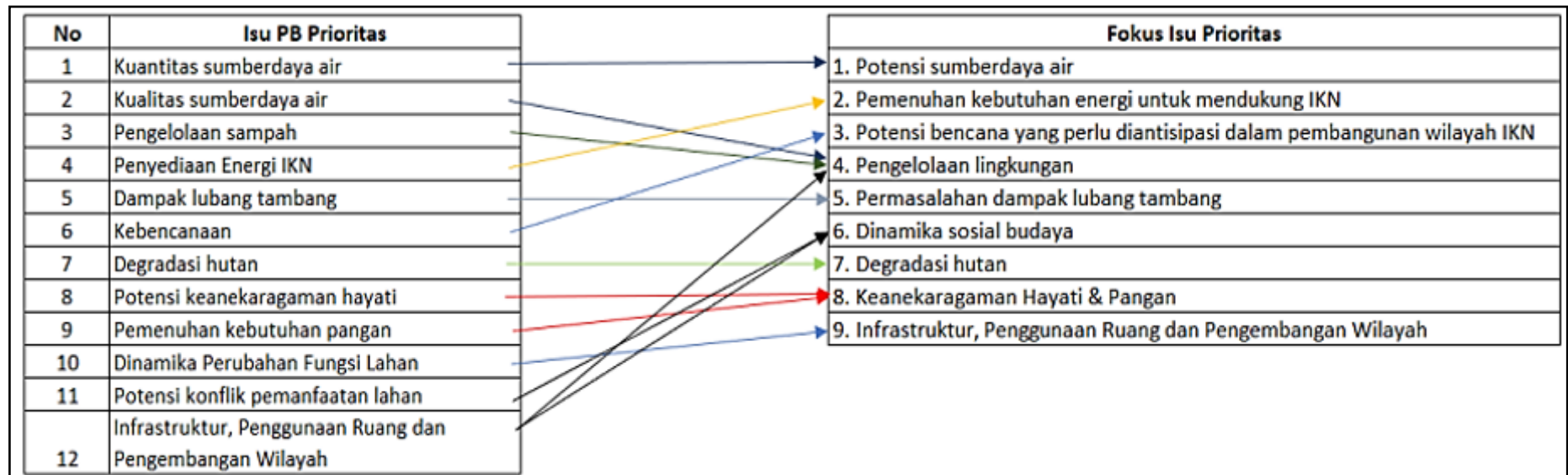
Untuk memastikan pengembangan IKN merupakan kota yang dikembangkan secara berkelanjutan, maka diamanatkan strategi penetapan alokasi Ruang Kawasan Lindung termasuk RTH publik paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari wilayah IKN yang mendukung perwujudan kota hutan (forest city), dengan strategi antara lain:

- menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung;
- melakukan rehabilitasi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto;
- melakukan rehabilitasi dan reboisasi Kawasan pascatambang;
- melestarikan dan menciptakan koridor satwa liar sebagai konektivitas habitat satwa yang selaras dengan pembangunan;
- melakukan penghijauan daerah tangkapan air; dan
- melakukan pemulihan ekosistem mangrove.

Dalam perkembangan pelaksanaan Pembangunan IKN, telah dilakukan penjaringan isu Pembangunan Berkelanjutan yang

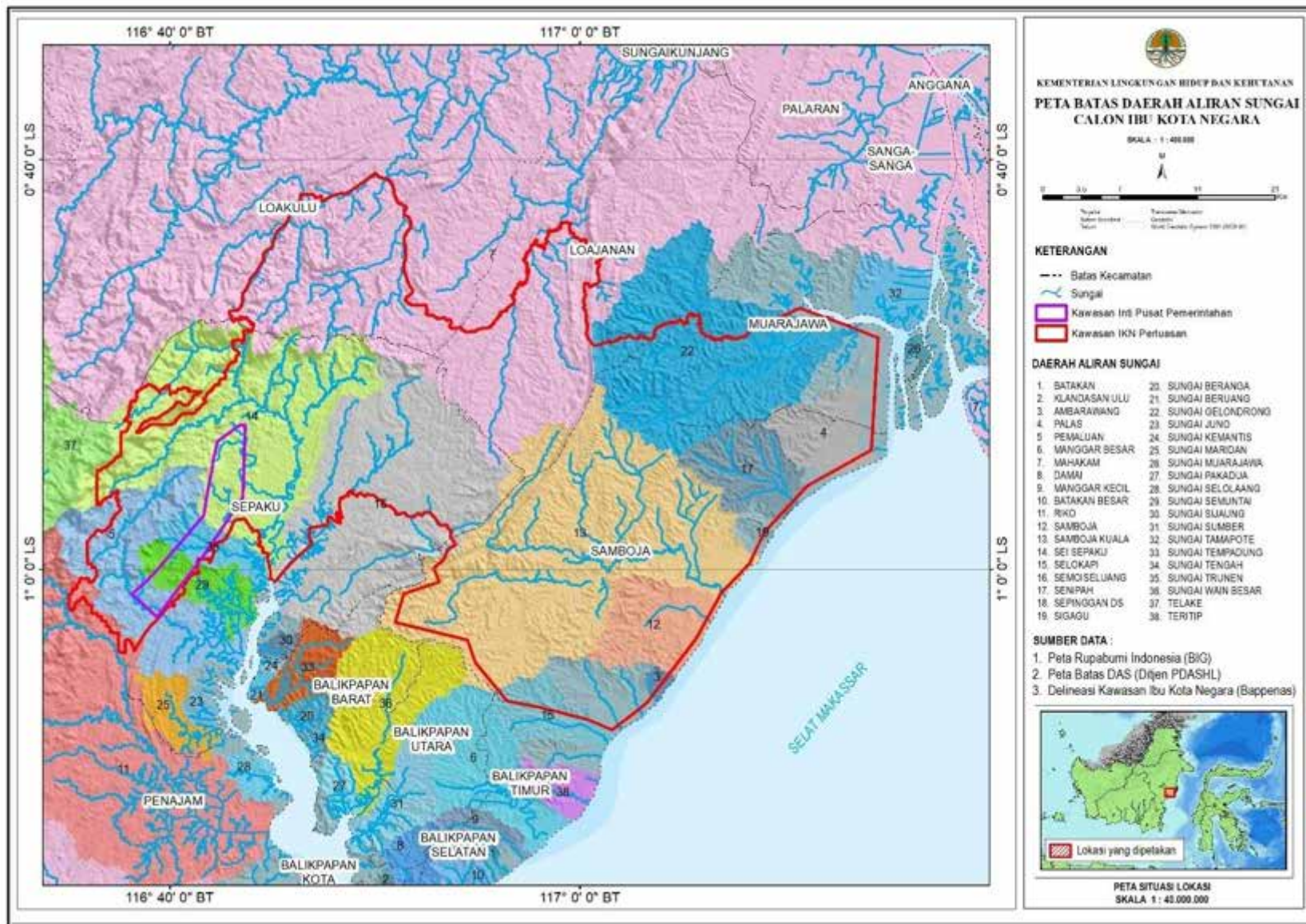
telah dilakukan beberapa kali oleh Bappenas dan KLHK dengan Kementerian lintas sektor lainnya, pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelibatan para akademisi dan FGD pakar. Berdasarkan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Bappenas pada tahun 2020, didapat 9 isu pembangunan berkelanjutan prioritas, yang meliputi:

- Potensi sumberdaya air
- Pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung IKN
- Potensi bencana yang perlu diantisipasi dalam pembangunan wilayah IKN
- Pengelolaan lingkungan
- Permasalahan dampak lubang tambang
- Dinamika sosial budaya
- Degradasi hutan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati
- Ketahanan Pangan
- Infrastruktur, Penggunaan Ruang dan Pengembangan Wilayah



Sumber: KLHS Masterplan Ibu Kota Negara, Bappenas (2020)

Gambar 62. Proses Penentuan Isu PB Prioritas



Gambar 63. Peta Batas Daerah Aliran Sungai Calon Ibu Kota Negara

Isu lingkungan strategis di wilayah IKN salah satunya adalah kualitas dan kuantitas air. Berdasarkan data dari BBWS Kalimantan III (2019), kondisi debit maksimum ( $Q_{max}$ ) dan debit minimum ( $Q_{min}$ ) dan debit rata ( $Q_{av}$ ) sungai-sungai yang terdapat di dalam dan sekitar calon wilayah IKN dapat dilihat pada tabel di bawah. Dapat dilihat bahwa debit sungai maksimum pada tahun 2017/2018 lebih kecil dibandingkan debit sungai pada tahun 2006, sebaliknya debit sungai minum pada tahun 2018 lebih besar dari pada debit minimum pada tahun 2006. Meskipun terlihat penurunan debit air, namun jika dihitung koefisien regim sungainya (KRS) yaitu perbandingan antara debit maksimum dengan debit minimum ( $Q_{max}/Q_{min}$ ), maka akan terlihat bahwa KRS-nya masih dibawah 50, dimana dikategorikan baik.

Tabel 33. Kondisi debit maksimum ( $Q_{max}$ ) dan debit minimum ( $Q_{min}$ ) dan debit rata ( $Q_{av}$ ) sungai-sungai yang terdapat di dalam dan sekitar calon wilayah IKN

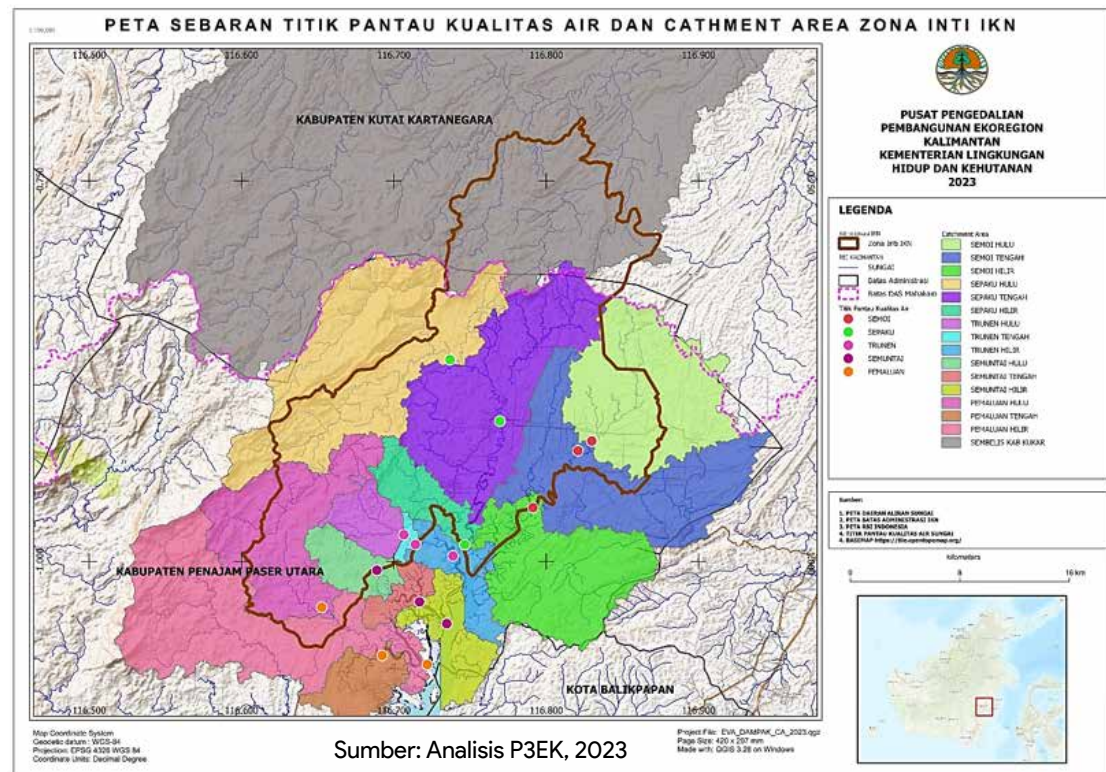
| No  | Nama Sungai | Tahun | $Q_{max}$ (m <sup>3</sup> /detik) | $Q_{min}$ (m <sup>3</sup> /detik) | $Q_{av}$ (m <sup>3</sup> /detik) |
|-----|-------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Mahakam     | 2006  | 22,72                             | 1,15                              | 10,10                            |
|     |             | 2018  | 10,90                             | 2,97                              | 5,77                             |
| 2.  | Dondang     | 2006  | 16,06                             | 0,82                              | 7,14                             |
|     |             | 2017  | 7,71                              | 2,08                              | 4,08                             |
| 3.  | Telakai     | 2007  | 61,35                             | 3,12                              | 27,27                            |
|     |             | 2017  | 29,44                             | 7,96                              | 15,59                            |
| 4.  | Sanggai     | 2006  | 69,38                             | 3,53                              | 30,84                            |
|     |             | 2017  | 33,30                             | 9,00                              | 17,63                            |
| 5.  | Semboja     | 2006  | 126,71                            | 6,44                              | 56,32                            |
|     |             | 2018  | 60,81                             | 16,44                             | 32,21                            |
| 6.  | Wain        | 2006  | 6,18                              | 0,31                              | 2,75                             |
|     |             | 2018  | 2,97                              | 0,80                              | 1,57                             |
| 7.  | Maridan     | 2006  | 8,57                              | 0,44                              | 3,81                             |
|     |             | 2017  | 4,11                              | 1,11                              | 2,18                             |
| 8.  | Sumbir      | 2006  | 25,38                             | 1,29                              | 11,28                            |
|     |             | 2018  | 12,18                             | 3,29                              | 6,45                             |
| 9.  | Manggar     | 2006  | 5,51                              | 0,28                              | 2,45                             |
|     |             | 2018  | 2,64                              | 0,71                              | 1,40                             |
| 10. | Ajiraden    | 2006  | 8,79                              | 0,45                              | 3,91                             |
|     |             | 2018  | 4,22                              | 1,14                              | 2,31                             |
| 11. | Riko        | 2006  | 37,25                             | 1,89                              | 16,56                            |
|     |             | 2018  | 17,88                             | 4,83                              | 9,47                             |
| 12. | Tunan       | 2006  | 28,33                             | 1,44                              | 12,59                            |
|     |             | 2018  | 13,60                             | 3,67                              | 7,20                             |

Pada dasarnya, wilayah IKN saat ini mengalami permasalahan ketersediaan air baku. Hal ini dikarenakan kualitas air yang tidak memadai. Ketersediaan air dan sistem irigasi juga sangat berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian, terutama tanaman pangan (per pertanian lahan basah). Berdasarkan informasi Status Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyedia Air Nasional, dapat terlihat bahwa ketersediaan air di wilayah IKN belum terlampaui, namun di beberapa wilayah pendukung IKN beberapa wilayah menunjukkan status Terlampaui.

Tabel 34. Ketersediaan Air di Wilayah IKN

| Wilayah                | Ketersediaan Air (M <sup>3</sup> /Thn) | Kebutuhan Air Domestik (M <sup>3</sup> /Thn) | Kebutuhan Air pada Lahan (M <sup>3</sup> /Thn) | Kebutuhan Total (M <sup>3</sup> /Tahun) | Ambang Batas (Jiwa) | Belum Terlampaui |       | Terlampaui |      |
|------------------------|--|--|--|---|---------------------|------------------|-------|------------|------|
|                        |  |  |  |   |                     | Luas (Ha)        | %     | Luas (Ha)  | %    |
| Wilayah Kajian IKN     | 129.773.306.025                        | 298.441.670                                  | 12.146.633.828                                 | 12.445.075.498                          | 81.108.316          | 11.883.981       | 98.21 | 217.153    | 1.79 |
| Wilayah perluas-an IKN | 1.614.460.045                          | 8.118.576                                    | 266.664.416                                    | 274.782.992                             | 1.009.038           | 180.749          | 99.88 | 216        | 0.12 |

Untuk memastikan dan memantau kualitas air di wilayah IKN, diperlukan pemantauan secara kontinyu untuk menghasilkan data secara series. Kendalanya adalah sampai tahun 2022 belum ada titik pemantauan kualitas air yang dilakukan di wilayah IKN. Untuk itu KLHK pada tahun 2023 melakukan pemantauan pada 15 titik di wilayah IKN. Sebagai dasar penentuan titik sampel pemantauan kualitas air ini didasarkan pada penyusunan daerah tangkapan air (catchment area) di wilayah IKN dimana wilayah IKN membelah di 15 wilayah DAS di kabupaten PPU, dengan persebaran titik meliputi : 3 titik di wilayah DAS Sepaku, 3 titik di wilayah DAS Semoi, 3 titik di wilayah DAS Semuntai, 3 titik di wilayah DAS Trunen, dan 3 titik di wilayah DAS Pemaluan, seperti terlihat pada gambar.



Gambar 64. Peta Sebaran Titik Pantau Kualitas Air dan Catchment Area Zona Inti IKN

Tabel 35. Titik Pantau Kualitas Air di Wilayah IKN

| Kode         | Sungai | Lokasi   | Kabupaten                     | KELAS 2 | STATUS 2     | Parameter Sumber Pencemar                                       |
|--------------|--------|--|-------------------------------|---------|--------------|---|
| A3-KI-06-001 | SEPAKU | TITIK NURSERY SURING PPU                         | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,79    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Temperatur Air, Belerang, Warna, Cd                    |
| A3-KI-06-002 | SEPAKU | TITIK JEMBATAN SEI SEPAKU                        | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,03    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Temperatur Air, Belerang, Warna, Cd                    |
| A1-KI-06-001 | SEMOI  | Semai Tengah, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,45    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli, Temperatur Air, Minyak Lemak |
| A1-KI-06-002 | SEMOI  | Semai hulu, Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku     | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,65    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Total Fosfat, Fecal Coli, Temperatur Air, Minyak Lemak |
| A1-KI-06-003 | SEMOI  | Semai hilir, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku     | Kabupaten Penajam Paser Utara | 4,93    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Total Fosfat, Temperatur Air, Minyak Lemak             |
| A1-KI-06-004 | TRUNEN | Trunen Hulu, Desa BUMI HARAPAN, Kecamatan SEPAKU | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,53    | CEMAR RINGAN | BOD, COD, DO, Fecal Coli, Temperatur Air, TDS, Sulfat, Nitrit   |

| Kode         | Sungai    | Lokasi   | Kabupaten                     | KELAS 2 | STATUS 2     | Parameter Sumber Pencemar   |
|--------------|-----------|--|-------------------------------|---------|--------------|---|
| A1-KI-06-005 | TRUNEN    | Trunen Tengah, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU   | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,68    | CEMAR RINGAN | BOD, COD, DO, Fecal Coli, Temperatur Air, TDS, Sulfat, Nitrit                   |
| A1-KI-06-006 | TRUNEN    | Trunen Hilir, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU    | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,75    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Fecal Coli, Temperatur Air, TDS, Sulfat                                |
| A1-KI-06-007 | SEPAKU    | Sepaku hilir, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku    | Kabupaten Penajam Paser Utara | 4,01    | CEMAR RINGAN | BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, Temperatur Air, Minyak Lemak, TDS, Sulfat   |
| A1-KI-06-008 | SEMUN-TAI | Semuntai Hulu, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU   | Kabupaten Penajam Paser Utara | 1,99    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Fecal Coli, Total Coliform, Temperatur Air, Minyak Lemak, TDS, Sulfat  |
| A1-KI-06-009 | SEMUN-TAI | Semuntai Tengah, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,41    | CEMAR RINGAN | BOD, COD, Fecal Coli, Total Coliform, Temperatur Air, Minyak Lemak, TDS, Sulfat |
| A1-KI-06-010 | SEMUN-TAI | Semuntai Hilir, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU  | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,53    | CEMAR RINGAN | BOD, DO, Fecal Coli, Total Coliform, Temperatur Air, Minyak Lemak               |
| A1-KI-06-011 | PEMALU-AN | Pemaluan Tengah, Desa PEMALUAN, Kecamatan SEPAKU | Kabupaten Penajam Paser Utara | 2,75    | CEMAR RINGAN | BOD, COD, DO, Temperatur Air, Minyak Lemak, TDS, Sulfat                         |

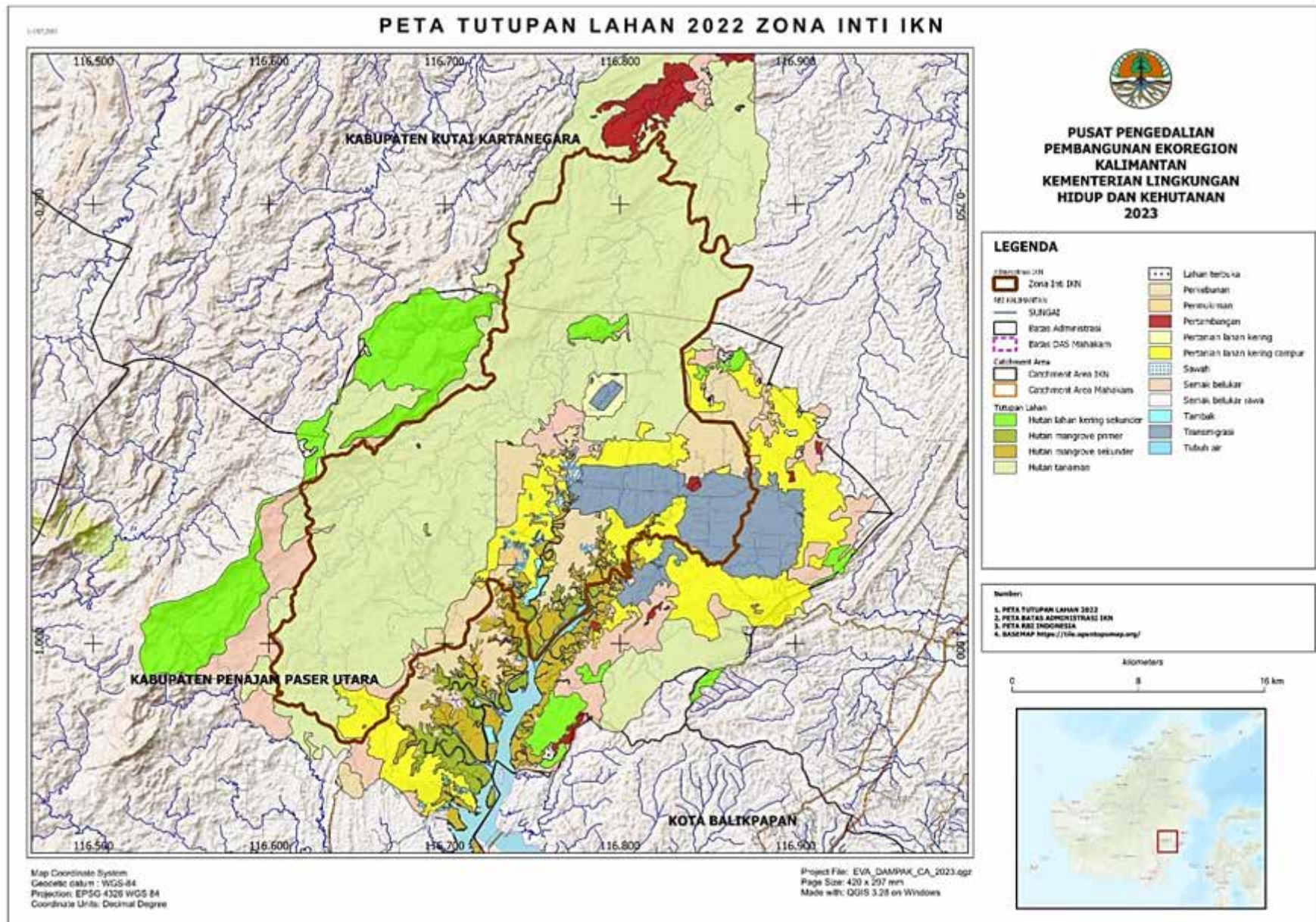
| Kode         | Sungai    | Lokasi  | Kabupaten                           | KELAS 2 | STATUS 2        | Parameter Sumber Pencemar  |
|--------------|-----------|---|-------------------------------------|---------|-----------------|--|
| A1-KI-06-012 | PEMALU-AN | Pemaluan hulu,<br>Desa Pemaluan,<br>Kecamatan Sepaku  | Kabupaten<br>Penajam Paser<br>Utara | 1,98    | CEMAR<br>RINGAN | BOD, DO, Total<br>Fosfat, Total Coliform,<br>Temperatur Air, Minyak<br>Lemak |
| A1-KI-06-013 | PEMALU-AN | Pemaluan hilir,<br>Desa Pemaluan,<br>Kecamatan Sepaku | Kabupaten<br>Penajam Paser<br>Utara | 2,32    | CEMAR<br>RINGAN | BOD, DO, Total Fosfat,<br>Temperatur Air, Minyak<br>Lemak                    |

Sumber : Website IKLH, 2023

Isu mengenai kualitas air juga terkait dengan isu pencemaran air akibat kegiatan pertambangan menjadi hal utama yang muncul karena kegiatan pertambangan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten PPU dan Kutai kartanegara. Selain itu, minimnya sarana perpipaan eksisting untuk mensuplai air bersih kepada masyarakat juga masih minim.

Berdasarkan data pemantauan di atas, beberapa sumber pencemar yang mendominasi melebihi baku mutu diantaranya adalah BOD, COD, DO dan Fecal Coli. Parameter ini menunjukkan pencemaran yang cukup tinggi dari sektor rumah tangga domestik. Beban pencemar BOD dan COD air sungai menunjukkan banyaknya pencemaran organik yang ada di dalam air dimana umumnya bersumber dari limbah rumah tangga seperti limbah black water (kotoran manusia) dan limbah grey water (limbah cair bekas mandi, cuci dan dapur). Faktor yang mempengaruhi kontribusi beban pencemaran dari kegiatan domestik meliputi jumlah penduduk serta jarak antara pemukiman penduduk dengan sungai.

Isu selanjutnya yang terdampak karena pembangunan wilayah IKN adalah adanya perubahan tutupan lahan. Berdasarkan analisis Peta Tutupan Lahan di wilayah IKN yang dikeluarkan oleh KLHK tahun 2022, terlihat bahwa tutupan lahan didominasi oleh wilayah Hutan Tanaman (47,20%), Pertanian Lahan Kering Campur (10,93%), dan Hutan Lahan Kering Sekunder (9,26%) pada tahun 2022. Sedangkan jika diamati analisis perubahan tutupan lahan dari tahun 2017 ke tahun 2022, tutupan lahan Hutan Tanaman, Hutan Lahan Kering Sekunder dan Pertanian Lahan Kering Campur Semak merupakan tutupan lahan yang mengalami kenaikan perubahan paling dominan. Tentunya hal ini dapat berdampak pada penurunan fungsi lingkungan khususnya pada jasa penyedia air, tata aliran air dan pangan di wilayah IKN.



Gambar 65. Peta Tutupan Lahan Zona Inti IKN Tahun 2022



Tabel 36. Tutupan Lahan Wilayah IKN Tahun 2017 dan 2022

| Tutupan Lahan                                      | 2017 (Ha) | 2022 (Ha) | Perubahan (Ha) |
|--|-----------|-----------|----------------|
| Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan       | 861,31    | 10.711,49 | 9.850,18       |
| Hutan mangrove primer                              | 1.596,00  | 2.089,42  | 493,42         |
| Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan           | 5.833,58  | 5.074,32  | - 759,26       |
| Hutan tanaman                                      | 14.163,03 | 54.568,49 | 40.405,46      |
| Lahan terbuka                                      | 13.830,14 | 484,50    | - 13.345,64    |
| Perkebunan / Kebun                                 | 10.373,02 | 8.105,95  | - 2.267,08     |
| Permukiman / Lahan terbangun                       | 751,90    | 415,20    | - 336,70       |
| Pertambangan                                       | 171,71    | 2.070,55  | 1.898,85       |
| Pertanian lahan kering                             | 79,27     | 439,38    | 360,11         |
| Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur | 8.946,73  | 12.631,33 | 3.684,60       |
| Sawah  | 262,95    | 270,17    | 7,22           |
| Semak belukar                                      | 45.067,83 | 9.873,55  | - 35.194,28    |
| Semak belukar rawa                                 | 193,71    | 325,85    | 132,14         |
| Tambak   | 297,77    | 290,20    | - 7,57         |
| Transmigrasi                                       | 11.359,40 | 7.239,51  | - 4.119,88     |
| Tubuh air  | 2.510,45  | 1.025,20  | - 1.485,24     |

Sumber: Analisis P3EK, 2023

Arahan penggunaan ruang juga harus memperhatikan penutup lahan eksisting untuk menghindari dampak terhadap lingkungan akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan yang tidak sedikit. Tabel di bawah ini merupakan analisis dampak perubahan tutupan lahan dalam wilayah IKN.

Tabel 37. Analisis dampak perubahan tutupan lahan dalam wilayah IKN

| No | Penutup Lahan  | Dampak dan Resiko   |
|----|--|---|
| 1  | <b>Hutan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hutan Sekunder</li> <li>● Hutan Mangrove Primer</li> <li>● Hutan Mangrove Sekunder</li> <li>● Hutan Rawa Sekunder Hutan Tanaman</li> </ul> | Pengembangan IKN pada Kawasan Hutan akan mengganggu ekosistem asli yang telah ada. Artinya akan ada perubahan tatanan kehidupan satwa dan tumbuhan liar. Hal ini memicu konflik antar makhluk hidup karena ruang hidup satwa beralih fungsi menjadi perkotaan. Selain itu, alih fungsi hutan akan mengurangi serapan karbon sehingga meningkatkan perubahan iklim.  |
| 2  | Semak Belukar<br>Semak Belukar/Rawa  | Berdasarkan profil penutup lahan, semak belukar mendominasi wilayah IKN. Artinya terdapat proses suksesi alami yang tidak optimum dari lahan bekas tebangan. Untuk mewujudkan penerapan konsep kota berdimensi hutan, maka daerah semak belukar harus dipertimbangkan untuk dihijaukan kembali dengan tanaman perhutanan. Secara umum, upaya penghijauan ini berdampak baik sebagai perluasan habitat tumbuhan dan satwa liar terutama di daerah yang berdekatan langsung/ sebagai penyangga kawasan lindung atau konservasi. |
| 3  | Tubuh Air  | Proses pembangunan berpotensi mencemari sumber air permukaan terdekat karena pengangkutan material dan penyiapan kondisi tanah (pengurukan). Hal ini berpengaruh pada keberlangsungan satwa dan tumbuhan air.   |

Isu yang terakhir adalah terkait timbulan sampah domestik di sekitar wilayah IKN, menurut analisis dampak dalam Masterplan IKN, kapasitas TPA yang direncanakan pada Feasibility Study (FS) Pemindahan IKN 6.000 m<sup>3</sup>/hari dan jika dibandingkan dengan total timbulan sampah yang mana 100% dari total timbulan sampah tersebut masuk ke TPA, maka kapasitas dari TPA sudah tidak mencukupi. Berdasarkan Masterplan IKN, jumlah timbulan sampah domestik pada masing-masing area di wilayah IKN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38. Timbulan Sampah Domestik di Wilayah IKN

|                | Jumlah Penduduk (jiwa) | Laju Timbulan Sampah (m3/hari) | Timbulan Sampah Domestik (m3/hari) |
|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Zona Inti      | 1.540.165              | 0,003                          | 4.620,53                           |
| Zona Penyangga | 109.835                | 0,003                          | 329,51                             |

Sumber : KLHS Masterplan IKN (Bappenas, 2020)

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan pada masing-masing area di wilayah IKN ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 39. Jumlah kebutuhan sarana prasarana persampahan berdasarkan target penduduk

| Zona           | Jumlah Penduduk | Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (unit) |                   |                |                        |     |                     |
|----------------|-----------------|--|-------------------|----------------|------------------------|-----|---------------------|
|                |                 | Penampung Komunal                              | Komposter Komunal | Alat Pengumpul | Kontainer armroll truk | TPS | Bangunan Daur Ulang |
| Zona Inti      | 862.861         | 7.700  | 15.404            | 2.406          | 290                    | 50  | 513                 |
| Zona Penyangga | 109.835         | 549  | 1.098             | 172            | 21                     | 4   | 37                  |
| Total          |                 | 8.249  | 16.502            | 2.578          | 311                    | 54  | 550                 |

KLHS Masterplan IKN (Bappenas, 2020)

Bentuk pengolahan sampah eksisting di wilayah IKN sebagian besar masih dibakar secara terbuka dan dibuang (open dumping). Pengolahan sampah ini tentu saja berpotensi menghasilkan emisi karbon. Untuk mengatasi dampak berupa peningkatan emisi karbon dari sampah domestik ini maka beberapa Upaya yang perlu dilakukan antara lain :

1. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi/kebijakan pelarangan pembakaran sampah serta tata cara penanganan sampah mulai dari skala rumah tangga hingga penanganan di TPA;
2. Masyarakat lokal juga perlu diberikan sosialisasi dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan sampah di skala rumah tangga dan dampak pembakaran sampah terhadap emisi karbon;
3. Pembentukan Bank-Bank sampah baik di tingkat pemukiman, sekolah maupun perkantoran sehingga dapat mengurangi timbulan sampah aktif di TPA;

4. Mendorong green industry berbasis penanganan sampah di wilayah IKN, produk-produk local yang memanfaatkan sampah Masyarakat dapat dikembangkan.

Sehingga berdasarkan analisis di atas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan wilayah IKN antara lain :

1. Sekitar 0.12% dari luasan calon wilayah IKN perluasan yang memiliki status terlampaui untuk Jasa Lingkungan Penyedia Air. Meskipun demikian, isu kualitas air di wilayah IKN perlu mendapatkan perhatian. Karena berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di 15 titik di wilayah IKN pada tahun 2023 menunjukkan status Tercemar Ringan.
2. Wilayah IKN mencakup area-area konservasi dan kawasan lindung yang dihuni oleh tumbuhan dan satwa liar endemik Kalimantan seperti Bekantan dan Orang Utan. Tentunya dalam pembangunan IKN, isu perlindungan habitat tumbuhan dan satwa liar dan secara umum ekosistem asli, perlu menjadi perhatian karena berfungsi untuk mendukung keberlanjutan jasa ekosistem.
3. Untuk saat ini Bentuk pengolahan sampah eksisting di wilayah IKN khususnya Masyarakat sebagian besar masih dibakar secara terbuka dan dibuang (open dumping). Dengan potensi penambahan jumlah penduduk yang diprediksi sebesar sebanyak 1,6 juta jiwa pada Kawasan inti, dan diluar kawasan inti sebanyak 0,3 juta jiwa, maka sangat diperlukan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai.

Dari evaluasi permasalahan yang timbul akibat pengembangan wilayah IKN, dapat kami sampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pendamping IKN perlu melakukan pemantauan kualitas air secara kontinyu dan penambahan titik-titik sampling kualitas juga diperlukan untuk menghasilkan data secara time series.
2. Perlunya penyusunan Kajian Daya Tampung Beban Pencemar dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di wilayah IKN.
3. Perlunya program-program sosialisasi dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan sampah di skala rumah tangga dan dampak pembakaran sampah terhadap emisi karbon Masyarakat lokal juga perlu diberikan khususnya terhadap Masyarakat lokal;
4. Pembentukan Bank-Bank sampah baik di tingkat pemukiman, sekolah maupun perkantoran sehingga dapat mengurangi timbulan sampah aktif di TPA.



## 2. Analisis Capaian Kerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari capaian kinerja.

Selain dilakukan analisis capaian kinerja juga dilakukan analisis efektivitas pencapaian kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kriteria efektivitas yang digunakan, yaitu :

- Rasio  $> 1$ , berarti ada peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melebihi capaian kinerja tahun sebelumnya;
- Rasio  $= 1$ , berarti efektivitas pencapaian kinerja sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya;
- Rasio  $< 1$ , berarti terjadi penurunan efektivitas pencapaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi fisik (output) dengan realisasi masukan (input) berupa SDM ataupun anggaran. Kriteria efisiensi yang digunakan yaitu :

- Rasio  $\geq 1$ , artinya penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara efisien;
- Rasio  $< 1$ , artinya penggunaan sumber daya kurang efisien, sumber daya yang ada (SDM atau anggaran) belum mampu mendukung capaian kinerja,

### (b1) Efektivitas Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja P3EK tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 secara ringkas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 40. Efektivitas Capaian Kinerja

| Program                               | Capaian Kinerja |        | Rasio | Efektivitas           |
|---------------------------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|
|                                       | 2022            | 2023   |       |                       |
| Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 101,1           | 102,88 | 1,018 | Efektif/<br>Meningkat |

Dari Tabel dapat diketahui rasio efektifitas pencapaian kinerja sebesar 1,018 yang mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja Program P3EK pada tahun 2023 berjalan efektif dan bisa dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja program tahun 2023.

### (b2) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (output) dengan realisasi masukan (input) yang bisa berupa anggaran atau SDM dan atau kedua-duanya. Selanjutnya hasil perbandingan tingkat efisiensi pencapaian kinerja (penggunaan sumber daya) untuk program tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 41. Efisiensi pencapaian kinerja P3E Kalimantan pada Tahun 2023

| Program                               | Capaian Kinerja % | Realisasi Anggaran % | Rasio | Efisiensi             |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|
| Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 102,88            | 99,57                | 1,033 | Efektif/<br>Meningkat |

Dari tabel dapat diketahui rasio efisiensi pencapaian kinerja sebesar 1,033, yang mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja P3EK pada tahun 2023 berjalan secara efisien dan dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya telah sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja tahun 2023

Penghitungan rasio ekonomi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggran belanja dengan rencana anggaran belanja tahun berjalan.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Rencana anggaran belanja}} \times 100\%$$

Untuk tahun 2023 besarnya pagu anggaran P3E Kalimantan adalah sebesar Rp\_13.597.084.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp 13.538.651.508,- sehingga besarnya rasio ekonomi adalah sebesar 99,57% :

$$\text{Rasio Ekonomi P3EK Tahun 2023} = \frac{13.538.651.508}{13.597.084.000} \times 100\% = 99.57\%$$

Sebagai pelaksana kegiatan Dukungan Manajemen, P3EK ingin mencapai satu sasaran Terkendalnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani ditetapkan Indikator Kegiatan sebagai berikut:



Gambar 66. Indikator kinerja kegiatan

Mengacu pada Standarisasi Komponen Output Kegiatan di lingkup Sekretariat Jenderal KLHK menyesuaikan Prioritas Nasional Tahun 2023, P3E Kalimantan mengemban pencapaian kinerja dari masing-masing Indikator Kegiatan tersebut, selanjutnya capaian 2023 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 42. Capaian Rincian Output (RO) P3E Kalimantan 2023

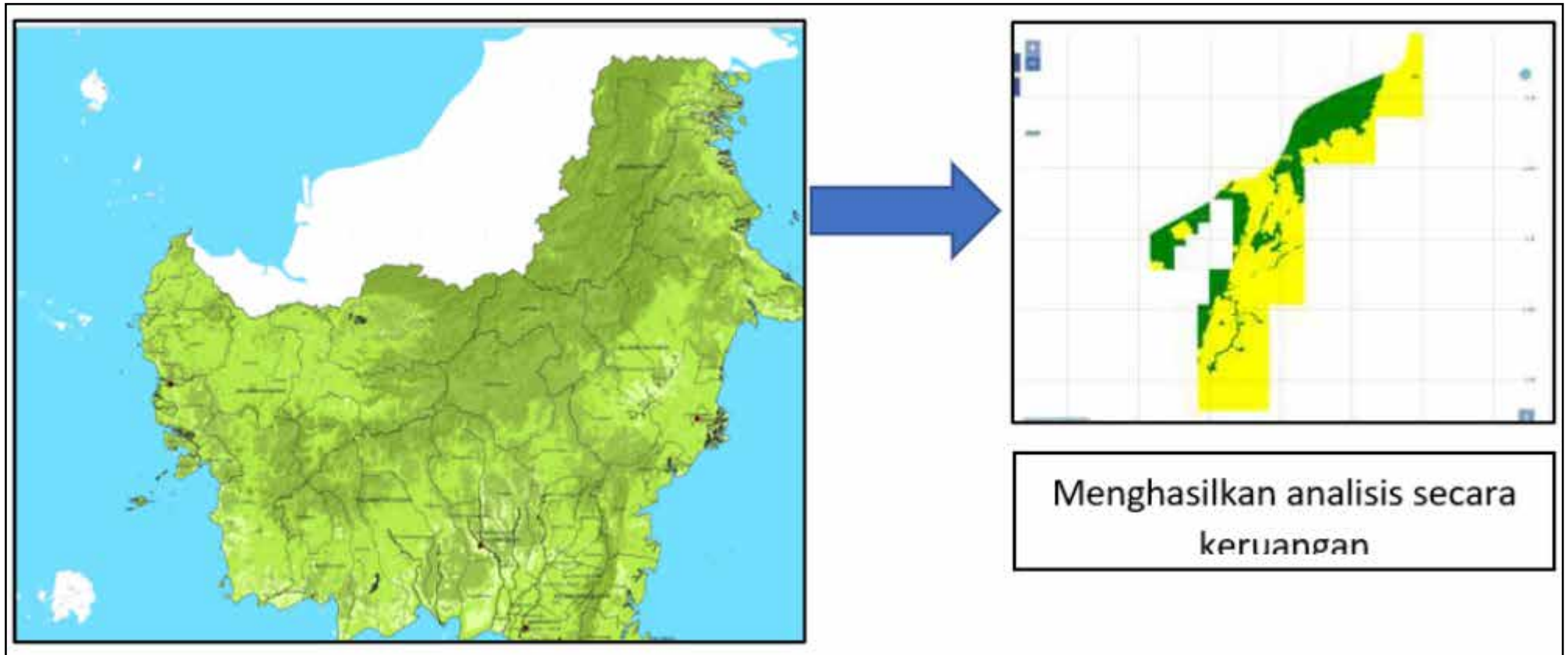
| Kode                        | Kegiatan/ KRO/RO                                      | Satuan        | 2023     |           | %          |
|-----------------------------|---|---------------|----------|-----------|------------|
|                             |   |               | Target   | Realisasi |            |
| <b>5374</b>                 | <b>Pengendalian Pembangunan LHK Regional</b>          |               |          |           | <b>100</b> |
| <b>5374.EBA</b>             | <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>            |               | <b>3</b> | <b>3</b>  | <b>100</b> |
| <b>EBA.962</b>              | Layanan Umum  | layanan       | 1        | 1         | 100        |
| <b>EBA.994</b>              | Layanan Perkantoran                                   | layanan       | 2        | 2         | 100        |
| <b>5374.EBB</b>             | <b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>          | <b>unit</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>100</b> |
| <b>EBB.951</b>              | Layanan Sarana Internal                               | unit          | 1        | 1         | 100        |
| <b>5374.FBA</b>             | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>     | <b>daerah</b> | <b>5</b> | <b>5</b>  | <b>100</b> |
| <b>FBA.003</b>              | Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | daerah        | 5        | 5         | 100        |
| <b>Rata-rata Capaian RO</b> |   |               |          |           | <b>100</b> |

## B INOVASI KEGIATAN

### 1. Pembangunan Pusat data dan analisis (Command Center) Ekoregion

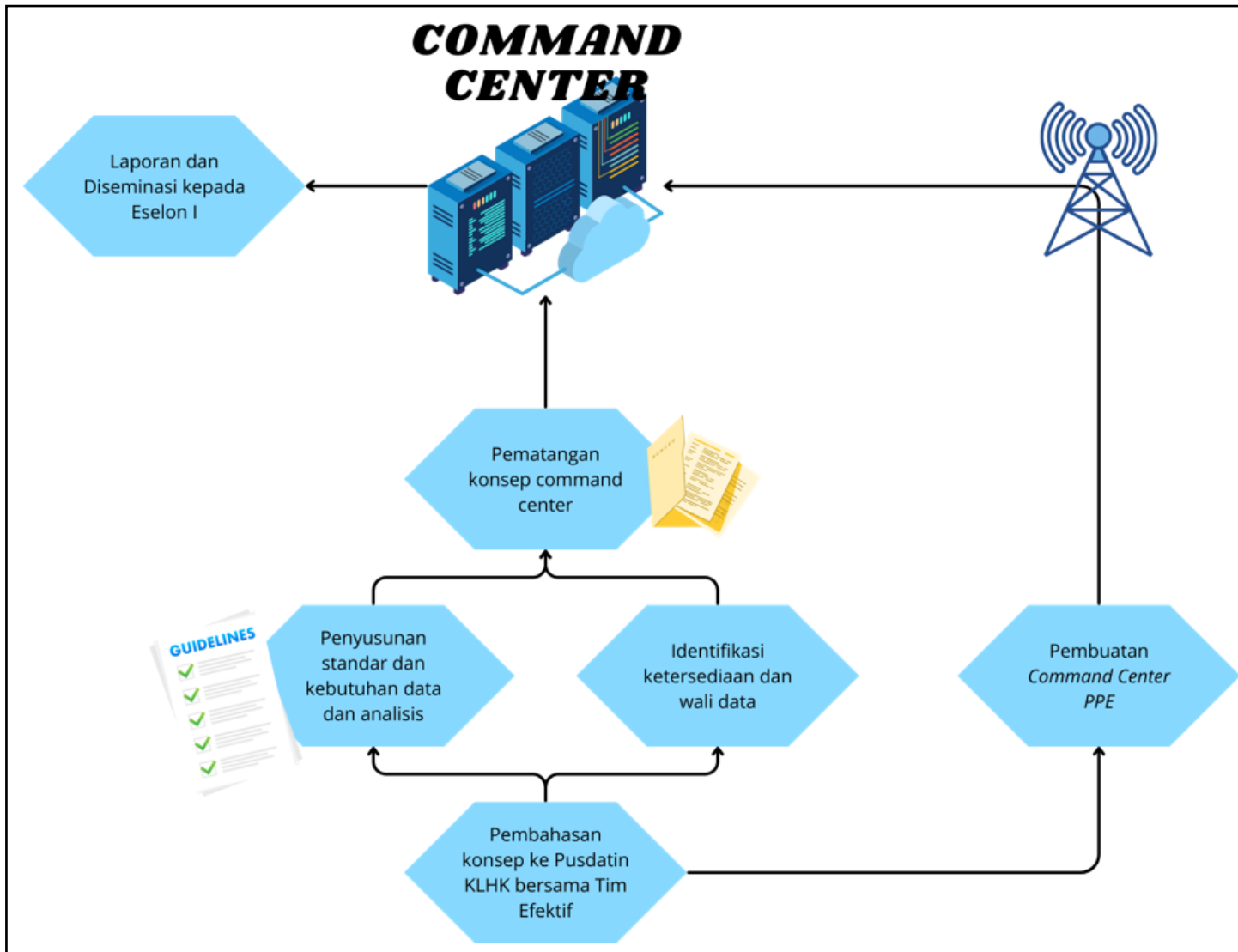
Pembangunan pusat data dan analisis Ekoregion (ecoregion command center) merupakan bagian dari pengembangan satu data KLHK yang terintegrasi, saat ini sedang direncanakan oleh institusi Pusat Data dan Informasi KLHK di Jakarta berbasis spasial dan terintegrasi. Dengan adanya pusat data dan analisis Ekoregion ini diharapkan kebijakan/program/kegiatan KLHK di wilayah Ekoregion akan dapat terukur akuntabilitas dan kinerjanya.





Gambar 67. Gambaran pusat data dan analisis pengendalian pembangunan Ekoregion

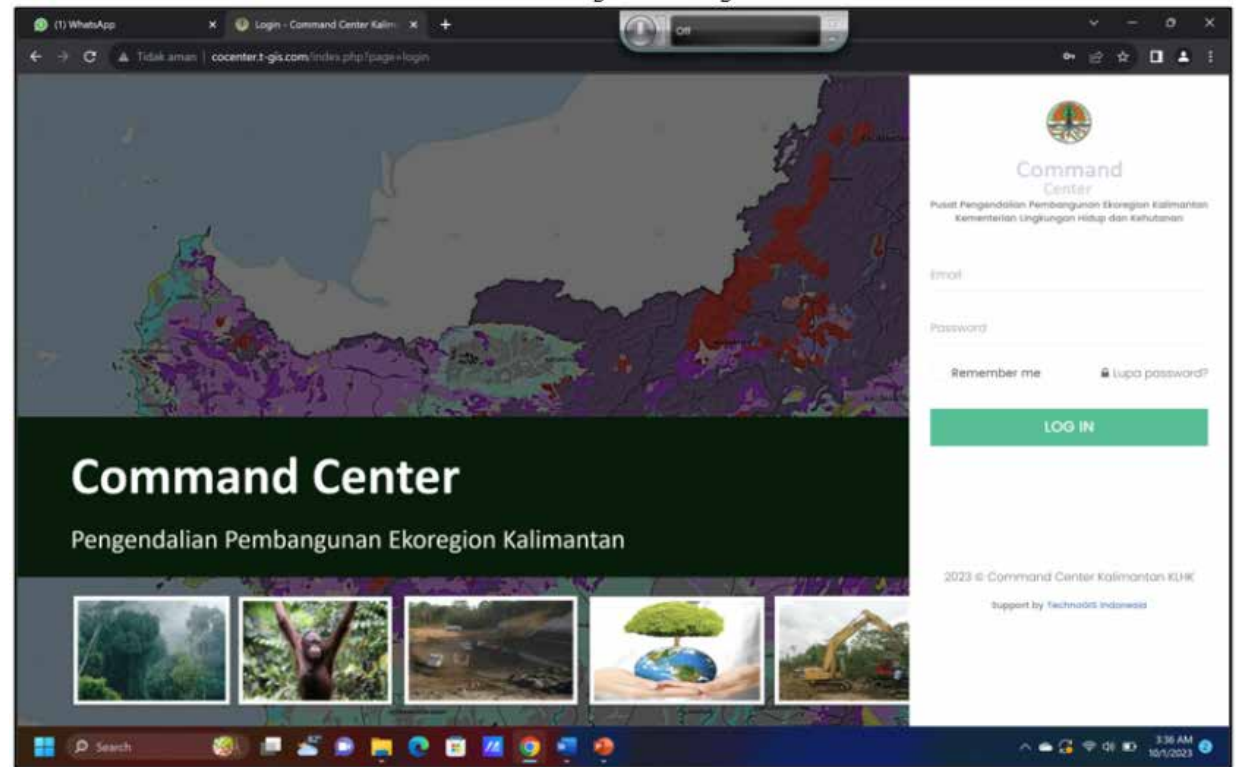
Dengan terobosan – terobosan inovatif ini akan mendorong peningkatan peran institusi P3E sebagai koordinator pengendalian pembangunan Ekoregion yang dengan peran dan keterlibatan para pihak menjadi jelas dan konkret didalam pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Ekoregion.



Gambar 68. Alur proses pembangunan command center ekoregion

Tabel 43. Tahapan pembangunan command center ekoregion

| <b>PROSES 3</b>  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN ANALISIS<br/>(COMMAND CENTER) PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION</b>  |                       |  |
| Tahapan Kegiatan   | Waktu                 | Hasil Kegiatan/Output  |
| Pembahasan Konsep ke Pusdatin KLHK bersama Tim Efektif   | 28 Agustus 2023       | Laporan Perjalanan Dinas<br>Dokumentasi kegiatan             |
| Pembuatan Command Center PPE   | 4 – 20 September 2023 | Command center PPE<br>Dokumen pengadaan command center       |
| Penyusunan Standar dan Kebutuhan Data dan Analisis   | 29-31 Agustus 2023    | Proses Pengkategorian Data<br>Dokumentasi kegiatan           |
| Identifikasi Ketersediaan dan Wali Data  | 4-15 September 2023   | Hasil Identifikasi<br>Dokumentasi kegiatan                   |
| Pematangan Konsep Command Center dengan 6 P3E se-Indonesia dan Pusdatin KLHK   | 18 September 2023     | Notulen Rapat<br>Dokumentasi kegiatan                        |
| Tersedianya Pusat Data dan analisis ( <i>Command Center</i> ) PPE  | 20 September 2023     | Sistem command center PPE                                    |
| Penyampaian dan desiminasi command center kepada Eselon I KLHK dan parapihak.  | 25 September          | 1. Undangan<br>2. Notulensi Rapat<br>3. Dokumentasi Kegiatan |
| <b>STAKEHOLDER TERLIBAT</b>  |                       |  |
| - Pokja 4 pada tim efek<br>- Eselon I KLHK dan Eselon II Lingkup Setjen KLHK   |                       |  |
| <b>HASIL CAPAIAN</b>   |                       |  |
| 1. Target output tahap ke-3 tercapai seluruhnya.<br>2. Tersedianya pusat data dan analisis pusat pengendalian pembangunan ekoregion ( <i>Command Center Ecoregion</i> ). |                       |  |

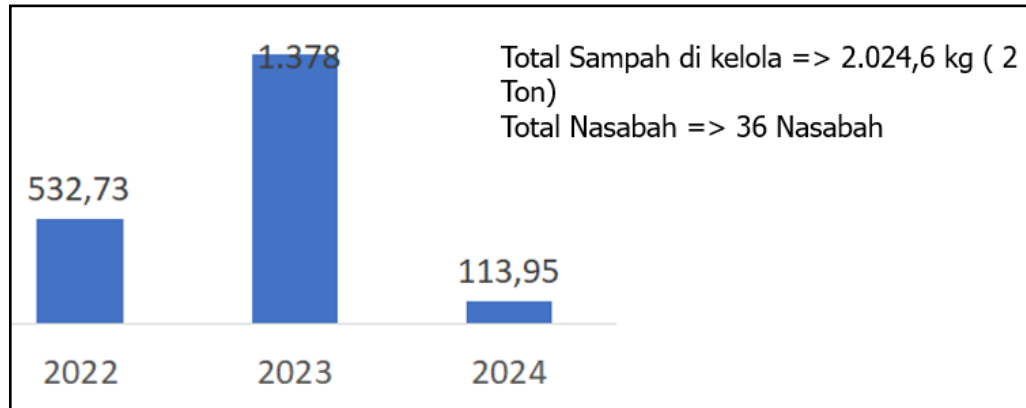


Gambar 69. Tampilan antar muka/dashboard Pusat Data dan Analisis (Ecoregion Command Center) Pengendalian Pembangunan Ekoregion

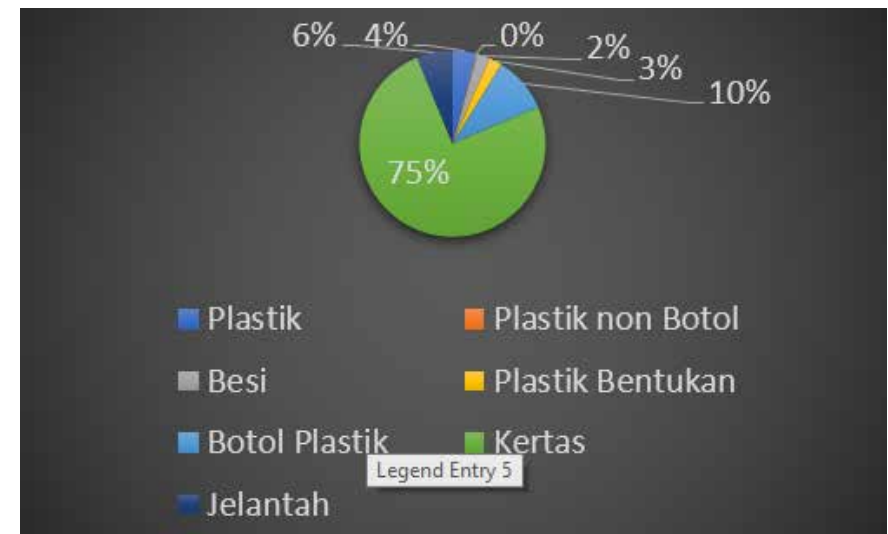
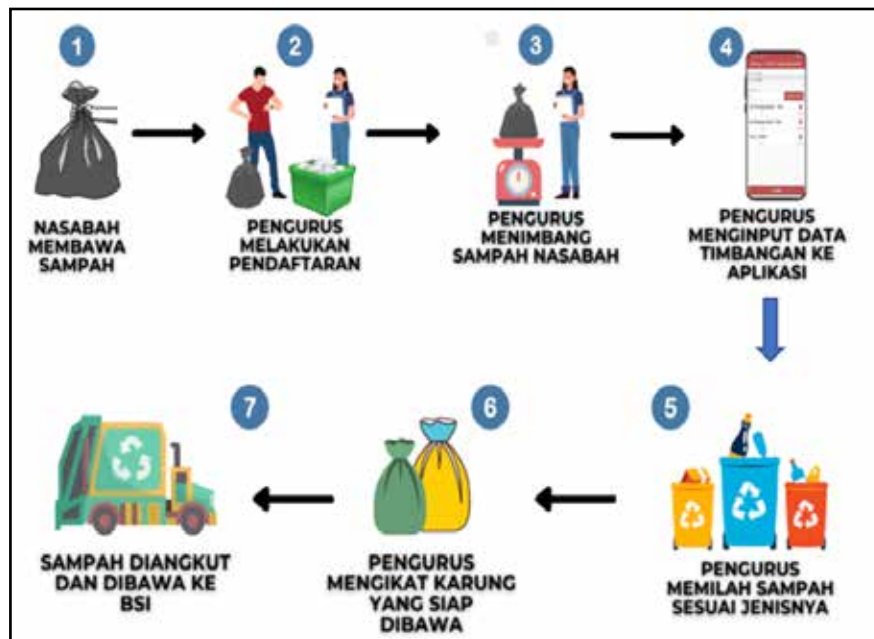
Ecoregion command center akan dioperasikan pada tahun 2024 dan memastikan pusat data dan analisis ekoregion (ecoregion command center) pada 6 (enam) P3E se-Indonesia beroperasi.

## 2. Penyelenggaraan Bank Sampah Unit (BSU) P3E Kalimantan

Di pertengahan tahun 2022 hingga saat ini akhir tahun 2023, P3E Kalimantan memulai membangun sistem Bank Sampah Unit (BSU) yang bertujuan untuk memulai langkah awal dalam proses memilah dan mengolah sampah dari diri sendiri dan pelaksanaan ekonomi sirkular. BSU yang berkedudukan di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ini sementara beranggotakan pegawai P3E Kalimantan, dan diharapkan dapat berkembang dan mampu melayani sampai di tingkat kelurahan. Adapun hasil penyelenggaraan BSU P3E Kalimantan sebagai berikut :



Gambar 70. Jumlah Sampah yang di Kelola BSU P3E Kalimantan



Gambar 71. Jenis Sampah yang di Kelola BSU P3E Kalimantan

Gambar 72. Alur BSU P3E Kalimantan

Dan dalam pencatatan sampah yang dikelola oleh BSU P3E Kalimantan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 73. Alur Digitalisasi pencatatan BSU P3E Kalimantan

## C REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Berdasarkan DIPA P3E Kalimantan TA 2023 Nomor SP DIPA- 029.01.2.400574/2023 tanggal 30 November 2022, pagu awal P3E Kalimantan TA 2023 adalah sebesar Rp 14.261.640.000,-. Dan telah direvisi dan menghapus anggaran yang diblokir/ Automatic Adjustment sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp 13.597.084.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp\_13.538.651.508,- atau mencapai (99,57%).

Pagu dan realisasi anggaran P3E Kalimantan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Pagu dan Realisasi Anggaran P3E Kalimantan TA 2023

| Kode                        | Kegiatan/ KRO/RO                                      | Satuan        | 2023                  |                       | %            |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                             |   |               | Pagu                  | Realisasi             |              |
| <b>5374</b>                 | <b>Pengendalian Pembangunan LHK Regional</b>          |               | <b>13.597.084.000</b> | <b>13.538.651.823</b> | <b>99,57</b> |
| <b>5374.EBA</b>             | <b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>            |               | <b>10.832.084.000</b> | <b>10.781.160.110</b> | <b>99,53</b> |
| EBA.962                     | Layanan Umum  | layanan       | 1.586.275.000         | 1.586.265.255         | 100          |
| EBA.994                     | Layanan Perkantoran                                   | layanan       | 9.245.809.000         | 9.194.894.855         | 99,45        |
| <b>5374.EBB</b>             | <b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>          | <b>unit</b>   | <b>200.000.000</b>    | <b>199.996.540</b>    | <b>100</b>   |
| EBB.951                     | Layanan Sarana Internal                               | unit          | 200.000.000           | 199.996.540           | 100          |
| <b>5374.FBA</b>             | <b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>     | <b>daerah</b> | <b>2.565.000.000</b>  | <b>2.557.495.173</b>  | <b>99,71</b> |
| FBA.003                     | Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | daerah        | 2.565.000.000         | 2.557.495.173         | 99,71        |
| <b>Rata-rata Capaian RO</b> |   |               |                       |                       | <b>99,75</b> |

Tabel 45. Sandingan Realisasi Anggaran P3E Kalimantan TA. 2022 dan 2023

| Kode               | KRO   | Satuan  | 2022                  |                       | 2023                  |                       |
|--------------------|---|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    |   |         | Pagu                  | Realisasi             | Pagu                  | Realisasi             |
| 5374.<br>EBA       | Layanan Dukungan<br>Manajemen Internal        | layanan | 11.495.802.000        | 11.399.717.247        | 10.832.084.000        | 10.781.160.110        |
| 5374.<br>EBB       | Layanan Sarana dan<br>Prasarana Internal      | unit    | 131.000.000           | 127.008.600           | 200.000.000           | 199.996.540           |
| 5374.<br>FBA       | Fasilitasi dan Pembinaan<br>Pemerintah Daerah | daerah  | 2.739.000.000         | 2.732.397.620         | 2.565.000.000         | 2.557.495.173         |
| <b>Jumlah</b>      |   |         | <b>14.365.802.000</b> | <b>14.259.123.467</b> | <b>13.597.084.000</b> | <b>13.538.651.823</b> |
| <b>% Realisasi</b> |   |         |                       | <b>99,26%</b>         |                       | <b>99,57%</b>         |

Dengan adanya keterbatasan sumber daya mengingat dari sisi anggaran pada tahun 2023 terdapat Automatic Adjustment anggaran yang dilakukan pemerintah untuk efisiensi belanja K/L, maka pada tahun 2022 Sekretariat Utama telah melakukan beberapa upaya dalam rangka efisiensi sumber daya antara lain :

- a. Efisiensi anggaran dan metode kegiatan: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara offline diganti melalui kegiatan online antara lain menggunakan media aplikasi zoom meeting dan pemanfaatan whatsapp group. Penyesuaian proses kerja ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas output sampai outcome hasil pekerjaan. Pengalihan kelebihan belanja pegawai untuk evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan meningkatkan realisasi ke nilai maksimal.
- b. Efisiensi sumber daya manusia: personel yang dibutuhkan untuk mempersiapkan suatu pembahasan secara offline tidak perlu melibatkan banyak orang sebagai panitia kegiatan dalam menyiapkan dan memfasilitasi peserta rapat.
- c. Efisiensi waktu: dengan menggunakan aplikasi zoom meeting, waktu untuk membahas beberapa kegiatan dapat dilaksanakan lebih dari 2 (dua) pembahasan dalam sehari mengingat tidak banyak dibutuhkan persiapan untuk pelaksanaan rapat melalui video conference dibandingkan jika pembahasan dilaksanakan secara offline/fisik. Selain itu rapat dapat dilaksanakan kapanpun dan metode hybrid tanpa harus memastikan kehadiran seluruh peserta Work From Office (WFO).

**PENUTUP**

**BAB  
TV**





Laporan Kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja P3E Kalimantan Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan P3E Kalimantan Tahun 2023, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja, semua mencapai target yaitu Tingkat Kepuasan terhadap Layanan P3E dengan persentase capaian 102,88%, dan Jumlah Pemda yang Difasilitasi sebesar 100%. Capaian Kinerja P3E Kalimantan mengalami kenaikan sebesar 1,78% dari tahun 2022 (101,1%). Kenaikan capaian kinerja tersebut mengindikasikan telah dilakukan upaya-upaya sistematis guna memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja P3EK pada tahun 2023.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani ditetapkan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, dimana hasil analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan anggaran), memiliki rasio efektifitas pencapaian kinerja sebesar 1,018 dan dan rasio efisiensi kinerja sebesar 1,033, yang secara simultan mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja Satker P3EK pada tahun 2023 telah berjalan secara efisien dan efektif, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya sepenuhnya mendukung pencapaian kinerja program tahun 2023.

Berdasarkan evaluasi kinerja telah membunyikan pada tingkat outcome. Hal ini untuk memastikan bahwa kerja nyata yang telah dilakukan melalui berbagai upaya tidak hanya “sent” namun “delivered”. Capaian tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder, utamanya perubahan budaya para ASN dan pegawai lingkup P3EK yang semakin berorientasi pada peningkatan kinerja.

Menutup laporan kinerja ini, diharapkan pada waktu mendatang P3E Kalimantan senantiasa menjadi penggerak perbaikan target capaian kinerja dan mendorong kinerja hingga pada tingkatan Outcome di level ekoregion.

# LAMPIRAN

# 1 PERJANJIAN KERJA SEKJEN KLHK TAHUN 2023



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si.  
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2023  
Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001

Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

35

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

| Kegiatan<br>(1)                             | Sasaran Kegiatan<br>(2)   | Indikator Kegiatan<br>(3)  | Target<br>(4) | Satuan<br>(5) |
|---|---|--|---------------|---------------|
| 5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 01-Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 01- Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E<br>02-Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion | 4<br>5        | Poin<br>Pemda |

### Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

|  |   |        |                                  |                      |
|--|---|--------|----------------------------------|----------------------|
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal        | 962-Layanan Umum P3E Kalimantan   | 1      | Layanan                          | 1.586.275            |
| EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal      | 994-Layanan Perkantoran P3E Kalimantan  | 2      | Layanan                          | 9.245.809            |
| FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah | 951- Layanan Sarana Internal P3E Kalimantan<br>003- Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan | 1<br>5 | Unit<br>Daerah<br>(ProwKab/Kota) | 200.000<br>2.565.000 |

Sekretaris Jenderal

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M  
NIP. 19640930 198903 1 001

Jakarta, Desember 2023

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.  
Jabatan : KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 28 Desember 2023

Pihak Pertama

Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19710126 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI  
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

| Kegiatan<br>(1)                              | Sasaran Kegiatan<br>(2)   | Indikator Kegiatan<br>(3)  | Target<br>(4) | Satuan<br>(5)  |
|--|---|--|---------------|----------------|
| 5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 01 - Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 01 - Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E<br>02 - Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion | 4<br>5        | Poin<br>Daerah |

| No. | Komponen Kegiatan   | Anggaran (x Rp. 1.000,-) |
|-----|---|--------------------------|
|     | <b>Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion</b>  | <b>840.000</b>           |
| AA  | Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Manggar |                          |
| AB  | Analisis Data dan Informasi dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Manggar                        |                          |
| AC  | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Manggar               |                          |
| AD  | Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan DAS Mahakam dan DAS Riko Manggar       |                          |
| BA  | Koordinasi Stakeholder dalam rangka Inventarisasi Perencanaan DAS Barito  |                          |

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 28 Desember 2023

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan  
Pengendalian Pembangunan

Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19710126 199803 1 003

### 3 PERJANJIAN KERJA BIDANG FASILITASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION TAHUN 2023



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMADEWI, S.Si., M.E.  
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 28 Desember 2023

Pihak Pertama,

RAHMADEWI, S.Si., M.E.  
NIP. 19710627 199703 2 001

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

| Kegiatan<br>(1)                              | Sasaran Kegiatan<br>(2)   | Indikator Kegiatan<br>(3)   | Target<br>(4) | Satuan<br>(5) |
|--|---|---|---------------|---------------|
| 5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 01 - Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 01 - Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E                   | 4             | Poin          |
|  |   | 02 - Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion | 5             | Daerah        |

| No. | Komponen Kegiatan  | Anggaran (x Rp. 1.000,-) |
|-----|--|--------------------------|
|     | Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di wilayah Ekoregion | 1.035.000                |
| AA  | Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran DAS Mahakam   |                          |
| AB  | Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Sampah, LB3 dan B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan   |                          |
| AC  | Fasilitasi Pengendalian Mutu Air Sungai dan Air Laut di Teluk Balikpapan   |                          |
| BA  | Fasilitasi Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion DAS Mahakam  |                          |
| CA  | Fasilitasi Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Ekoregion DAS Barito  |                          |
| DA  | Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion DAS Kapuas   |                          |

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA FARHUM. ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 28 Desember 2023

Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian  
Pembangunan Ekoregion

RAHMADEWI, S.Si., M.E.  
NIP. 19710627 199703 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
REVISI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUYUNG YUSUF WBISONO., SE., MA., M.S.E.  
Jabatan : KEPALA BIDANG EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 18 Desember 2023

Pihak Pertama,

BUYUNG YUSUF W., SE., MA., M.S.E..  
NIP. 19820713 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI  
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

| Kegiatan<br>(1)                              | Sasaran Kegiatan<br>(2)   | Indikator Kegiatan<br>(3)   | Target<br>(4) | Satuan<br>(5) |
|--|---|---|---------------|---------------|
| 5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 01 - Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E                 | 4             | Poin          |
|  |   | 02-Jumlah Pamda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion | 5             | Daerah        |

| No. | Komponen Kegiatan   | Anggaran (x Rp. 1.000,-) |
|-----|---|--------------------------|
|     | Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion   | 690.000                  |
| AA  | Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DAS Mahakam dan DAS Barito dalam rangka Peningkatan IKLH |                          |
| BA  | Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah dalam rangka Peningkatan IKP5 dan Mendorong Sirkular Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur   |                          |
| CA  | Evaluasi Dampak Pembangunan Wilayah IKN terhadap kualitas Lingkungan di DAS Riko Manggar  |                          |

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 19710530 199703 2 001

Balikpapan, 18 Desember 2023

Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian  
Pembangunan Ekoregion

BUYUNG YUSUF WBISONO., SE., MA., M.S.E..  
NIP. 19820713 200801 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
REVISI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAIFUL BAHRI., S.HUT., M.Sc.  
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Mini Farida Farhum., ST., M.Si.  
NIP. 197105301997032001

Balikpapan, 29 Desember 2023

Pihak Pertama,

SYAIFUL BAHRI., S.Hut., M.Sc.,  
NIP. 197301172000031003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 REVISI  
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN**

| Kegiatan<br>(1)                              | Sasaran Kegiatan<br>(2)   | Indikator Kegiatan<br>(3)                         | Target<br>(4) | Satuan<br>(5) |
|--|---|---|---------------|---------------|
| 5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional | 01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan | 04 - Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E | 4             | Poin          |

| No. | Komponen Kegiatan   | Anggaran (x Rp. 1.000,-) |
|-----|---|--------------------------|
|     | <b>Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan</b>                     | <b>1.586.275</b>         |
| A   | Penyusunan Rencana dan Sinkronisasi Kegiatan, Program dan Anggaran Wilayah Ekoregion Kalimantan | 562.723                  |
| B   | Layanan Survey Kepuasan dan Monitoring Evaluasi DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan              | 56.426                   |
| C   | Pengelolaan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  | 134.415                  |
| D   | Pelayanan Administrasi Kepegawaian  | 90.056                   |
| E   | Pelayanan Umum, Pengelolaan BMN dan Kearsipan   | 77.296                   |
| F   | Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Penanganan Karhutla   | 87.796                   |
| G   | Pelayanan Kegiatan Korwil UPT Katim   | 577.563                  |
|     | <b>Gaji dan Tunjangan</b>   | <b>4.302.875</b>         |
| A   | Pembayaran Gaji dan Tunjangan   |                          |
|     | <b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>  | <b>4.942.952</b>         |
| A   | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor   |                          |
|     | <b>Pengadaan Peralatan dan Mesin</b>  | <b>200.000</b>           |
| A   | Belanja Modal   |                          |

Balikpapan, 28 Desember 2023

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA FARHUM., ST., M.Si.  
NIP. 197105301997032001

Kepala Bagian Tata Usaha

Syaiful Bahri., S.Hut., M.Sc.  
NIP. 197301172000031000



**BINTAWA**  
*Moraceae*



PARK





PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  
EKOREGION KALIMANTAN